



Asita Sayangkan Kenaikan Tiket Wisata Tak Disosialisasikan

Bangli (Bali Post) -

Association of Indonesian Travel Agency (Asita) Bali kecewa dengan kenaikan tiket masuk ke sejumlah objek daya tarik wisata (DTW) yang mulai diberlakukan Pemkab Bangli per 1 Januari. Masalahnya, Asita mengaku tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya terkait hal itu. Apalagi kenaikan harga tiket itu justru membuat kaget wisatawan yang berkunjung ke DTW Penelokan saat libur tahun baru, Rabu (1/1) lalu.

Sekretaris Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia/Asita Bali, Putu Winastra, Kamis (2/1) kemarin mengungkapkan, sebelumnya tidak ada pemberitahuan apapun dari Pemkab Bangli terkait kenaikan tiket wisata. Pihaknya pun telah mencoba menghubungi pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli untuk konfirmasi perihal kenaikan tiket.

"Katanya surat sosialisasinya sudah dikirim lewat pos, faksimile, tetapi kenyataannya kami di DPD Asita sampai hari ini tidak

ada menerima apa-apa. Kemudian katanya besok akan dikirimkan SK soal kenaikan tarifnya, lalu buat apa? Sedangkan kenaikannya kan sudah berjalan per 1 Januari," ungkap Putu Winastra tidak habis pikir.

Winastra benar-benar kecewa dengan sikap Disparbud. Dia menilai Disparbud seolah-olah tidak membutuhkan keberadaan Asita.

Winastra menegaskan, pihaknya di Asita sejatinya tidak pernah alergi terhadap kenaikan tarif retribusi wisata. Kalaupun ada kenaikan tiap tahun, baginya hal

itu tidak masalah. Asalkan kenaikan tarif itu disosialisasikan dan diinformasikan jauh-jauh hari.

"Sebenarnya kami selalu siap kalau diajak diskusi termasuk perihal kenaikan tiket. Tetapi selama ini pengelola pariwisata (Disparbud) menaikkan retribusi itu seenak udelya. Itu yang sangat kami sayangkan," tambahnya serius.

Kini ia pun mengaku tak bisa bicara dan berbuat banyak dengan adanya pemberlakuan kenaikan tiket tersebut. Mau tak mau, pihaknya harus menerima risiko meru-

gi. Sebab sebelum adanya kenaikan tiket tersebut, Asita sudah membuat kontrak/menjual paket perjalanan wisata di tahun 2020 dengan tarif retribusi lama. Untuk menekan kerugian, pihaknya semaksimal mungkin berupaya mengalihkan tempat kunjungan wisatawan.

"Semaksimal mungkin kita alihkan. Tapi karena sudah masuk program, karena itu agak susah kami alihkan. Terkecuali perjanjian yang belum lama, maka bisa kami alihkan ke objek yang lain," imbuhnya.

Sekretaris Badan Pengelola Pariwisata Batur Unesco Global Geopark (BUGG) Dewa Ketut Setia Darma mengungkapkan, pemberlakuan kenaikan tiket pada hari pertama 1 Januari lalu menuai sedikit keluhan dari wisatawan utamanya domestik. Beberapa wisatawan

juga ada yang kaget dengan adanya kenaikan harga tiket itu.

"Mungkin karena sosialisasinya yang masih kurang," jelasnya. Dikatakan, sebelum diberlakukan kenaikan tiket, sudah sempat disosialisasikan Disparbud melalui selebaran. Namun menurutnya, sosialisasi itu tidak menjangkau semua wisatawan. "Makanya ada beberapa wisatawan kaget dengan kenaikan tiket itu," imbuhnya.

Diungkapkannya, pada libur tahun baru kemarin total jumlah wisatawan asing yang berkunjung mencapai 1.250 orang, sedangkan wisatawan domestik 1.054 orang. Angka itu meningkat dibandingkan libur tahun baru 2019 lalu yang hanya 515 orang wisatawan asing dan 335 wisatawan domestik. (kmb40)



☐ RADAR BALI ☐ TRIBUN BALI ☒ BALI POST ☐ NUSA BALI



Dana Desa untuk Bangli Naik Rp2 Miliar



Dewa Bagus Riana Putra

Bangli (Bali Post) -

Dana Desa (DD) yang akan dikucurkan Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Bangli tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Masing-masing desa mendapat alokasi DD dengan nilai berbeda-beda. Paling besar diterima Desa Songan B, Kintamani dengan nilai di atas Rp2 miliar.

Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menyebutkan besaran DD yang akan diterima Bangli tahun 2020 mendatang, yakni mencapai Rp63,4 miliar lebih. Jumlah tersebut naik Rp2 miliar dibandingkan tahun 2019 yang hanya Rp61,3 miliar.

Dana desa akan dibagikan untuk 68 desa di Bangli. Dari 68 desa itu, Desa Songan B, Kintamani menjadi desa yang paling besar menerima dana desa, yakni mencapai Rp2,1 miliar. Sedangkan desa yang dialokasikan menerima DD terkecil, yakni Desa Batukaang dengan nilai Rp754,7 juta.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Bangli, Dewa Bagus Riana Putra, mengatakan pengalokasian DD untuk masing-masing desa, sudah ada ketentuannya. Besarannya ditentukan alokasi dasar, seluruh desa di Indonesia mendapatkan besaran DD yang sama. Kemudian besar kecilnya DD ditentukan berdasarkan alokasi formula. Indikatornya meliputi jumlah penduduk, penduduk miskin, luas wilayah dan lainnya.

Selain itu besar kecil DD yang diterima desa itu, ditentukan juga dengan alokasi kinerja. Sebelumnya kata Bagus Riana Putra, semakin besar penduduk miskin suatu daerah, hal itu menjadi ukuran semakin besar desa tersebut mendapatkan DD. Sekarang pemberiannya juga diukur dengan kinerja. "Salah satu indikatornya adalah upaya desa menurunkan angka kemiskinan hingga peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) itu menjadi indikator sebuah kinerja," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sesuai ketentuan DD yang dikucurkan ke desa-desa, maka DD itu hanya boleh dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Memang dibolehkan untuk program pembangunan fisik dan infrastruktur. Namun diharapkan pembangunan fisik itu bisa menunjang dan juga menjadi sumber peningkatan PAD. (kmb40)



Bapenda Lakukan Pemutihan Denda PBB

★ Sasar Penunggak Pajak dari Tahun 1991-2012

Untuk tahun
2013-2019
penunggak pajak
masih tetap
dikenai bayar
denda sesuai
ketentuan.

DENPASAR, NusaBali

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar melakukan pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dimulai pada Kamis (2/1) kemarin. Pemutihan ini khusus bagi penunggak pembayaran pajak dari tahun 1991 hingga 2012 yang belum membayar pajak saat masih dipegang Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemutihan ini akan berlangsung selama tiga bulan kedepan hingga 31 Maret 2020 mendatang.

Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Dewa Nyoman Semadi mengatakan, pemutihan ini dilakukan sebagai bentuk penyadaran bagi warga untuk membayar pajak PBB di Kota Denpasar. Menurutnya, setelah diserahkan ke Bapenda, penunggak pajak dari tahun 1991-2012 sangat tinggi. Piutang yang diterima pihaknya dari KKP mencapai Rp 229.515.595.551 (Rp 229,5 miliar lebih). Dengan piutang sebanyak itu, pihaknya berharap pemutihan ini bisa memberikan solusi bagi mereka yang ingin membayar pajak.

Dijelaskan, saat membayar pajak warga hanya perlu membayar sesuai sertifikat tanpa harus membayar denda. Denda dihapuskan denda, sehingga tidak lagi memberatkan warga saat pembayaran pajak.

"Ini khusus data mereka yang piutang saat KKP. Penunggak pajak dari tahun 1991-2012," ungkapnya.

Untuk membayar pajak, warga cukup datang ke bank atau ke Kantor Bapenda Kota Denpasar dengan membawa surat yang diperlukan. "Mereka tinggal bayar aja, yang jelas tidak ada denda, ini pemutihan jadi kami harapkan masyarakat yang memiliki tanah atau bangunan yang belum bayar pajak dari 1991-2012 bisa tinggal membayar biaya pajak saja," jelasnya.

Sementara untuk tahun 2013-2019, kata dia, penunggak pajak masih tetap dikenai bayar denda sesuai ketentuan. "Jika kedepannya pemutihan ini dapat mengubah angka piutang, maka akan dilanjutkan dengan pemutihan untuk tahun 2013-2019," kata Dewa Semadi.

Terkait piutang yang tinggi, kata dia, pihaknya sudah terus berupaya melakukan sosialisasi, sehingga piutang yang sebelumnya mencapai Rp 229.515.595.551 (Rp 229,5 miliar lebih), kini sudah menjadi Rp 175.852.444.424 (Rp 175,8 miliar lebih) sampai dengan 31 Desember 2019.

Kata Dewa Semadi, proses pemutihan tenggang waktunya cukup lama yakni selama tiga bulan dari 2 Januari 2020 sampai 31 Maret 2020 mendatang. Dengan panjangnya waktu pemutihan, pihaknya berharap penunggak pajak bisa mendapatkan waktu untuk proses pembayaran. "Pembayarannya gampang cukup membayar ke bank saja atau ke Bapenda langsung. Selain memberikan pembelajaran wajib pajak juga sebagai pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah," pungkasnya. mis



Bypass Darmagiri Dilengkapi Patung Dipta

★ Semrawut, Kabel PLN dan
Telkom di Ubud akan Ditanam

GIANYAR, NusaBali

Tahun 2020, jalan bypass Dharmagiri Gianyar akan ditata sebagai persiapan stadion Kapten I Wayan Dipta di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, dipakai lokasi pembukaan Piala Dunia U-20. Jalan ini akan dilengkapi patung pahlawan Kapten I Wayan Dipta.

Hal itu diungkapkan Bupati Gianyar Made Mahayastra, Kamis (2/1). Kata dia, penataan dengan trotoarisasi di kiri-kanan sepanjang Jalan Bypass Dharmagiri, dari Taman Kota Gianyar - Desa Buruan, Blahbatuh. "Jalan ini sekitar 2km. Ditargetkan selesai tahun 2021," jelasnya.

Taman median juga ditata yang di tengahnya dibangun patung Kapten I Wayan Dipta. Patung ini sekaligus sebagai ikon stadion yang letaknya di sebelah selatan stadion. ketika baru memasuki jalan Baypas Dharmagiri.

Menurutnya, penataan ini tidak lepas dari aturan FIFA, di sekitar stadion tidak boleh ada parkir. Hanya boleh dipakai pejalan kaki. Jadi parkirannya jauh dari stadion. Para suporter nantinya harus berjalan sekian kilo meter menuju stadion. Dikatakan, trotoar ditata dengan bahan batu alam. Targetnya tahun 2021 selesai.

Sementara itu, kabel-kabel instalasi PLN maupun Telkom yang semrawut di kawasan wisata Ubud akan ditanam. Tidak hanya merusak pemandangan, kabel tersebut juga kerap menjadi penghambat bila ada hajatan budaya seperti palebon di Ubud.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengakui rencana menanam kabel di Ubud sudah jadi wacana sejak lama. Dalam periode kepemimpinannya kini, Mahayastra optimis rencana itu terwujud. Kabel-kabel akan

ditempatkan pada tempat khusus di bawah tanah dengan kedalaman 1,5 meter lebar 1 meter. Anggaran proyek ini Rp 12 miliar dari APBD Gianyar 2020. "Penanaman kabel ini dari Catus Pata atau depan Puri Ubud ke timur sampai Patung Arjuna, Desa Peliatan," katanya kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Kata Bupati Mahayastra, pengerjaan proyek ini dilakukan pada malam hari dan bila sudah menjelang pagi distop. "Dikerjakan malam hari saja, sehingga tidak mengganggu wisatawan dan lalu lintas saat siang," katanya.

Diakui, penanaman kabel di sepanjang jalur tersebut sudah menjadi cita-cita sejak lama. Sebab jalur tersebut menjadi akses untuk hajatan budaya terutama palebon Puri Ubud yang selalu menjadi perhatian wisatawan yang ke Ubud.

Diakui, setiap ada hajatan palebon, kebel dari catus pata Ubud ke timur itu harus diputus dalam kurun waktu cukup lama. Kondisi ini tentu memberi problem untuk sejumlah pemilik akomodasi di kawasan itu. "Ya kalau hotel besar tidak masalah listrik dimatikan, mereka punya listrik cadangan. Kalau akomodasi kecil akan merugi. Karena stok makanan seperti daging dan sayuran yang tidak didinginkan bisa rusak," katanya.

Bupati juga mempertimbangkan tingginya anggaran memutuskan kabel untuk satu kali hajatan budaya. "Penanaman kabel ini penting untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran di Ubud," imbuhnya. Khusus untuk wilayah Kelurahan Ubud dan Desa Peliatan, dia mengaku akan menata pedestrian berbahan batu alam. **nvi**



Hujan Deras, Atap Kelas SMPN 1 Baturiti Ambruk

Atap kelas VIII C dan D SMPN 1 Baturiti ambruk total, Rabu (1/1) sore. Untuk sementara siswa belajar di ruang laboratorium komputer dan laboratorium IPA.

TABANAN, NusaBali

Bangunan SMPN 1 Baturiti yang dialokasikan untuk kelas VIII bagian atapnya ambruk total pada Rabu (1/1) sekitar pukul 17.40 Wita. Beruntung saat itu siswa sedang libur sekolah, sehingga tidak ada yang terdampak.

Kepala SMPN 1 Baturiti I Nyoman Suastika, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 17.40 Wita. Sebelumnya wilayah Baturiti memang diguyur hujan deras. Atap sekolah ambruk diketahui oleh petugas sekolah yang kebetulan rumahnya di selatan sekolah. "Didengar ada suara gemuruh, setelah dicek ternyata atap sekolah yang ambruk,"

ungkapnya, Kamis (2/1).

Diterangkannya, yang ambruk tersebut adalah atap kelas VIII C dan D. Atap yang ambruk berada di lantai II. Sedangkan bangunan lantai I yang diperuntukkan kelas

VIII A dan B tidak terdampak.

"Jadi bagian kap bajanya yang ambruk total karena tidak kuat menahan, akibat hujan deras yang terjadi belakangan ini. Untuk tembok dan kaca masih utuh," tutur Suastika.

Dia menambahkan gedung tersebut adalah bangunan tahun 2007 bantuan dari komite. Beruntung saat kejadian siswa sedang libur. "Ini bantuan komite tahun 2007," katanya.

Karena pada 6 Januari 2020

siswa sudah mulai sekolah, untuk sementara pihaknya akan memindahkan siswa belajar di ruang laboratorium komputer dan laboratorium IPA. "Per kelas ada 32 orang, kebetulan kami menerapkan kurikulum

2013," tegasnya.

Kondisi ini sudah sempat dilaporkan ke Dinas Pendidikan Tabanan. Bahkan kepala Dinas Pendidikan, BPBD Tabanan, polisi ataupun camat sudah turun ke lokasi. "Rencana per-

baikan belum, namun akan diajukan terlebih dahulu. Tadi pak kadis mengatakan sedang berusaha membantu, mudah-mudahan pengajuan anggaran bisa disetujui," tandas Suastika. **des**



Rampungkan Auditorium, ✓ Siapkan Anggaran Rp 3,6 Miliar



GEDUNG auditorium di kawasan civic center Pemkab Jembrana, Jalan Mayor Sugianyar I, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kamis (2/1).

NEGARA, NusaBali

Pembangunan gedung auditorium di kawasan civic center Pemkab Jembrana, Jalan Mayor Sugianyar I, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, akan kembali dilanjutkan di 2020 ini. Dalam pembangunan tahap III yang sekaligus menjadi pembangunan tahap akhir menyangkut pekerjaan mekanikal dan elektrik (ME) serta lanjutan penataan landscape di areal auditorium, itu disiapkan pagu anggaran sebesar Rp 3,6 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) Jembrana I Ketut Antara, seizin Kadis PUPRKP Jembrana I Wayan Darwin, menyatakan meski bangunan utama dan penataan sebagian areal sekitar telah rampung dilaksanakan tahun 2019 lalu, pembangunan auditorium

itu belum dilaunching. Pasaunya, masih ada beberapa pekerjaan yang akan dilanjutkan tahun ini, untuk memfungsikan auditorium tersebut. "Masih ada lanjutan yang terakhir tahun ini. Kami siapkan pagu anggaran Rp 3,6 miliar," ujarnya, Kamis (2/1).

Menurutnya, pembangunan tahap akhir itu mencakup pekerjaan ME, seperti pengadaan AC, genset, lampu, dan lanjutan penataan landscape, khususnya di sisi timur yang belum tergarap. Sesuai rencana, untuk penataan landscape di sisi kanan dan kiri depan gedung auditorium ini akan ditanami padi. "Nanti yang di depan itu akan ditanami padi. Kami buat konsep per sawah untuk mempercantik areal sekitar. Sama seperti yang ada di Puspem (Pusat Pemerintahan) Badung, kan ada persawahan juga. Kebetulan di timur juga ada saluran irigasi," ucapnya.

Sesuai rencana, sambung Antara, pembangunan gedung auditorium di bekas areal persawahan yang berdekatan dengan rumah jabatan (rumjab) bupati dan rumjab wakil bupati, itu akan dijadikan tempat pertemuan indoor yang melibatkan banyak orang. Kapasitas gedung auditorium yang dibangun di tengah-tengah lahan seluas sekitar 1 hektare ini bisa menampung sekitar 500 orang. "Untuk pembangunan tahap III, ya kami target sudah rampung tahun ini. Nanti untuk pengelolaannya, akan kami serahkan ke OPD terkait. Biasanya dikelola Bagian Umum," ujarnya.

Sementara Bupati Jembrana I Putu Artha, dalam jumpa pers akhir tahun lalu, mengatakan, selain untuk pertemuan, gedung auditorium yang dibuat megah, itu rencananya juga akan disewakan untuk acara resepsi pernikahan. Selain itu juga disediakan tempat untuk menggelar olahraga indoor, seperti yoga, pencak silat, dan lainnya. "Itu kami siapkan kalau ada masyarakat yang mau nyewa gedung untuk resepsi, biar tidak pakai Gedung Kesenian Bung Karno dan Gedung Mendopo Kesari. Karena kalau di Mendopo Kesari, tidak ada parkir, dan tempatnya terbatas. Kami siapkan auditorium itu biar ada tempat yang lebih representatif. Nanti kalau ada hujan, bisa juga dijadikan tempat apel, dan acara-cara skala besar," ucapnya.  ode



Realisasi PAD Pajak Hanya 89 Persen

SINGARAJA, NusaBali

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng dari pajak tahun 2019 ini tak memenuhi target. Sebanyak 11 sektor pajak yang menjadi pendapatan beberapa di antaranya merosot jauh, sehingga realisasi hingga akhir tahun 2019 hanya 89 persen. Data Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng di tahun 2019, penerimaan pajak dari 11 sektor pajak sebesar Rp 174.650.000.000. Hanya saja di akhir tahun lalu jumlah pajak yang terkumpul Rp 155.758.068.233. Jumlah itu terakumulasi dari sebelas jenis pajak yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung wallet, mineral bukan logam dan batuan, PBB P2 dan BPHTB.

Realisasi yang belum mencapai target itu disebut Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng, I Gede Sugiarta Widiada, Kamis (2/1) k disebabkan lima jenis pajak yang capaiannya di bawah 85 persen. Bahkan yang terendah ada pajak parkir hanya tercapai 42,94 persen atau Rp 73.225.600 dari target Rp 170.516.500. "Pajak parkir menurun karena perusahaan seperti supermarket yang besar di Buleleng beberapa ada yang menurun jumlah konsumennya bahkan sempat vakum be-

berapa lama," kata dia.

Selain itu pajak penerangan jalan, hiburan, mineral bukan logam dan batuan serta reklame juga belum dapat memenuhi target. Termasuk pajak hotel yang terakhir tercatat capaiannya hanya 85 persen. Dari target Rp 33 miliar lebih baru terseror ke khas daerah sebanyak Rp 28 miliar. Capaian pajak ini juga disebut Sugiarta sebab dari penurunan kunjungan wisata yang menginap di hotel wilayah Buleleng.

Meski demikian, tiga jenis pajak lain menunjukkan capaian seratus persen bahkan lebih. Seperti pajak air tanah menunjukkan angka 100,03 persen, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan capaian 108,05 persen dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 112,40 persen.

"Pada capaian PBB P2 padahal awal ada kesangsian karena capaian pada bulan Agustus masih sangat rendah ternyata masyarakat membayarkan pajaknya di detik-detik terakhir batas waktu hingga melampaui target," kata mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Buleleng itu.

Dengan capaian di tahun 2019 yang belum maksimal, dirinya pun mengaku kembali akan melakukan evaluasi untuk capaian target di tahun 2020 ini. **k23**



Bupati Giri Prasta Minta FK2D Peka Dengan Dinamika di Wilayah

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta mengingatkan Forum Komunikasi Kelian Dinas (FK2D) untuk selalu berbesar hati dalam menjalankan tupoksi sebagai Kelian Dinas. Hal itu mengingat memimpin masyarakat dengan beragam kepentingan dan keinginan bukanlah perkara gampang.

FK2D dituntut untuk selalu peka dengan dinamika yang berkembang di wilayah masing-masing, serta meningkatkan fungsi koordinasi dengan pihak terkait sehingga segala macam keluhan dan permasalahan yang muncul dimasyarakat bisa dicarikan solusi dengan cepat. Penegekan tersebut disampaikan Bupati Giri Prasta didampingi Camat Abiansemal I.B Mas Arimbawa saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kelian Dinas Kecamatan Abiansemal, bertempat di ruang rapat rumah jabatan Bupati Badung, Kamis (2/1).

Lebih lanjut Bupati Giri Prasta mengatakan Pemkab Badung konsisten dan punya konsen besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan personal dan komunal

masyarakat Badung. Dengan jalan meningkatkan kualitas SDM yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, adat dan budaya. Serta peningkatan usaha ekonomi produktif dengan jalan memberikan pelatihan kewirausahaan.

"Untuk itu saya perintahkan kepada FK2D Kecamatan Abiansemal untuk bersungguh-sungguh melakukan pemetaan potensi di wilayah masing-masing. Agar kedepannya kita mampu menggali dan menggerakkan roda perekonomian di tataran masyarakat bawah. Sesuai dengan amanat presiden membangun wilayah dari pinggiran maka saatnya perangkat desa terbawah berperan aktif dalam membangun wilayah masing-masing," ujar Giri Prasta.

Sementara itu I Gusti Ngurah Suwindra selaku Ketua Forum Komunikasi Kelian Dinas (FK2D) Kecamatan Abiansemal melaporkan, acara audiensi dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan pengurus baru FK2D yang dirangkaikan acara temu kenal dengan Camat Abiansemal yang baru.



BUPATI GIRI PRASTA didampingi Camat Abiansemal I.B Mas Arimbawa saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kelian Dinas Kecamatan Abiansemal, bertempat di ruang rapat rumah jabatan Bupati Badung, Kamis (2/1).

Pihaknya juga menambahkan selaku ujung tombak perangkat pemerintah terbawah ingin meminta petunjuk dan arahan dari Bupati Badung agar FK2D mampu mengawal serta melaksanakan kebijakan dan program-program yang dicanangkan Pemda Badung. Program yang dimaksud terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

"Kami juga menyampaikan rasa terimakasih secara langsung kepada Bupati atas segala perhatian beli-

au selama ini kepada FK2D Kecamatan Abiansemal sekaligus mohon petunjuk berkaitan dengan tugas-tugas kami selaku pelayan masyarakat," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati Giri Prasta juga memberikan dana Rp. 50 juta untuk mensupport kegiatan operasional FK2D Abiansemal, guna memaksimalkan fungsi komunikasi dan koordinasi anggotanya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa. (adv/gus)



Perbaikan Irigasi dari DAK Rp5 Miliar

Tabanan (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) tahun 2020 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan dan rehabilitasi irigasi sebesar Rp5 miliar lebih. Anggaran pusat ini direalisasikan di tujuh kecamatan. Hal itu sesuai proposal yang diajukan sebelumnya. "Masih menunggu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari DPRD Tabanan. Ada 9 paket yang kami usulkan," ucap Kabid Sumber Daya Air PUPRPKP Kabupaten Tabanan Ni Ketut Sri Artini, Kamis (9/1) kemarin.

Lanjut dikatakannya, rehabilitasi saluran irigasi yang diusulkan lewat DAK seperti di Kecamatan Baturiti, yakni irigasi Apuan, Kecamatan Kediri di daerah irigasi Senapahan, Kecamatan Selemadeg Barat di daerah irigasi Wanagiri, Kecamatan Marga di daerah irigasi Sasih, Kecamatan Penebel daerah irigasi Merta II, Kecamatan Pupuan daerah irigasi Puyungan, Kecamatan Selemadeg Timur irigasi Yeh Matan, Kecamatan Selemadeg Barat irigasi Yeh Bakung, dan Kecamatan Pupuan daerah irigasi Dangin. "Semua ini usulan lewat proposal tahun 2019," terangnya.

Untuk usulan lewat DAK tersebut

tinggal menunggu proses DPA. Jika sudah selesai baru bisa disiapkan tahapan selanjutnya, agar usulan tersebut dapat direalisasikan. "Pastinya sudah bisa terealisasi tahun 2020. Hanya masih menunggu DPA dari DPRD Tabanan," ucapnya.

Selain pengusulan ke pusat, PUPRPKP juga mengajukan tujuh paket perbaikan irigasi melalui dana APBD. Usulan itu tersebar di empat kecamatan, yakni Subak Penatahan Kecamatan Penebel. Pembangunan irigasi di Subak Cepik, Desa Tajen, Kecamatan Penebel, perbaikan saluran irigasi Subak Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, perbaikan saluran irigasi Subak Desa Kuwum, Kecamatan Marga. Perbaikan jaringan irigasi daerah irigasi Gunung Subamia, Kecamatan Tabanan dan perbaikan jaringan irigasi di daerah irigasi Subak Sanggulan Kecamatan Kediri. "Usulan melalui APBD Tabanan itu sebesar Rp 1.540.000.000 masih diproses," katanya.

Artini menambahkan, usulan perbaikan maupun rehabilitasi dilakukan karena di masing-masing subak terjadi kerusakan. Sebagian besar akibat bencana alam. "Yang kita usulkan ke PUPRPKP adalah proposal. Selanjutnya PUPRPKP yang menindaklanjuti," ucapnya. (kmb28)



Tarif Penyeberangan Danau Batur Naik

BANGLI, NusaBali

Tarif angkutan wisata motor boat di Danau Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli naik sejak 1 Januari 2020. Kenaikan retribusi mengacu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan kepelabuhan. Peningkatan tarif ini akan diimbangi dengan kualitas pelayanan dan kelengkapan sarana prasarana.

Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Penyebrangan Danau Batur I Ketut Nasta mengatakan, kenaikan tarif tidak terlalu berpengaruh terhadap

pemanfaatan jasa penyeberangan. "Pemandu wisata sempat bertanya kenaikan tarif ini, mereka bisa menerimanya," ungkap Ketut Nasta, Kamis (9/1). Sebelumnya, tarif untuk wisatawan domestik Rp 499.900, naik menjadi Rp 601.000. Wisatawan asing sebelumnya Rp 514.900, naik menjadi Rp 633.000.

Tarif untuk 2 orang penumpang domestik sebelumnya Rp 516.900, naik menjadi Rp 625.000 dan untuk 2 orang wisatawan asing sebelumnya Rp 546.900 naik menjadi Rp 685.000. Terpisah, Kepala

Dinas Perhubungan Bangli, I Gede Redika mengatakan, dengan adanya kenaikan tarif akan diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana pelabuhan. Salah satunya dengan merevitalisasi pelabuhan.

Gede Redika mengatakan, target retribusi pelabuhan tahun 2019 sebesar Rp 48 juta, terealisasi Rp 36.777.000. Sedangkan target untuk tahun 2020 sebesar Rp 56 juta. "Mudah-mudahan kami bisa mencapai target, bahkan bisa melebihi target yang dicanangkan pemerintah," harap Gede Redika. **esa**



Ariyaningsih Segera Disidangkan

Tersangka Lain Berpeluang Terseret

DENPASAR, Radar Bali - Mantan bendahara Desa Dauh Puri Klod, Ni Luh Putu Ariyaningsih, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana APBDes menjalani pelimpahan

tahap dua. Atau pelimpahan barang bukti (BB) dan tersangka di Kejari Denpasar, kemarin (9/1). Jaksa penyidik menyatakan berkas perkara perempuan 33 tahun tersebut sudah P-21 alias lengkap.

Selanjutnya jaksa penyidik menyerahkan Ariyaningsih pada jaksa penuntut umum (JPU) untuk dilimpahkan ke

Pengadilan Tipikor Denpasar. Dalam pelimpahan tahap dua kemarin, dia didampingi pengacaranya Putu Bagus Budi Arsawan.

Yang menarik dari pelimpahan Ariyaningsih kemarin yaitu peluang terseretnya tersangka baru semakin terbuka lebar ■

► Baca *Ariyaningsih...* Hal 7

Penahanan segera Diperpanjang Lagi

■ ARIYANINGSIH...

Sambungan dari hal 1

Ada beberapa orang yang perannya sedang didalami jaksa. Salah satunya adalah mantan Perbekel Dauh Puri Klod yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Kota Denpasar I Gusti Made Wira Namiartha atau yang karib disapa Jik Nami. Bakal adanya calon tersangka baru itu berdasar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dicantumkan dalam dakwaan. Pasal 55 KUHP ini mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang.

"Akan ada tersangka baru selain bendahara. Saya yakin, bahwa ini (tersangka) lebih dari satu. Saya yakin akan ada tersangka baru. Siapa itu? Tunggu nanti," tegas Kasi Pid-sus Kejari Denpasar I Nengah Astawa didampingi Kasi Intel IGN Agung Ary Kesuma di wawancara usai pelimpahan. Kapan diumumkan? "Secepatnya, pasti kami umumkan. Yang jelas, tersangka baru pasti ada, harus ada karena ada Pasal 55," imbuh Astawa. Kembali ditanya tentang potensi adanya tekanan politik dari pihak lain, Astawa menyebut pihaknya bekerja berdasar bukti dan fakta. Jaksa tidak berpolitik dalam menegakkan hukum.

Ia juga membantah tidak ada

pesanan dari siapa pun untuk menetapkan tersangka. "Kami tidak melihat siapa yang berbuat, tapi apa yang diperbuat. Tidak ada yang menekan jaksa," sergahnya.

Untuk tersangka Ariyaningsih, pihaknya kembali memperpanjang penahanan. Pihaknya juga tengah berusaha menyempurnakan dakwaan. Rencananya pekan depan berkas akan dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam dakwaan primer, pihaknya memasang Pasal 2 *juncto* Pasal 18 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan dakwaan subsider Pasal 3 *juncto* Pasal 18 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara dakwaan lebih subsider dipasang Pasal 8 UU Tipikor.

Ditegaskan Astawa, dengan adanya Pasal 55, secara hukum pidana artinya perbuatan dilakukan lebih dari satu orang. Selanjutnya tinggal mencari perannya masing-masing pihak terkait. Yang membedakan hanya perannya. Siapa pelaku utama, turut serta, atau ada yang menyuruh. Untuk perkara ini, tersangka Ariyaningsih dinyatakan sebagai pelaku karena memenuhi semua unsur delik.

Disinggung apakah ada kendala, sehingga dalam menetapkan tersangka baru kejak-

saan terkesan gamang, Astawa kembali menyangka. "Semua ini (penetapan satu tersangka) adalah strategi kami. Lebih baik kami berhati-hati dengan hasil optimal, daripada grusa-grusu tapi tidak bagus," kilah pria 44 tahun itu.

Astawa kembali meyakinkan, bahwa ada pihak lain yang terlibat. Namun, perannya sebagai apa masih diperdalam. Pihaknya juga akan melihat perkembangan persidangan. Bisa saja saat sidang berlangsung ada sprindik untuk tersangka baru, atau setelah vonis ada sprindik baru.

Terkait pengembalian uang sejumlah pihak, Astawa menyebut hal itu tidak bisa menghapuskan tindak pidana. Pengembalian uang hanya menunjukkan ada itikad baik dari pelaku. "Pengembalian uang juga menjadi salah satu petunjuk untuk kami dalam," tukasnya.

Ditambahkan, pihak yang sudah mengembalikan uang yaitu mantan kaur keuangan mengembalikan Rp 102 juta, mantan perbekel mengembalikan Rp 8,5 juta, dan bendahara mengembalikan Rp 146 juta. "Mereka yang terlibat menikmati atau terlibat itu akan kami akan perdalam," tandas Astawa.

Di lain sisi, Ariyaningsih yang dijemput dari Lapas Khusus Perempuan Denpasar, itu tidak lagi tampil polos seperti saat

pertama kali ditahan. Meski menghuni sel, Ariyaningsih pandai berdandan. Wajahnya dibalut bedak, alis dan bulu mata dihias hitam tebal. Bibirnya juga sudah dipoles lipstik. Ia juga tampil lebih rileks saat menjawab pertanyaan koran ini.

"Kami tidak mengajukan penahanan," kata pengacara Ariyaningsih. Ditanya kemungkinan adanya tersangka baru jika merujuk Pasal 55 KUHP, Budi mengatakan akan menunggu perkembangan dari kejaksaan.

Sementara itu, Ariyaningsih mengakui memakai uang APBDes Dauh Puri Klod. Dikatakan, jumlah uang yang dipakai tidak tahu persis. Ini karena pembukuan keuangan di desa amburadul. "Saya pribadi sudah kembalikan Rp 146 juta. Saya mengembalikan uang yang sudah saya pakai," jelasnya.

Namun, berdasar penghitungan Inspektorat Kota Denpasar ada dana sebesar Rp 770 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Ariyaningsih mengaku tidak tahu siapa saja yang memakai. Kerugian sebesar Rp 770 juta itu masih diselidiki dan dicari orang yang menikmati. "Yang saya pakai sudah saya kembalikan. Cuma yang Rp 770 juta itu masih dicari lagi ditelusuri lebih dalam, masih diselidiki lagi," imbuhnya. (san/pit)



☒ RADAR BALI ☐ TRIBUN BALI ☐ BALI POST ☐ NUSA BALI
☐

Tahun 2020, Giliran Tukad Lobong Ditata

DENPASAR, *Radar Bali* - Pemkot Denpasar masih tergiila-gila dengan program penataan sungai. Setelah menata beberapa sungai, program ini berlanjut ke sungai-sungai lainnya. Di antaranya Tukad Lobong di Desa Sumerta. Selain itu, Tukad Badung dan Tukad Tag-tag yang sudah ditata tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini dilanjutkan penataan.

Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Denpasar, Ida Ayu Tri Suci saat dikonfirmasi Kamis (9/1) menjelaskan, adapun tiga sungai tersebut sedianya akan dimulai penataannya di tahun 2020 ini. Yakni Tukad Lobong, Desa Sumerta yang akan dilaksanakan penataan sepanjang 200 meter dengan anggaran Rp1,4 Miliar. Tukad Badung lanjutan yakni dari Taman Kumbasari ke utara sepanjang 400 meter dengan anggaran Rp2,9 Miliar. Dan yang ketiga adalah Tukad Tag-Tag yang akan ditata dengan menambahkan konsep anjungan sekitar 67 meter dengan

anggaran Rp800 juta.

Bahwa Pemkot Denpasar untuk menata sungai yang melintasi jantung kota. Tentunya hal ini dilaksanakan sebagai upaya berkelanjutan untuk memberikan nuansa indah dan edukasi terhadap masyarakat untuk ikut aktif menjaga kebersihan sungai.

"Sejak awal dilaksanakan, penataan sungai ini merupakan upaya Pemkot Denpasar untuk memperindah dan mengedukasi masyarakat untuk aktif menjaga kebersihan sungai," ujarnya.

Dayu Tri Suci menambahkan bahwa penataan ini merupakan komitmen besar Wali kota dan Wakil Wali kota Denpasar untuk menata sungai secara berkelanjutan. Tentunya secara berkelanjutan sungai di Kota Denpasar akan terus ditata secara keseluruhan dan bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.

"Tentunya hal ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan bertahap sehingga nantinya seluruh sungai yang melintasi Kota Denpasar dapat tertata rapi dan mampu memberi edukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai," jelasnya.

Sebelumnya, Pemkot Denpasar juga membuat proyek Taman Lansia di kawasan Dam Oongan yang diberi nama Taman Lila Ulangun dan Taman di kawasan Tukad Badung, Banjar Buagan. (feb/yor)



Bupati Target 100 Km Jalan Terhotmix di Kintamani

● 60% Anggaran Dialokasikan untuk Perbaikan Jalan

BANGLI, TRIBUN BALI - Program hotmix masih menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR Perkim) tahun 2020. Program andalan bupati Bangli itu bahkan dialokasikan 60 persen lebih dari total anggaran kegiatan.

Kepala Dinas PUPR Perkim Bangli, I Wayan Suastika, Kamis (9/1) menjelaskan, anggaran kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Regular, serta DAK Penugasan. Untuk DAK Regular, dari total anggaran Rp 26 miliar digunakan untuk kegiatan di tiga bidang. Yakni bidang cipta karya, bina marga, dan Perkim.

"Demikian pula dengan anggaran yang bersumber dari DAK Penugasan. Dari total anggaran sebesar Rp 19 miliar, juga digunakan untuk tiga bidang tersebut," ucapnya didampingi Sekdis PUPR Perkim Bangli, I Made Soma.

Suastika membenarkan jika sebagian besar dari total anggaran tersebut, dialokasikan untuk bidang bina marga. Seperti dana yang bersumber dari DAK Regular, Suastika mengatakan, Rp 21 miliar di antaranya untuk kegiatan peningkatan jalan dan hotmix. Sedangkan pada DAK Penugasan, jumlah anggaran yang dialokasikan ke bidang bina marga sebesar Rp 9 miliar. "Artinya 60 persen lebih dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan di bidang bina marga," katanya.

Suastika menyebut, alasan lebih banyak anggaran dialokasikan pada bidang bina marga, lantaran masih banyak jalan yang belum mendapat penanganan. Seperti di Kintamani, hampir 200 kilometer ruas jalan belum terhotmix. "Dengan total anggaran Rp 30 miliar di bidang bina marga, otomatis ada 100 kilometer ruas jalan yang terhotmix. DAK ini difokuskan bagi jalan lintas kota, dalam hal ini kita perlebar jalan yang ada di wilayah Tenten, Kintamani - Glagah Linggah - Lembean - Langgahan karena tembus ke wilayah Gianyar," ucapnya.



TRIBUN BALI/FREDY MERCURI

I WAYAN SUASTIKA

Dikatakan pula, tahun 2020 pihaknya akan mulai memperbaiki tanggul Munduk Bebenan di wilayah Banjar Tegallalang, Kelurahan Kawan. Jebolnya tanggul akibat hujan deras pada Maret 2019 lalu itu, mengakibatkan 100 hektar lebih lahan pertanian di Subak Gede Tampa Anggaran mengalami kekeringan. Untuk perbaikan tanggul, Suastika menyebut anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3 miliar.

Selain itu, pihaknya juga akan menyelesaikan dua pembangunan jembatan yang nunggak. Di antaranya Jembatan Belancan-Bukih, serta Jembatan Metra-Kedui. Total anggaran yang diplot untuk penyelesaian dua jembatan ini sebesar Rp 6 miliar.

"Untuk Jembatan Metra - Kedui anggarannya sebesar Rp 4 miliar lebih. Sesuai laporan, kegiatan ini baru selesai 50 persen. Sedangkan Jembatan Belancan - Bukih, anggarannya sebesar Rp 2 miliar lebih, dengan total kekurangan pembangunan 20 persen. Anggaran ini bersumber dari DAU. Untuk pelaksanaan, nantinya akan didahului dengan pengecekan ulang ke lapangan, jika hasilnya ada kerusakan bisa saja anggaran tersebut bertambah," jelasnya. (mer)

Edisi : Jumat, 10 Januari 2020

Hal : 4



Tabanan Anggarkan Rp 5 M untuk Rehabilitasi Subak

● Ada Sembilan Proyek di Tujuh Kecamatan

TABANAN, TRIBUN BALI - Pemkab Tabanan mendapat kucuran dana Rp 5 miliar lebih dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran tersebut sesuai usulan perbaikan saluran irigasi sebanyak sembilan paket di tujuh kecamatan untuk menjangkau area subak seluas 800 hektare lebih. Namun saat ini prosesnya belum rampung karena menunggu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari DPRD Tabanan.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Tabanan, sembilan paket tersebut tersebar di tujuh kecamatan. "Usulannya ke pusat melalui DAK ada sembilan paket kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi. Sebelumnya sudah diusulkan tahun 2019 ke kami di PUPRPKP Tabanan," ujar Kabid SDA Dinas PUPRPKP Tabanan, Ni Ketut Sri Artini, Kamis (9/1).

Artini melanjutkan, usulan

PAKET PERBAIKAN Irigasi 2020

- Irigasi Wanagiri 35 hektare dan Yeh Bakung 22 hektare di Selemadeg Barat
- Irigasi Puyungan 64 hektare dan Dangin 90 hektare di Pupuan
- Irigasi Yeh Matan 368 hektare di Selemadeg Timur
- Irigasi Senapahan 90 hektare di Kediri
- Irigasi Sasih 60 hektare di Marga
- Irigasi Merta II 66 hektare di Penebel
- Irigasi Apuan 27 hektare di Baturiti

perbaikan ini sesuai dengan usulan perbaikan atau rehabilitasi dari wilayah yang mengajukan proposal perbaikan ke PUPRPKP. Kerusakan terjadi karena berbagai faktor dan sebagian besar dari bencana alam.

Setelah diusulkan, kata dia, akan segera terealisasi karena tinggal menunggu proses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari DPRD Tabanan. Namun usulan untuk perbaikan jaringan irigasi tak hanya ke pusat, melainkan juga diusul-

kan ke APBD Tabanan.

"Intinya sudah pasti terealisasi di tahun 2020 tetapi masih menunggu DPA dari DPRD Tabanan. Tapi untuk usulan ke APBD Tabanan masih belum bisa dipastikan karena masih proses," katanya. (mpa)



Pawai Jadi "Highlight" PKB XLII

Disebut Peed Agung, Anggarannya Rp2 Miliar

DINAS Kebudayaan Provinsi Bali menyadari pentingnya tata kelola pawai sebagai *highlight* atau pusat perhatian dalam ajang Pesta Kesenian Bali (PKB). Apalagi, keseluruhan pelaksanaan PKB dalam sebulan juga tergambar dalam pawai yang kini diberi nama *peed agung* itu. Sayangnya, kabupaten/kota selama ini belum maksimal mendanai kontingen pawainya.

"Padahal, ruang dan *event* pawai itu menjadi perhatian seluruh dunia. Ada tamu penting termasuk Presiden RI, duta besar, konsulat hadir. Perhatian media juga ada di sana, dan ribuan masyarakat Bali juga menyaksikan itu," ujar Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Wayan "Kun" Adnyana saat membuka *Workshop* Aplikasi Tema PKB XLII Tahun 2020 "Atma Kerthi: Penyucian Jiwa Paripurna" Dalam Karya Seni di Gedung Citta Kelangen ISI Denpasar, Kamis (30/1) kemarin.

Mulai PKB XLII tahun ini, Kun memastikan pawai tidak hanya berjalan akurat dari sisi waktu dan disiplin menerjemahkan tema, tetapi juga disokong pendanaan dengan skema penciptaan seni. Dalam hal ini, Pemprov Bali berkontribusi mendanai kabupaten/kota melalui hadiah uang tunai senilai total Rp225 juta. Secara keseluruhan, untuk pelaksa-

naan pawai saja dianggarkan hingga Rp2 miliar lebih. Harapannya, pawai dapat dikelola secara baik dan rapi serta digarap dengan serius. Setiap kontingen harus dipastikan tampil dalam kondisi prima dari segi kualitas artistiknya.

"Kami memiliki *platform* skema pendanaan dengan hadiah uang tunai untuk kompetisi penciptaan seni atas tiga kategori materi *peed agung* yakni garapan lambang daerah kabupaten/kota, koreografi tema 'Atma Kerthi', dan koreografi tematik khas kabupaten/kota," jelasnya.

Terkait koreografi tema "Atma Kerthi", lanjut Kun, di dalamnya ada *ogoh-ogoh* sesuai tema. Seperti *ogoh-ogoh* berwujud Dharmawangsa dengan anjingnya, *ogoh-ogoh* Lubdaka, *ogoh-ogoh* Bhima Swarga, *ogoh-ogoh* Manuk Dewata dan lainnya. Sedangkan koreografi khas kabupaten/kota berkaitan dengan potensi keunikan seni

budaya masing-masing kabupaten/kota.

"Tiap materi ini akan dipilih 9 terbaik yang kemudian berkewajiban untuk menjadi kontingen masing-masing kabupaten/kota, sehingga akan memicu kreativitas karena *platform*-nya kompetisi, terus gagasan-gagasan baru namun tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal dan juga tradisi seni budaya Bali," paparnya.

Menurut Kun, kabupaten/kota hanya bertugas mengumpulkan minimal tiga proposal untuk masing-masing kategori *peed agung*. Setelah itu, tim kurator di provinsi akan menyeleksi yang terbaik. Setelah ditentukan pemenang, panitia pawai akan mengambil alih untuk melakukan pembinaan ke lapangan.

"Di lapangan juga kita arahan, terus diskusikan bersama untuk memunculkan peluang-peluang realisasi artistik yang bagus dan kemudian tidak

overlapping antarkabupaten/kota. Jadi semua memiliki kekhasan masing-masing," tandasnya.

Rektor ISI Denpasar I Gede Arya Sugiarta mengatakan, tema "Atma Kerthi" dalam pawai PKB dapat diaktualisasikan lewat dekorasi areal Bajra Sandi dan panggung kehormatan dominan berwarna putih, merah, dan hitam. Kemudian ada *penjor sad kertih*, serta memainkan tiga gamelan yakni Gong Gede, Semara Pagulingan dan Jegog secara bergiliran. Gamelan ini untuk memberi nuansa keagungan, kelembutan, dan keceriaan dalam menyambut PKB XLII. Sebagai pembuka pawai, dapat ditampilkan hasil rekonstruksi Legong Sad Kertih. Tak ketinggalan, koreografi tema "Atma Kerthi" dan garapan tematik menggunakan properti ritual pengabenan yang dibawakan duta kabupaten/kota se-Bali. "Kalau tema itu bisa dilihat misalnya dari cerita, gerak-gerak tari, alunan musik, komposisi musikal dan dari warna juga bisa mengesankan tema," ujarnya. (rin)



Polda Obok-obok RSUD Mangusada

★ **Terkait Dugaan Pemotongan Uang Jasa Pelayanan Dokter**

DENPASAR, NusaBali

RSUD Mangusada di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung dihantam isu pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dokter yang diduga dilakukan pihak manajemen sejak tahun 2014. Bahkan, Subdit III Dit Reskrimsus Polda Bali sudah turun melakukan penyelidikan dengan mengamankan 5 dus dokumen, soft copy dokumen, serta memeriksa jajaran Direksi, Badan Pengawas,

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Polda Obok-obok RSUD Mangusada

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

hingga Direktur Umum RSUD Mangusada.

Borok RSUD Mangusada ini terungkap setelah sejumlah dokter dipanggil penyidik Subdit III Tipikor Polda Bali, untuk menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan beberapa dokter yang dilakukan periode Desember 2019 hingga Januari 2020 ini, penyidik kepolisian yang dikomando Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda Bali, AKBP Ida Bagus Putu Wedana Jati, melakukan klarifikasi terkait dugaan pemotongan dan hak yang diterima dokter.

"Dari sinilah diketahui bahwa ada potongan dari pihak manajemen rumah sakit terhadap jasa pelayanan dokter," jelas sumber NusaBali di lingkungan RSUD Mangusada, Kamis (30/1).

Sumber tersebut menyebutkan, selama ini dokter selalu mempercayakan seluruh hak yang diterimanya kepada manajemen rumah sakit. Disebutkan, untuk dokter di RSUD Mangusada yang berjumlah 106 orang, ada beberapa tunjangan lain yang diterima di luar gaji pokok setiap bulan. Di antaranya, jasa umum, jasa dari

BPJS, dan jasa dari Kartu Badung Sehat (KBS).

"Jadi, uang jasa pelayanan inilah yang diduga dipotong oleh manajemen, baru kemudian ditransfer ke rekening dokter. Untuk besarnya tiap bulan, bervariasi dan acak. Selama ini, dokter hanya menerima pemberitahuan melalui transfer dan tidak menerima rincian jasa pelayanan yang diterima," terangnya.

Setelah kasus ini bergulir, beberapa dokter RSUD Mangusada sempat menanyakan rincian uang jasa pelayanan yang diterimanya. Namun, lagi-lagi pihak manajemen tidak memberikannya dengan alasan semua hak dokter sudah ditransfer. "Jadi, ini perbuatan yang terstruktur, masif, dan kronis," tegas sumber yang enggan disebut namanya ini.

Dia menyebutkan, dari potongan jasa pelayanan 106 dokter yang bertugas di RSUD Mangusada, pihak manajemen mengantongi sekitar Rp 1 miliar per bulan. Terkait aliran uang tersebut, dia enggan menyebutkan dan minta wartawan menelusurinya ke pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan.

Sementara itu, informasi lain-

nya menyebutkan, penyidik Subdit III Dit Reskrimsus Polda Bali sudah melakukan penyitaan 5 dus dokumen dan soft copy dokumen dari RSUD Mangusada. Selain itu, jajaran Direksi mulai Direktur Utama hingga Dewan Pengawas RSUD Mangusada juga sudah diperiksa terkait kasus ini.

Bahkan, mantan Dirut RSUD Mangusada dr I Nyoman Gunarta dan Dirut RSUD Mangusada saat ini, dr I Ketut Japa, juga disebutkan sudah diperiksa penyidik Polda Bali. "Sudah ada lebih dari 10 dokter dan Direksi RSUD Mangusada yang diperiksa. Kemarin (Selasa, Red) juga ada yang diperiksa," jelas sumber NusaBali di kepolisian.

Sementara itu, Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda Bali, AKBP Ida Bagus Putu Wedana Jati, tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi NusaBali via telepon dan WhatsApp, Kamis kemarin.

Sedangkan Kabid Pengendalian dan Operasional RSUD Mangusada, dr Arya Widiana Pasek, membenarkan adanya laporan di Polda Bali terkait dugaan pemotongan jasa pelayanan dokter. Menurut dr Arya Widiana, sejak awal dilakukan pemeriksaan,

September 2019 lalu, manajemen RSUD Mangusada sangat terbuka dalam memfasilitasi proses yang dilakukan pihak kepolisian. "Polisi meminta data, kami berikan 5 dus dokumen hard copy dan soft copy," jelas dr Arya Widiana saat dikonfirmasi terpisah kemarin.

Terkait dugaan pemotongan jasa pelayanan dokter RSUD Mangusada seperti yang dilaporkan, dr Arya Widiana enggan berkomentar. Dia menyerahkan seluruh proses kepada kepolisian.

"Kalau pemotongan yang dimaksud suka dan duka, memang ada. Itu berdasarkan kesepakatan pegawai tertanggal 23 Desember 2014 untuk kegiatan suka duka memberikan santunan pernikahan dan kematian. Uangnya diambilkan dari jasa pelayanan dan keuntungan kantin. Setiap mendapat jasa pelayanan, dipotong Rp 1.500," bebernya.

Menurut dr Arya Widiana, RSUD Mangusada rencananya akan mengadakan rapat bersama manajemen, dokter, dan staf, Jumat (31/1) ini. "Pertemuan membahas sistem remunerasi, saya juga ingin tahu apa yang diinginkan, bisa dicarikan titik temu," tandas dr Arya Widiana. **rez**



Proyek Pasar Banyuasri Capai 11 Persen

SINGARAJA, NusaBali

Proyek Pasar Banyuasri, di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, sejak dikerjakan Desember 2019 lalu, telah mencapai 11 persen. Angka tersebut melebihi proses yang ditetapkan sebesar 7 persen. Pencapaian itu diketahui dalam rapat evaluasi pekerjaan revitalisasi Pasar Banyuasri, Kamis (30/1) di Kantor Bupati Buleleng, Jalan Pahlawan Singaraja. Rapat evaluasi dipimpin Asisten Bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Buleleng, I Putu Karuna, dihadiri Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), I Putu Adipta Ekaputra dan beberapa Pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng.

Dalam rapat, sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pekerjaan proyek Pasar Banyuasri. Sehingga progres yang dicapai melebihi target. Pekerjaan itu meliputi pembongkaran bangunan lama, penataan areal hingga penanaman paku bumi sebanyak 900 titik. "Target yang dicapai sudah melebihi sekitar 3 persen. Dengan progres dan tidak ada kendala yang berat seperti

bencana, kita yakin pekerjaan bisa selesai tepat waktu," kata Asisten Karuna.

Sementara, Plt Kadis PUPR, Adipta Ekaputra mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan secara rutin terhadap pembangunan Pasar Banyuasri. Menurutnya, sejauh ini pihak rekanan dari PT Tunas Jaya Sanur sudah bekerja secara profesional. "Ini artinya kontraktor bagus cara kerjanya, selain itu, pekerjaannya didukung peralatan canggih dan terbaru, sehingga pengerjaan bisa tepat waktu, tepat mutu dan biaya," ujarnya.

Selain menyangkut capai, rapat evaluasi juga membahas beberapa agenda seperti pengurusan izin yang terkait pembangunan Pasar Banyuasri dan persiapan anggaran untuk peresmian Pasar Rakyat Banyuasri pada akhir pekerjaan. Pekerjaan Pasar Banyuasri ditarget rampung Desember 2020.

Dalam pertemuan itu, Asisten Karuna meminta agar seluruh perizinan yang diperlukan segera diurus. Pihaknya tidak ingin ada persoalan di kemudian hari

terkait dengan pembangunan Pasar Banyuasri. Pembangunan Pasar Banyuasri, mulai dikerjakan 27 Desember 2019, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana. Pasar Banyuasri dirancang menjadi pusat *city tour* di Kota Buleleng, yang mampu beraktivitas 24 jam.

Pembangunan Pasar Banyuasri menjadi mega proyek kedua, karena biaya yang dihabiskan cukup tinggi untuk ukuran Buleleng sebesar Rp 159,6 miliar. Pasar Banyuasri memiliki luas masing-masing lantai pertama seluas 6.349,5 meter persegi, dengan jumlah los basah sebanyak 200 unit dan los kering 352 unit. Lantai kedua seluas 6.174 meter persegi dengan jumlah los sebanyak 244 unit dan kios sejumlah 184 unit. Sedangkan lantai tiga seluas 6.174 meter persegi dengan jumlah kios kuliner sejumlah delapan unit dan parkir yang mampu memuat 136 unit mobil. Sehingga total luas lantai bangunan utama adalah 18.697,5 meter persegi. **k19**



Dugaan Pungli Jaspel Memanas

- Diduga Terjadi 2014-2019, Polda Sudah Menyelidiki
- Manajemen RSD Mangusada Mengaku Siap Buka-Bukaan

DENPASAR, Radar Bali - RSD Mangusada di Kapal, Mengwi, Badung yang terlihat megah dari luar ternyata menyimpan gejolak di dalamnya. Para dokter di rumah sakit pelat merah itu gaduh lantaran uang tunjangan jasa pelayanan (jaspel) diduga "disunat" alias dipungut liar (dipungli) manajemen

► Baca **Dugaan...** Hal 7



ADRIAN SUWANTO / RADAR BALI

DIPERTANYAKAN : Suasana halaman ruang dokter RSD Mangusada di Kapal, Mengwi, Badung. Uang tunjangan jasa pelayanan dokter kini jadi sorotan.

KEGADUHAN DUGAAN PUNGLI JASPEL

- **Pungutan** : Pungutan dilakukan 2014 hingga 2019.
- **Pola Pembayaran Jaspel** : Jaspel diberikan dengan cara ditransfer melalui rekening, menurut keterangan sumber, tidak ada faktur rinciannya, tidak ada penjelasan detail.
- **Tidak Tahu** : Salah seorang sumber dokter mengatakan bahwa baru mengetahui jaspelnya dipotong setelah dipanggil penyidik Polda Bali.
- **Disebut Sudah Sepakat** : Menurut Kabid Pengendalian dan Operasional RSD Badung, dr. Arya Widiana Pasek, memang ada pemotongan dilakukan

pihak manajemen atas dasar kesepakatan dengan pegawai dan manajemen sejak 23 Desember 2014 untuk dana suka-duka.



bersambung ke hal 7 ...

GRAFIS : GT DEWANTARA / RADAR BALI



Disebut Sudah Sesuai Kesepakatan Pegawai dan Manajemen

■ DUGAAN...

Sambungan dari hal 1

Sumber yang dirangkum Jawa Pos Radar Bali menyebutkan, tidak hanya satu dua atau dokter yang menjadi korban pemotongan jaspel. Tetapi seratusan dokter. "Ada 106 dokter di RSD Mangusada. Hampir separonya dokter spesialis. Hampir semuanya mengalami pemotongan jaspel," ujar sumber koran ini kemarin (30/1).

Lebih lanjut dijelaskan sumber, ada tiga jaspel yang diduga dipotong manajemen. Yakni jaspel yang bersumber dari pasien BPJS, pasien umum, dan pengguna Kartu Badung Sehat (KBS). Yang menarik, sumber koran ini menyebut para dokter tersebut baru mengetahui jaspelnya dipotong setelah

... sambungan dari hal 1

■ Penyelidikan Polda :

Penyidik Polda Bali sudah meminta dokumen terkait dugaan jaspel ini September 2019 lalu.

dipanggil penyidik Polda Bali. Pemanggilan penyidik dilakukan akhir tahun lalu bertempat di Polres Badung. Para dokter yang diperiksa penyidik kaget luar biasa setelah penyidik Polda tanya tentang pemotongan jaspel.

Sebab, selama ini pihak manajemen tidak pernah memberikan rincian jaspel pada para dokter. "Jaspel diberikan dengan cara ditransfer melalui rekening. Kami hanya menerima secara global. Tidak

■ Siap Blak-Blakan :

Pihak RSD Badung melalui Kabid Pengendalian dan Operasional dr. Arya Widiana Pasek mengaku siap buka-bukaan dan kooperatif terhadap proses penyelidikan polisi.

GRAFIS : GT DEWANTARA / RADAR BALI

pernah ada faktur rinciannya. Setiap kami tanya rincian tidak pernah mendapat penjelasan detail," imbuh sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak dikorbankan itu.

Kabarnya, pemotongan tunjangan ini sudah terjadi sejak 2014 lalu hingga 2019. Para dokter pun mengalami kerugian hingga miliaran. Dugaan praktik pemotongan itu dilakukan secara acak.

Artinya, pemotongan setiap dokter berbeda-beda. Mereka

tidak mengetahui jaspelnya dipotong karena selama ini selalu memercayakan seluruh hak yang diterimanya kepada manajemen rumah sakit.

"Jadi, uang jasa pelayanan inilah yang diduga dipotong, setelah itu baru ditransfer ke rekening dokter. Untuk besarnya tiap bulan bervariasi dan acak," lanjut sumber tersebut.

Setelah kasus ini bergulir beberapa dokter sempat menanyakan rincian uang jasa pelayanan yang diterima. Namun lagi-lagi pihak manajemen tidak memberikan dengan alasan semua hak dokter sudah ditransfer. "Kami menilai perbuatan ini terstruktur, masif, dan kronis. Mainnya kasar dan tega banget. Kami kerja lembur me-

layani pasien, tapi hak kami dipotong," tukas sumber.

Informasi lainnya menyebutkan penyidik Subdit III Dit Reskrimsus Polda Bali sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dokter terkait dugaan pemotongan jasa pelayanan ini. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pejabat di lingkungan RSD Mangusada.

Enggan Berkomentar

Sementara itu, Kabid Pengendalian dan Operasional dr. Arya Widiana Pasek yang dikonfirmasi tak menampik jika ada laporan dari masyarakat tentang pemotongan jaspel. Namun, pihaknya tidak bisa mengomentari materi laporan karena hal itu menjadi ranah polisi.

Penyidik Polda Bali sudah meminta dokumen terkait dugaan jaspel ini pada September 2019 lalu. "Intinya, kami dari manajemen sangat terbuka memfasilitasi semua proses

di kepolisian. Polisi meminta data kami berikan. Sekitar lima dus dokumen *hard copy* dan *soft copy* kami serahkan," jelas Arya.

Ditanya apakah benar kabar "penyunatan" jaspel, Arya mengatakan tidak bisa mengomentari benar atau salah. Dia menyebut benar dan salah sudah jadi kewenangan melakukan proses penyelidikan.

Menurut Arya, ada pemotongan jaspel tapi pemotongan yang dilakukan manajemen berdasar kesepakatan dengan pegawai dan manajemen. "Memang ada pemotongan jaspel. Tetapi itu digunakan untuk suka dan duka. Dan, itu berdasar kesepakatan pegawai tertanggal 23 Desember 2014," jelasnya.

Ditambahkan, untuk kegiatan suka duka misalnya memberikan santunan menikah dan kematian pada pegawai dan keluarganya. Setiap mendapat jaspel dipotong Rp 1.500.

Saat ditanya, apakah pemotongan yang terjadi di luar kesepakatan, Arya kembali mengaku tidak bisa mengomentari hal itu, karena semua sudah diserahkan ke Polda Bali. "Pemotongan (jaspel) selain yang berdasar kesepakatan kami tidak bisa mengklarifikasi. Saya tidak tahu ada atau tidak pemotongan di luar kesepakatan pegawai. Kami tidak ada memotong jaspel selain yang sudah disepakati," tuturnya.

Dia kembali menyerahkan proses hukuma pada polisi. Dari awal proses direktur utama rumah sakit sudah menginstruksikan membantu proses hukuma. Ditanya apakah ada protes langsung dari para dokter, Arya mengatakan belum ada. "Besok (hari ini) ada pertemuan membahas sistem remunerasi. Saya juga ingin tahu apa yang diinginkan, sehingga bisa dicarikan titik temu," pungkasnya. (san/pit)



Kendaraan Dinas Terbengkalai di Gudang Aset

Teronggok Ditengah Semak dan Tumbuhan Liar

MANGUPURA, Radar Bali—Ada pemandangan tidak sedap di gudang aset tepatnya di dekat BPD Bali cabang Puspem Badung. Peralnya ada sejumlah kendaraan dinas milik Pemkab Badung mangkrak alias tidak terpakai. Mirisnya, mobil dinas yang sebenarnya masih memiliki nilai jual ini dibiarkan begitu saja dan tanaman mulai tumbuh di sekitar mobil tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Badung, I Wayan Sandra, yang secara tidak sengaja melihat kondisi kendaraan dinas tersebut. Ia pun kaget melihat ada sejumlah mobil dinas yang mangkrak dan belum dilakukan pelelangan. Bahkan dalam rapat dengar pendapat dengan eksekutif, masalah ini juga sempat disampaikan. "Seingat saya, sudah setahun yang lalu saya

ingatkan kepada bagian yang menangani aset, agar segera dilakukan penghapusan dan pelelangan," terang Sandra, Kamis (30/1).

Begitu juga Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata mengaku sudah mendapatkan laporan dari anggota komisi mengenai

keberadaan kendaraan-kendaraan dinas tersebut. "Segera kita akan cek dengan memanggil OPD yang menangani masalah aset," tegas Alit Yandinata.

Pihaknya berharap, aset-aset yang sudah tak terpakai segera dilakukan penghapusan dan pelelangan, agar tidak menam-

bah beban anggaran. Kalau pun masih menunggu proses lelang, aset-aset tersebut seharusnya ditempatkan pada lokasi yang layak. "Kalau dibiarkan terbengkalai, kena panas, hujan tentu nilai aset tersebut akan turun. Letakkan pada tempat yang terlindung," terang politisi PDIP Badung ini.

Secara terpisah, Kepala BPKAD Kabupaten Badung, I Ketut Gede Suyasa membenarkan adanya beberapa kendaraan dinas tak terpakai yang terparkir di halaman gudang milik BPKAD di kawasan Puspem Badung. Pihaknya masih menunggu jadwal lelang dari KPKNL. "Nanti akan dilelang. Kami menunggu jadwal dari KPKNL," jelasnya dikonfirmasi terpisah, kemarin.

Disinggung berapa kendaraan yang rencananya diajukan ke KPKNL, pihaknya

mengaku tak hafal. "Saya ndak hafal. Coba nanti dicek ya, saya masih rapat dengan Pak Sekda," pungkasnya. (dwi/rid)



Sekda Dalami Laporan Kasus UP

MASIH terkait dugaan pungli, yakni dugaan pemotongan insentif atau yang lebih dikenal dengan Upah Pungut (UP) di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bali, juga diselidiki ▶ **Baca Sekda... Hal 7**

Dewan Minta Telusuri, Beri Sanksi Tegas

■ SEKDA...

Sambungan dari hal 1

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami kasus dugaan pungli ini dengan menurunkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

"Mulai hari ini kami menurunkan inspektorat untuk melakukan pendalaman dan pemeriksaan serta mengetahui duduk persoalan terkait dengan informasi yang dimuat media," ujarnya.

Dia berharap dalam waktu dekat Inspektorat dapat merampungkan pemeriksaan

dan hasilnya nanti akan dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan tindakan selanjutnya. "Selaku Sekda, saya menunggu hasil pendalaman dan pemeriksaan yang dilakukan inspektorat," tambahnya.

Dewa Indra juga menyampaikan terima kasih kepada media yang telah menginformasikan hal ini. Informasi ini, ujar Dewa Indra, akan menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Menurut pria asal Buleleng ini, sejatinya upaya menuju ke arah itu terus dilakukan Pemprov Bali. Dalam tata kelola keuangan, saat ini Pemprov

Bali telah menerapkan transaksi pembayaran non tunai.

Transaksi non tunai diterapkan pada seluruh pembayaran. Yakni untuk gaji, honor, uang perjalanan hingga insentif. "Dengan sistem ini, kecil kemungkinan terjadinya pungli karena uang langsung masuk ke rekening yang berhak menerima tanpa dikurangi sepeser pun. Tapi bagaimanapun, kami tetap akan terus mendalami informasi ini," pungkasnya, seraya menegaskan hasil investigasi dari inspektorat akan dilaporkan ke pimpinan.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Bali, I Made Rai Warsa mengatakan jangan sampai

kejadian ini diikuti oleh PNS yang lain. Dia meminta Pemprov Bali menelusuri lebih jauh kebenarannya. Kalau *clue*-nya upah pungut berarti Badan Pendapatan, cetusnya.

"Saya belum tahu kebenaran harus telusuri. Apakah benar terjadi. Kalau benar terjadi, sekda pimpinan ya harus tegas. Termasuk pimpinan OPD. Jangan biarkan ruang seperti itu. Kalau memberikan ruang muncul kasus serupa," ucap wakil rakyat asal Gianyar ini.

Menurutnya, sudah terbukti harus diberikan sanksi tegas bila perlu bisa pemecatan. Harus diberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku. **(feb/pit)**

Edisi : _____

Hal : _____



Retribusi Naik 100% Tanpa Sosialisasi

■ Pedagang di Pasar Petang Mengeluh

■ PD Pasar Dinilai Tak Berpihak ke UMKM

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Pedagang di Pasar Petang keberatan dengan beban iuran yang naik melebihi 100 persen. Sebelumnya, setiap pedagang hanya dikenakan Rp 7.000 per hari dan dipungut setiap tiga hari sekali. Namun kini mereka dikenakan iuran sebesar Rp 450 ribu dengan dipungut setiap bulan sekali.

Tentu mereka kaget, sebab kenaikan itu belum ada sosialisasi. Kebijakan ini diterapkan begitu saja dengan alasan sudah diputuskan oleh pihak direksi. Tak pelak pedagang merasa terbebani. Artinya mereka terbebani sebesar Rp 15 ribu per hari.

Anggota DPRD Badung Dapil Petang, Nyoman Suka menilai, lonjakan iuran tersebut sangat tidak masuk akal di tengah lesunya situasi pasar. Ia tidak mengerti alasan mengapa iuran yang kini meningkat secara drastis.

"Sudah mendapat informasi dari pedagang seperti itu (adanya kenaikan iuran di pasar). Saya tidak mengerti, kok bisa naik seperti ini," ujarnya, Kamis (30/1).

Kata Suka, kebijakan ini tanpa pernah disosialisasi sebelumnya. Ia mempertanyakan, keberpihakan PD Pasar terhadap krama khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Petang. "Semestinya direksi PD Pasar belum saatnya menaikkan iuran," katanya.

Ia menyarankan, semestinya direksi atau PD Pasar kreatif membuat kegiatan-kegiatan yang mampu mendatangkan pembeli ke Pasar

Apakah sengaja dikosongkan, tak ada yang berminat atau ada alasan lain?

Nyoman Suka
Anggota DPRD Badung

Petang. Jika pasar sudah ramai, pedagang dapat hasil penjualan lebih, baru kemudian menaikkan retribusi.

Tak hanya soal retribusi, Nyoman Suka juga mempertanyakan kebijakan relokasi pedagang di Pasar Petang. Di satu areal, ada sekitar 22 pedagang. Semua pedagang ini direlokasi selanjutnya areal ini dibangun dan menjadi 38 kios.

Ketika kios sudah jadi, pedagang lama tidak memperoleh prioritas dan kebanyakan saat ini dapat tempat berjualan di belakang. Pedagang berharap banyak yang memperoleh di depan di depan.

"Satu lagi, katanya, ada empat unit kios di depan sampai saat ini dikosongkan. Kami mempertanyakan empat kios ini. Apakah sengaja dikosongkan, tak ada yang berminat atau ada alasan lain," tanya Suka.

Dirut Perumda Pasar Mangu Giri Sedana, Made Sukantra membantah adanya kenaikan iuran pedagang Pasar Petang yang dinilai melebihi 100 persen. Kadia, saat ini, semua kewajiban pedagang digabung menjadi satu sehingga mencapai jumlah iuran sebesar Rp 450.000 setiap bulannya.

"Saat ini hanya ada tarikan kewajiban toilet sekitar Rp 2.000 per hari. Dengan iuran toilet ini, semua pedagang bebas memanfaatkan fasilitas ini," katanya. (gus)

Kena Biaya Lainnya

DULU katanya kewajiban pedagang tidak menyatu. Khusus iuran, para pedagang dikenakan Rp 7.000 per hari. Namun di luar itu, pedagang masih dikenakan sewa kios maupun los yang hitungannya per meter per segi, serta biaya-biaya lainnya.

"Sekarang ini kewajiban pedagang disatukan menjadi Rp 450.000 per bulan. Pedagang tak lagi memikirkan kewajiban sehingga bisa fokus berjualan," kata Dirut Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Made Sukantra.

Disinggung mengenai kios yang masih kosong di bagian depan, pihaknya mengatakan tempat tersebut masih bangunan baru. Hanya saja empat kios tersebut belum diserahkan kepada pengelola dalam hal ini PD Pasar. "Nantinya ketika sudah diserahkan, kios tersebut akan diumumkan kepada masyarakat dari pasti dilakukan secara transparan," pungkasnya. (gus)



Bupati Artha Resmikan Terminal Baru Senilai Rp 15 M



BUPATI I Putu Artha menandatangani prasasti saat meresmikan Terminal Negara di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Jembrana, Selasa (31/12).

NEGARA, NusaBali

Bupati Jembrana I Putu Artha meresmikan Terminal Negara di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Selasa (31/12). Bangunan terminal dengan konsep milenial minimalis perpaduan arsitektur Bali ini dibangun secara bertahap menggunakan dana APBD Jembrana mulai 2017 dengan total anggaran Rp 15 miliar lebih.

Peresmian Terminal Negara yang ditandai penandatanganan prasasti oleh Bupati Artha disaksikan Wabup Jembrana Made Kembang Hartawan, Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Dandim 1617/Jembrana Letkol Kav Djefri Marsono Hanok, dan perwakilan Forkopimda Jembrana. Hadir pula kepala Dinas Perhubungan se-Bali, para kepala OPD Pemkab Jembrana, pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan sejumlah sopir angkutan kota (angkot) maupun angkutan pedesaan (angdes).

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan (PKP) Jembrana I Made Dwi Maharimbawa, menyampaikan terminal ini dibangun dengan konsep milenial minimalis, tanpa melupakan unsur arsitektur Bali. "Desain terminal ini 5 sampai 10 tahun ke depan, masih akan cocok dengan zamannya," ujarnya.

Selain bangunan yang kekinian, kata Maharimbawa, terminal ini juga dilengkapi berbagai fasilitas. Selain ruang tunggu juga tersedia coffee shop di lantai dua yang dilengkapi railing sehingga bisa melihat ke lantai bawah, ruang laktasi (ruang menyusui), layanan informasi, dan wifi gratis. "Tidak hanya nyaman untuk penumpang yang akan naik angkutan umum. Tempat ini, juga bisa digunakan untuk tempat istirahat bagi pengendara mobil dan motor yang akan ke Jawa," ungkapnya.

Di belakangan terminal anyar ini tersedia areal terminal kargo yang bisa menampung 54 unit truk besar. Rencananya di 2020 ini di sisi timur juga akan dibangun los untuk pedagang.

Wabup Kembang menambahkan, dalam perencanaan fasilitas publik, pemerintah tidak hanya dituntut membangun fasilitas yang baik, namun perlu diimbangi sentuhan kekinian agar nyaman dikunjungi. Termasuk soal desain arsitektur maupun fasilitas di dalamnya.

Sementara Bupati Artha mengatakan, pembangunan terminal baru ini dikarenakan terminal lama sudah tidak representatif. Kemudian mempertimbangkan perkembangan kota dalam 5 hingga 10 tahun ke depan yang semakin meluas, sehingga membutuhkan lokasi terminal yang lebih baik. "Pembangunan terminal ini sudah melalui berbagai kajian dan pertimbangan sekitar lima tahun. Dan dari kajian tersebut, terpilihlah tempat terminal sekarang ini, yang lokasinya menurut kami yang terbaik dan sangat sesuai dengan perkembangan Kota Negara di masa yang akan datang," ujarnya.

Setelah peresmian ini, Bupati Artha meminta Dinas Perhubungan memaksimalkan fungsi terminal. Bus antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP), wajib masuk ke dalam Terminal Negara. Khusus AKAP, juga harus menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam terminal. Pasalnya, jika turun di jalan umum, ditakutkan akan menimbulkan kemacetan, karena ukuran bus AKAP sangat besar. "Selain itu, dengan turun di terminal, akan menggairahkan angkutan kota atau angkutan pedesaan, dokar atau ojek. Mereka juga akan kebagian rezeki dari terminal ini," tuturnya. **ode**



Desa Penglipuran Tunda Naikkan Tarif Kunjungan

Krama minta
Pekab Bangli tetap
memberlakukan
Perbup Nomor 47
Tahun 2014.

BANGLI, NusaBali

Pengelola Objek Wisata Desa Tradisional Penglipuran, Kelurahan Kubu, Bangli menunda menaikkan tarif kunjungan. Alasannya, fasilitas di objek wisata belum memadai sehingga dinilai belum pas memberlakukan kenaikan tarif. Semestinya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor

37 Tahun 2019 tentang kenaikan retribusi wisata rekreasi dan olahraga berlaku per 1 Januari 2020. Terkait penundaan ini, Bendesa Adat Penglipuran telah bersurat kepada Bupati Bangli.

Bendesa Adat Penglipuran I Wayan Supat mengungkapkan, kebijakan pemerintah menaikkan tarif retribusi membuat masyarakat adat selaku pemilik objek merasa resah. Menyikapi Perbup Nomor 37 tahun 2019, krama menggelar paruman di Balai Banjar Adat Penglipuran, Selasa (31/12). "Masyarakat kami selaku pemilik objek tidak pernah diajak koordinasi terkait kenaikan



• NUSABALI/EKA SRI

Bendesa Adat Penglipuran I Wayan Supat (kiri) bersama Pengelola Objek Wisata Desa Tradisional Penglipuran, I Nengah Moneng.

tarif. Kondisi ini menimbulkan keresahan di warga," ungkap Wayan Supat, Rabu (1/1).

Dalam paruman itu, krama menyatakan belum menerima kenaikan retribusi wisata

rekreasi dan olahraga sesuai Perbup Nomer 37 tahun 2019. Alasannya, sarana dan prasarana di Desa Penglipuran belum memadai. Kenaikan tarif harus dibarengi dengan pelayanan. Dicontohkan, sarana prasarana kepariwisataan yakni jalan masih rusak, toilet, dan parkir belum memadai. Hasil paruman, krama meminta Pekab Bangli tetap memberlakukan Perbup Nomer 47 Tahun 2014. "Mudah-mudahan keinginan krama bisa diakomodir," ujarnya.

Wayan Supat didampingi Pengelola Obyek Wisata Desa Tradisional Penglipuran, I Nengah Moneng, mengatakan tiket

masuk wisatawan mancanegara dewasa dari Rp 30 ribu menjadi Rp 50 ribu. Anak-anak asing Rp 25 ribu naik menjadi Rp 30 ribu. Domestik dewasa dari Rp 15 ribu naik menjadi Rp 25 ribu dan anak-anak dari Rp 10 ribu naik menjadi Rp 15 ribu. Retribusi parkir juga naik. Bus awalnya Rp 5 ribu naik menjadi Rp 10 ribu. Mini Bus awalnya Rp 3 ribu naik menjadi Rp 5 ribu, sedangkan untuk sepeda motor awalnya Rp 1000 naik menjadi Rp 2 ribu.

Bendesa Adat Penglipuran sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) Bangli bahwa

pengelola tidak akan mengambil tiket sesuai tarif baru. Buat sementara dibijaksanai, pengunjung masih dikenakan tarif lama. "Kami belum mengambil tiket yang baru, masih menunggu jawaban pemerintah atas surat yang kami kirimkan," tandasnya. Diakui, krama malu menaikkan retribusi sementara sarana prasarana penunjang objek belum memadai. Dikhawatirkan, wisatawan hanya sekali saja berkunjung akibat tarif mahal. Sayangnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangli I Wayan Adnyana belum bisa diminta keterangan. **esa**



Kasus Xpander Perbekel di Gianyar Mogok

"Kami tidak menemukan kerugian negara dalam pengadaan mobil ini,"

DENPASAR, NusaBali

Diam-diam, Dit Reskrimsus Polda Bali menghentikan penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan 63 mobil Mitsubishi Xpander untuk Perbekel di Gianyar. Disebutkan, penghenti-

an tersebut karena tidak ditemukan kerugian negara. "Sudah dihentikan karena tidak ditemukan kerugian negara," tegas Dir Reskrimsus Polda Bali, Kombes Yuliar Kus Nugroho singkat saat dihubungi Rabu (1/1).

Sementara itu, Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda Bali, AKBP Putu Wedana Jati yang dikonfirmasi membenarkan penghentian penyelidikan kasus pengadaan mobil Xpander untuk Perbekel di Gianyar. "Hasil penyelidikan kasus ini dihenti-

kan," tegas AKBP Wedana Jati via whatsapp, Rabu (1/1).

Dijelaskan, hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik tidak ditemukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil tersebut. Selain itu, pengadaan seluruh unit mobil sudah sesuai. "Kami tidak menemukan kerugian negara dalam pengadaan mobil ini," tegasnya tanpa menyebut kapan kasus ini dihentikan.

Kasus ini sempat menjadi heboh saat beberapa Perbekel di Gianyar diperiksa di Ma-

polda Bali terkait pengadaan mobil Mitsubishi Xpander untuk 63 Perbekel di Gianyar. Perbekel yang sudah sempat diperiksa diantaranya Ketua Forum Komunikasi Perbekel/Lurah (FKPL) Kabupaten Gianyar, Ketua II FKPL Gianyar, I Gede Purnadi Yoga yang merupakan Perbekel Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring dan Sekretaris FKPL Gianyar, I Made Junarta yang merupakan Perbekel Bukian, Kecamatan Payangan. Saat itu, penyidik masih mengumpul-

kan data-data terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan motor PCX dan mobil Xpander yang digunakan operasional pemerintah desa dan BPD di Gianyar.

Sebagaimana diberitakan, 63 mobil Xpander tersebut dibeli di dealer PT Bumen Redja Abadi, Denpasar, atas nama pemesan Ketua FKPL Gianyar I Gusti Nyoman Gede Susila, 10 Januari 2019. Susila mengaku selaku Ketua FKPL Gianyar, dirinya bukan terlibat dalam pengadaan mobil ini.

Dia mengaku hanya mengkoordinasikan dan menyosialisasikan terkait Perbup Gianyar tentang pengadaan mobil ini. "Pengadaan mobil ini kan di masing-masing desa. Hak dan kewenangannya pun di masing-masing desa. Yang jelas, saya bukan pembeli, hanya mewakili perbekel lain untuk memesan agar barang meyakinkan," jelasnya. **rez**

• IST
Dir Reskrimsus Polda Bali, Kombes Yuliar Kus Nugroho





Kasus Bansos Kicen Ditarget Tuntas 2020

Kapolres Klungkung Minta Unit Tipikor Secepatnya Selesaikan

SEMARAPURA, Radar Bali—Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Klungkung sedang melakukan lidik dan sidik terhadap sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap kasus tersebut pun telah keluar. Hanya saja, kasus tersebut belum berhasil diselesaikan di tahun 2019. Sehingga oleh Kapolres Klungkung AKBP I Komang Sudana, kasus tersebut ditargetkan tuntas di tahun 2020 ini.

Adapun salah satunya adalah kasus dugaan korupsi bantuan sosial kepada Kelompok Tani Ternak Babi Catur Bhuana Sari di dusun Anjingan, desa Getakan, Klungkung yang difasilitasi I Wayan Kicen Adnyana. Pada saat itu, Kicen Adnyana duduk sebagai anggota DPRD Klungkung yang kerap memfasilitasi hibah dan bansos di Kabupaten Klungkung.

"Terkait dengan beberapa tunggakan-tunggakan yang memang ada indikasi penyalahgunaan uang negara hasil temuan dari BPK yang secara resmi sudah dikeluarkan, itu yang akan kami tindak lanjuti untuk penyelesaiannya di tahun 2020 ini. Tentunya ada beberapa yang sudah sidik dan lidik yang memang masih proses untuk penyelesaiannya," ujar Kapolres

Kami belum menetapkan tersangka. Makanya, dari hasil itu seperti apa gelarnya, hasilnya apa, nanti kami sampaikan. Ya, secepatnyalah supaya selesai."

AKBP I Komang Sudana
Kapolres Klungkung

Klungkung AKBP I Komang Sudana, Rabu kemarin (1/1).

Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditargetkan tuntas di tahun 2020 tersebut, Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Mirza Gunawan yang dikonfirmasi terpisah hanya mau mengungkapkan salah satu kasus yang kini masih dalam penyelidikan pihaknya, yakni kasus dugaan korupsi bansos kepada kelompok ternak babi Catur Bhuana Sari di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Klungkung. Pihaknya membenarkan jika hasil audit dari BPK telah keluar hanya saja dia masih enggan membeberkan lebih lanjut seperti apa hasil audit BPK tersebut.

"Hasilnya sudah disampaikan oleh BPK. Cuma kan kami harus melalui gelar. Nanti akan kami gelarkan ke Polda. Kami belum menetapkan tersangka. Makanya, dari hasil itu seperti apa gelarnya, hasilnya apa, nanti kami sampaikan. Ya, secepatnyalah supaya selesai," jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya

mengungkapkan telah meminta keterangan parasaksi. Di antaranya Ketua Kelompok Tani Ternak Babi Catur Bhuana Sari Ni Putu Hemawati. Dalam keterangannya, dana bansos tersebut telah masuk ke rekening kelompok. Hanya saja uang tersebut tidak langsung dibelikan bibit babi, sehingga akhirnya menjadi temuan. "Selang beberapa lama, baru dibelikan karena katanya pada saat itu kemarau," terangnya.

Untuk diketahui, bansos yang diberikan kepada Kelompok Tani Ternak Babi Catur Bhuana Sari itu difasilitasi oleh I Wayan Kicen Adnyana yang pada saat itu duduk sebagai anggota DPRD Klungkung. Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00599/SP2D/BKT/2015 tanggal 21 April 2015, besaran bansos yang diberikan berkisar Rp 150 juta. Adapun Ketua Kelompok Ternak Babi Catur Bhuana Sari, Ni Putu Hemawati merupakan menantu Kicen.

Kasus dugaan korupsi itu sudah mencuat sejak tahun 2016 silam, bersamaan dengan kasus korupsi dana hibah pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Banjarangkan, Klungkung yang juga difasilitasi Kicen. Adapun pada 18 Maret 2016, Putu langsung mengembalikan dana bansos sebesar Rp 150 juta itu ke kas daerah. Meskipun sudah dilakukan pengembalian, kasus ini tetap bergulir dan mulai diselidiki tahun 2017 silam. (ayu/han)



Kasus Xpander untuk Perbekel se-Gianyar Disetop

DENPASAR, Radar Bali – Penyelidikan dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan mobil dinas merek Mitsubishi Xpander untuk para perbekel di Kabupaten Gianyar berakhir antiklimaks. Informasi yang didapat ini, penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali “memarkir” alias tidak melanjutkan kasus ini.

“Sudah lama dihentikan. Sepertinya penyidik polda saat pengumpulan data tidak menemukan cukup bukti. Berkasnya tidak ada masuk ke sini (Kejati Bali),” ujar sumber Jawa Pos Radar Bali

di Kejati Bali, kemarin (1/1).

Sumber koran ini menambahkan, penghentian tersebut karena tidak ditemukan kerugian negara. Sekadar diketahui, pengadaan 63 unit mobil Xpander tersebut dibeli di dealer PT Bumen Redja Abadi, Denpasar, atas nama pemesan Ketua FKPL Gianyar I Gusti Nyoman Gede Susila, 10 Januari 2019.

Sementara itu, Dir Reskrimsus Polda Bali, Kombes Yuliar Kus Nugroho saat dihubungi ternyata membenarkan penghentian penyelidikan kasus

ini. “Sudah dihentikan karena tidak ditemukan kerugian negara,” ujar Dir Reskrimsus Polda Bali, Kombes Yuliar Kus Nugroho kepada awak media, kemarin.

Hal senada diungkapkan Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda Bali, AKBP Putu Wedana Jati. Kepada awak media Wedana menyebutkan, penghentian penyelidikan kasus pengadaan mobil untuk Perbekel di Gianyar ini karena hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik tidak ditemukan tindak pi-

dana korupsi. Namun, pria dengan dua melati di pundak itu tidak menyebut kapan kasus ini dihentikan.

Sekadar mengingatkan, perbekel yang sempat diperiksa diantaranya Ketua Forum Komunikasi Perbekel/Lurah (FKPL) Kabupaten Gianyar, Ketua II FKPL Gianyar, I Gede Purnadi Yoga yang merupakan Perbekel Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring dan Sekretaris FKPL Gianyar, I Made Junarta yang merupakan Perbekel Bukian, Kecamatan Payangan. (san/yor)



☒ RADAR BALI ☐ TRIBUN BALI ☐ BALI POST ☐ NUSA BALI

☐ _____

LPD Unggahan Dibobol Oknum Pengurus

SINGARAJA, Radar Bali - Kasus LPD bermasalah semakin bertambah di *Bumi Panji Sakti*. Belum tuntas penanganan kasus korupsi LPD Gerokgak, kini muncul kasus dugaan korupsi oleh oknum pengurus LPD Unggahan, Seririt. Kasipidsus Kejari Buleleng Wayan Genip membenarkan pihak ini telah melakukan proses penyelidikan soal dugaan penyimpangan dana LPD unggahan.

"Mudah-mudahan tahun ini kasus bisa kami rampungkan," kata Genip saat dikonfirmasi kemarin (1/1). Dikatakan Genip kasus LPD Unggahan pihaknya menerima laporan sekitar bulan Agustus 2019 lalu dari masyarakat. Kemudian ramai kepemurkaan semenjak ada pergantian prajuru adat di Desa Unggahan. Dari sanalah mulai muncul temuan-temuan setelah dilakukan pengecekan keuangan LPD dan ditemukan sejumlah penyimpangan dana LPD.

Untuk modus penyimpangan dana LPD yang pihaknya temukan setelah dilakukan penyelidikan awal. Kata Genip yakni pembayaran cicilan dari nasabah LPD yang diterima oknum pengurus tidak disetorkan ke kas LPD. Tetapi uang nasabah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. "Di samping itu juga, ada pelunasan hutang di LPD lain. Namun ternyata tidak dilakukan oleh oknum pengurus. Dan (dana) digunakan oleh oknum pengurus," pungkasnya. (uli/gup)

Edisi : Kamis, 2 Januari 2020

Hal : 3



Habiskan Rp 15 Miliar, Terminal Negara Didesain Kekinian

● Dilengkapi Ruang Laktasi, WiFi, Hingga Coffee Shop

NEGARA, TRIBUN BALI - Memasuki tahun 2020, Jembrana akhirnya memiliki terminal baru yang terletak di kawasan Desa Baluk, Kecamatan Negara. Terminal dengan desain milenial yang menelan dana Rp 15 miliar itu, akhirnya diresmikan oleh Bupati Jembrana I Putu Artha, Selasa (31/12) lalu.

Terminal Negara ini merupakan terminal dengan konsep arsitektur perpaduan Bali yang milenial atau minimalis. Bahkan, disebut-sebut sebagai konsep yang pertama di Pulau Bali. Beragam fasilitas, mulai dari ruang laktasi, WiFi gratis, informasi center, sampai coffee shop bergaya urban di lantai II pun disajikan. Itu dilakukan supaya penumpang betah dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan.

Peresmian terminal baru ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Artha. Peresmian dihadiri Wabup Made Kembang Hartawan, Ketua DPRD Jembrana Sri Sutharmi, Dandim 1617 Letkol Kav Djefri Marsono Hanok, perwakilan Forkopimda Jembrana, Kepala Dinas Perhubungan se-Bali, Kepala OPD Pemkab Jembrana dan masyarakat Jembrana.

Bupati Artha menjelaskan, tuntutan fasilitas publik saat ini, bukan hanya membangun fasilitas yang baik. Namun perlu diimbangi sentuhan kekinian agar nyaman dikunjungi. Termasuk soal desain arsitektur maupun fasilitas di dalamnya. "Terminal nega-



ISTIMEWA

TERMINAL MINIMALIS - Terminal Negara di kawasan Desa Baluk, Kecamatan Negara, yang Selasa (31/12) lalu diresmikan, didesain minimalis.

ra ini tidak hanya urusan menaikkan dan menurunkan penumpang, tapi terminal yang menghadirkan sisi *experience* kepada masyarakat. Jadi banyak ruang terbuka dan fasilitas tambahan. Semoga bisa diminati," ucapnya, Selasa (31/12).

Artha mengaku, saat ini moda transportasi tidak hanya konvensional. Tapi juga online. Selain kendaraan pribadi yang jumlahnya makin banyak. Maka dari itu, untuk menjaga kelangsungan angkutan umum milik masyarakat lokal, seperti angkot dan angkutan pedesaan dibuat tempat nyaman ini. "Kalau pembangunan ini tujuannya ialah melihat terminal lama yang sudah tidak representatif. Pembangunan terminal ini sudah me-

lalui berbagai kajian dan pertimbangan kurang lebih 5 tahun. Dan dari kajian tersebut, terpilihlah tempat terminal sekarang ini," jelasnya.

Artha menegaskan, sesudah terminal ini diresmikan, kendaraan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) harus masuk di dalam Terminal Negara. Untuk AKAP agar menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam terminal. Sebab, saat menurunkan di jalan umum ditakutkan akan menimbulkan kemacetan. Karena ukuran bus AKAP sangat besar. Selain itu dengan turun di terminal, akan menggairahkan angkutan kota atau angkutan desa, dokar serta ojek. Mereka juga akan kebagian rejeki dari terminal ini.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan I Made Dwi Maharimbawa mengatakan, desain terminal yang dibangun dengan konsep milenial minimalis tidak melupakan unsur arsitektur Bali. Langit-langit bangunan yang menelan biaya Rp 15 miliar lebih itu dibangun dalam tiga tahap. Atap bangunan pun dibuat tinggi, difungsikan supaya sirkulasi udara pada terminal ini menjadi baik. Penumpang dan pengunjung tidak mengalami gerah, selama berada di terminal. "Di bagian atas dipasang kaca khusus agar cahaya matahari bisa leluasa masuk ke dalam ruangan," ucapnya Rabu (1/1).

Menurut dia, desain terminal ini bisa sesuai untuk perkembangan ar-

sitektur 5 hingga 10 tahun ke depan. Dan dipastikan masih akan cocok. Sebab, fasilitas ruang tunggu yang nyaman, coffee shop di lantai II, dan dilengkapi railing tersaji dalam terminal. Fungsi railing, supaya penumpang atau pengunjung, bisa melihat ke lantai bawah.

"Kami juga sediakan ruang menyusui (laktasi), meja informasi, dan Wifi gratis bagi pengunjung. Tidak hanya nyaman untuk penumpang yang akan naik angkutan umum, terkadang tempat ini digunakan pula untuk tempat istirahat bagi pengendara mobil dan motor yang akan ke Jawa," ungkapnya. Di 2020, ia menambahkan, di sisi Timur akan dibangun kios atau los pedagang terminal. (ang)



Dewan Minta Disdikpora Tanggung Jawab

■ Progam Seragam Gratis SD dan SMP di Badung Tak Tuntas

MANGUPURA, TRIBUN

BALI - Satu semester sudah mau habis. Namun pendistribusi seragam gratis untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Badung, belum juga tuntas. Pasalnya hingga di penghujung tahun, masih ada pendistribusian seragam sekolah yang tercercer.

Dewan mengaku menemukan siswa di Badung yang mengenakan seragam berbeda-beda. Hal itu diketahui saat Komisi IV DPRD Badung melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah.

Dengan adanya temuan itu, komisi IV pun mengaku telah melakukan pemanggilan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Badung guna meminta pertanggungjawaban atas program tersebut.

"Sudah kami panggil, Disdikpora pun mengakui masih ada yang tercercer (pendistribusian seragam). Kami sempat mengambil sampling ke sekolah-sekolah dari ujung Bali selatan ke utara ada kami temukan keterlambatan pakaian gratis belum diterima," ujar Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Made Sumerta, Rabu (1/1).

Ia mengatakan, dalam

kunjungan kerja tersebut, pihaknya banyak mendapatkan keluhan terkait pengadaan seragam gratis. Seperti ukuran yang tidak sesuai hingga ongkos menjarit. "Masak cowok dapat celana yang kedodoran seperti pakai rok," kata dia.

Politikus asal Pecatu, Kuta Selatan ini mengaku sangat kecewa melihat kondisi tersebut. Terlebih seragam gratis merupakan program prioritas Kabupaten Badung. "Jujur kami kecewa dan malu. Kami akan tandai rekanan yang memenangkan tender itu agar menjadi pertimbangan untuk program-program berikutnya," jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Badung, I Ketut Widia Astika menjelaskan kronologis terlambatnya program seragam gratis. Birokrat asal Kerobokan, Kuta Utara ini mengakui keterlambatan program seragam gratis terjadi sejak tender awal dilakukan.

"Pada bulan Mei baru ada ACC (penyetujuan) dan baru berproses pemenangnya bulan Agustus baru ada. mau-nya kami pas tahun ajaran baru sudah ada pakaian, namun beberapa dari pakaian seragam itu gagal lelang, sehingga terlambat lagi," je-

lasnya.

Ketut Widia Astika pun membantah jika ada sekolah yang telah menerima seragam gratis pada bulan Agustus. "Kalau ada di media sosial yang mengatakan sudah menerima bulan Agustus itu bohong, karena awal Agustus belum ada pemenang," tegasnya.

Ia menjelaskan, keterlambatan pengadaan barang oleh rekanan pemenang tender telah ditindaklanjuti dengan pengenaan denda. "Ada yang sampai bulan Desember masih terlambat, padahal 23 Desember harus sudah tuntas, jadi kami kenakan sanksi denda atau pinalti kepada rekanan," bebernya.

Widia Astika juga memaparkan, dalam program seragam gratis untuk sekolah swasta diberikan berupa dana. Pihak sekolah yang menerima bantuan akan membelikan seragam yang kualitasnya diseragamkan dengan sekolah negeri.

"Ukuran yang dalam bentuk jadi adalah sepatu dan pakaian olahraga, sisanya kain dan ongkos jahit dan swasta diberikan uang namun kualitasnya disesuaikan dengan sekolah negeri, sehingga negeri dan swasta sama seragamnya," katanya. (gus)



Penyidik Kejati Kumpulkan Bukti Baru

● Dugaan Gratifikasi Sertifikat Mantan Kepala BPN Denpasar

DENPASAR, TRIBUN BALI - Pasca menetapkan mantan Kepala Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Denpasar, Tri Nugraha (53), sebagai tersangka terkait perkara dugaan gratifikasi pesertifikatan di Denpasar, tim penyidik tindak pidana khusus (Pid-sus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali kini mengumpulkan alat bukti baru untuk memperkuat pembuktian. Demikian disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Bali I Nyoman Sucitrawan saat dikonfirmasi, Rabu (1/1).

"Saat ini kami sudah tahap satu, melimpahkan berkas ke penyidik. Kami sudah selesai memeriksa saksi-saksi. Intinya kami bergerak cepat," jelasnya.

Menurut mantan Kajari



TRIBUN BALI/ PUTU CANDRA

I NYOMAN SUCITRAWAN

Karangasem ini, pengumpulan alat bukti dan data yang dibutuhkan untuk menguatkan penahanan tersangka. Ini juga agar tidak ada celah sedikit pun yang dimanfaatkan tersangka untuk mengajukan praperadilan.

BERSAMBUNG HAL 7

Penyidik Kejati Kumpulkan...

Sucitrawan menyakini dengan bukti yang ada bisa membeber dan membuktikan dugaan gratifikasi yang dilakukan tersangka pada tahun 2007 hingga 2011.

Pihaknya mengaku sempat kesulitan memeriksa sejumlah saksi lantaran kebanyakan tinggal di luar Bali. Namun, berkat kerja keras penyidik, belasan saksi yang bersentuhan langsung dengan tersangka sudah rampung diperiksa. Keterangan para saksi pun sudah pembekasan.

Terkait pemeriksaan tersangka, Sucitrawan mengatakan belum dilakukan. "Bisa saja nanti kami periksa sekalian tahap dua. Semoga Januari ini bisa tuntas," harapnya.

Pihaknya kembali menegaskan, penanganan kasus secepatnya akan diselesaikan. Bahkan, Sucitrawan percaya selama Januari 2020

ini semua data dan alat bukti pendukung yang dibutuhkan bisa didapat. Selain itu, ada beberapa surat dari instansi berwenang yang masih ditunggu guna kepentingan penyidikan.

"Kami juga fokus mengejar aliran dana di rekening tersangka," jelasnya. Ketika menjabat Kepala BPN Kota Denpasar, tersangka diduga meminta dan menerima uang miliaran rupiah untuk penerbitan sertifikat tanah.

Ditanya apakah ada rekening lain yang digunakan tersangka untuk menampung uang dugaan gratifikasi, Sucitrawan belum berani membeberkan, disisi lain ia juga tidak membantah. "Kalau dihitung semua (aliran uang) pusing, karena saking banyaknya," kata Sucitrawan.

Bukti kuat yang dimiliki penyidik adalah hasil resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK). Hasil PPATK itulah yang menjadi pintu masuk jaksa membongkar kasus ini.

Berdasarkan laporan PPATK itu juga penyidik mengembangkan kasus ini. Jaksa mencium adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan tersangka.

"Kami kejar TPPU karena banyak transfer ke sana (rekening tersangka). Banyak aset dan lahan milik tersangka diduga hasil TPPU. Salah satunya tanah di beberapa tempat," beber Sucitrawan.

Banyak Intervensi

Disinggung mengenai adanya intervensi dalam penanganan kasus ini, Sucitrawan tidak menyangkal. Dijelaskan untuk membongkar kasus ini tidak mudah, karena banyak mendapat tekanan dari berbagai pihak. Pula, banyak pihak yang berusaha keras agar kasus tidak

dilanjutkan.

"Banyak intervensi dari kanan dan kiri. Ada yang minta ketemu langsung, ada yang via telepon. Tapi, kami profesional tanpa beban. Kami tutup mata, karena kami sudah punya bukti kuat," tegas Sucitrawan.

Diberitakan sebelumnya, penetapan Tri Nugroho sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Kajati Bali nomor: PRINT-03/N.1.1/FDd.1/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang tindak pidana korupsi gratifikasi kepada penyelenggara negara pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani Kajati Bali, Idianto. Dalam perkara dugaan gratifikasi ini tersangka Tri Nugroho dijerat Pasal 12B atau Pasal 11 UU Tipikor tentang gratifikasi kepada penyelenggara negara. (can)

Sambungan Hal.1



Karya di Pura Pucak Pamarisuda dan Pura Subak Desa Adat Tiyingan Plaga

Bupati Giri Prasta Ajak Warga Utamakan Persatuan

PURA sebagai tempat untuk memantapkan dan meningkatkan *sraddha* dan *bhakti* umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, juga merupakan tempat untuk menyatukan umat Hindu yang ada di suatu wilayah yang terdiri dari berbagai macam kalangan. Mengingat pentingnya keberadaan pura dalam kehidupan sosial religius masyarakat. Maka Pemkab Badung memberikan perhatian yang besar dalam hal pelestarian keberadaan pura maupun dalam hal yang berkaitan dengan tata pelaksanaan upacara *yadnya*. Seperti yang terlihat pada Rabu (8/1) kemarin, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri Karya *Mejabe Jero*, *Rsi Gana Madasar Caru Manca Sata Ngenteg Linggih lan Mendem Padagingan* Pura Pucak Pamarisuda dan Pura Subak Desa Adat Tiyingan Plaga.

Upacara ini diselenggarakan setelah tuntasnya serangkaian pembangunan fisik yang ada di pura tersebut. Yang meliputi *pal-inggih gedong*, *tembok panyenger*, *senderan bale baris*, *pawaregan*, *bale kulkul* serta penataan halaman Pura Subak Wana Sari. Yang dananya bersumber dari dana hibah Pemkab Badung tahun 2019 sebesar Rp3 miliar.

Menurut penjelasan I Wayan Windra selaku Klian Adat Banjar Tiyingan, upacara Karya *Mejabe Jero*, *Rsi Gana Madasar Caru Manca Sata Ngenteg Linggih lan Mendem Padagingan* Pura Pucak Pamarisuda dan Pura Subak Desa Adat Tiyingan menghabiskan dana sebesar Rp315 juta yang semuanya bersumber dari dana urunan masyarakat. Dan untuk rangkain pelaksanaannya diawali dengan upacara *nanceb Surya* pada tanggal 24 Desember, dilanjutkan dengan upacara *Macaru Manca Kelud* dan *Rsi Gana* pada tanggal 5 Januari. Serta *Melaspas Wewangunan lan Mendem Padagingan* tanggal 8 Januari yang di-puput oleh Ida Pedanda Geria Prabu dari Denkayu Mengwi.



KARYA - Bupati Giri Prasta saat menghadiri Karya *Mejabe Jero*, *Rsi Gana Madasar Caru Manca Sata Ngenteg Linggih lan Mendem Padagingan* Pura Pucak Pamarisuda dan Pura Subak Desa Adat Tiyingan, Plaga.

"Dimana puncak Karya *Ngenteg Linggih* dan *Mendem Padagingan* akan kami selenggarakan pada tanggal 10 Januari besok," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Giri Prasta dalam sambutannya mengajak warga tiyingan untuk senantiasa mengutamakan persatuan agar segala kegiatan yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Masyarakat diminta selalu berpegang teguh pada konsep *Tri Hita Karana* demi terciptanya kehidupan yang harmonis damai dan selaras. "Kami selaku pimpinan pemerintah kabupaten Badung sudah mengimplementasikan konsep *Tri Hita Karana* ke dalam program nyata untuk menciptakan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, Pemerintah Kabu-

paten Badung selalu men-support kegiatan di bidang keagamaan, dalam konteks hubungan manusia dengan manusia Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan program pendidikan dan kesehatan gratis untuk semua lapisan masyarakat. Dan dalam konteks hubungan manusia dengan lingkungan kami juga sudah menggiatkan program Gertak guna menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, serta lestari," papar Giri Prasta.

Pada acara tersebut, Bupati Giri Prasta juga berkesempatan *ngaturang ayah mendem Padagingan* di *palinggih utama* di Pura Pucak Pamarisuda. Acara tersebut juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Badung IGN Lanang Umbara, *Panglingsir* Puri Petang, Camat Petang, Kapolsek Petang, Danramil Petang, serta Pj. Perbekel Desa Plaga. (ad200)



Karya di Pura Pucak Pamarisuda dan Pura Subak Desa Adat Tiyingan

Bupati Giri Prasta Ajak Krama Utamakan Persatuan



BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri Karya Majabe Jero, Rsi Gana Medasar Caru Manca Sata Ngenteg Linggih lan Mendem Pedagingan Pura Pucak Pamarisuda dan Pura Subak Desa Adat Tiyingan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang pada Buda Pon Tolu, Rabu (8/1).

MANGUPURA, NusaBali

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri Karya Majabe Jero, Rsi Gana Medasar Caru Manca Sata Ngenteg Linggih lan Mendem Pedagingan Pura Pucak Pamarisuda dan Pura Subak Desa Adat Tiyingan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang pada Buda Pon Tolu, Rabu (8/1). Upacara ini diselenggarakan setelah pembangunan palinggih gedong, panyenger, senderan bale baris, pawaregan, bale kulkul serta penataan halaman pura subak Wana Sari, tuntas. Anggaran bersumber dari dana hibah Pemkab Badung tahun 2019 sebesar Rp 3 miliar.

Menurut Kelian Adat Banjar Tiyingan I Wayan Windra, Karya Majabe Jero, Rsi Gana Medasar Caru Manca Sata Ngenteg Linggih lan Mendem Pedagingan Pura Pucak Pamarisuda dan Pura Subak Desa Adat Tiyingan menghabiskan dana sebesar Rp 315 juta yang bersumber

dari urunan krama. Rangkaian karya diawali dengan upacara nanceb Surya pada 24 Desember 2019, dilanjutkan dengan macaru Manca Kelud dan Rsi Gana pada 5 Januari 2020. Serta Melaspas Wewangunan lan Mendem Pedagingan pada 8 Januari 2019 yang dipuput oleh Ida Pedanda Grya Prabu dari Denkayu Mengwi. "Puncak karya Ngenteg Linggih dan Mendem Pedagingan akan kami selenggarakan pada 10 Januari 2020 mendatang," katanya.

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya mengajak krama Tiyingan untuk selalu mengutamakan persatuan agar segala kegiatan yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Krama diminta selalu berpegang teguh pada konsep Tri Hita Karana demi terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, dan selaras.

"Kami selaku pimpinan Pemerintah Kabupaten Badung

sudah mengimplementasikan konsep Tri Hita Karana ke dalam program nyata untuk menciptakan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

"Dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, Pemkab Badung selalu mensupport kegiatan di bidang keagamaan. Dalam konteks hubungan manusia dengan manusia Pemkab Badung menyelenggarakan program pendidikan dan kesehatan gratis untuk semua lapisan masyarakat. Dan dalam konteks hubungan manusia dengan lingkungan, kami juga sudah menggiatkan program gertak guna menciptakan lingkungan yang sehat bersih serta lestari," papar Giri Prasta.

Bupati Giri Prasta juga berkesempatan ngaturang ayah mendem pedagingan di palinggih utama di Pura Pucak Pamarisuda. @



Dua Desa Pasang 255 Sambungan Rumah

AMLAPURA, NusaBali

Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (Satker PIP) Balai Program Permukiman Wilayah Bali menyerahkan Pamsimas untuk dua desa di Kabupaten Karangasem, Rabu (8/1). Penyerahan Pamsimas digelar di Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen dan di Banjar Bangle, Desa Bunutan, Kecamatan Abang. Dua desa ini telah memasang sambungan rumah (SR) secara swadaya di 255 titik.

Kepala Dinas PUPR Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa mengatakan, mekanisme penyerahan Pamsimas setelah KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) tuntas mengerjakan proyek. KKM selanjutnya menyerahkan ke Satker PIP (Pembangunan Infrastruktur Permukiman). Selanjutnya diserahkan ke KPSPAM (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum) di desa. Bantuan Pamsimas dari pusat Rp 245 juta, bantuan dari desa Rp 35 juta, dan swadaya sekitar Rp 70 juta. Total nilainya Rp 350 juta.

Pembangunan infrastruktur itu sebatas membangun saluran air melalui pipa, kemudian air disalurkan ke dalam cubang yang dilengkapi kran umum. Kenyataannya, masyarakat enggan memanfaatkan kran umum, masih memilih berswadaya dengan membangun jaringan saluran

air ke rumah-rumah, sehingga dilakukan pemasangan ke rumah-rumah. "Setelah dibangun saluran air, masyarakat antusias berswadaya membangun sambungan rumah

sehingga praktis air langsung masuk rumah," kata Nyoman Sutirtayasa.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Penelitian

dan Pengembangan Daerah Karangasem I Gusti Bagus Budiadnyana menambahkan, di sejumlah Pamsimas yang telah diserahkan pengelolaannya ke desa, semuanya disertai swa-

daya masyarakat membangun sambungan rumah. "Masyarakat menginginkan biar praktis, sekalian air masuk rumah, tidak lagi ambil di kran umum," katanya. **k16**



Eksekutif dan DPRD Bali Kompromi

★ Dana Bansos/Hibah Tetap Dipasang di 2021

DENPASAR, NusaBali

Setelah sukses mempertahankan dana hibah yang akan cair pertengahan Juli 2020 mendatang, dana hibah yang akan difasilitasi DPRD Bali di Tahun Anggaran (TA) 2021 tetap akan dipasang. DPRD Bali beralasan banyaknya program kemasyarakatan yang disampaikan masyarakat dalam reses (penyerapan aspirasi) dana hibah dan bansos dipandang sangat membantu masyarakat.

DPRD Bali mengkompromikan dana hibah/bansos di tahun 2021 dengan cara memberikan apresiasi kepada Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster. Apresiasi itu mulai dari pujian atas program yang diluncurkan Gubernur Bali, Wayan Koster. Sampai dengan pujian capaian Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang dikomandani Kepala Bapenda, I Made Santa di mana targetnya telah terpenuhi dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp 4,2 triliun.

Di balik pujian itu DPRD Bali minta jatah bansos/hibah untuk tahun 2021 agar diupayakan proporsional. Kompromi soal anggaran hibah dan bansos ini sudah dibahas di rapat Badan Anggaran DPRD Bali dengan Pemprov Bali di Gedung DPRD Bali, Selasa (7/1). Rapat tertutup ini sebagai pra menjelang pembahasan RAPBD 2021.

Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, I Nyoman Sugawa Korry, di Denpasar, Rabu (8/1) mengakui Tim Badan Anggaran DPRD Bali telah menggelar rapat dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang dipimpin Sekda Bali, Dewa Made Indra, di Gedung DPRD Bali, Selasa (7/1).

Dalam rapat itu untuk rancangan anggaran dan belanja daerah yang akan disusun di tahun 2021 dana hibah dan bansos yang difasilitasi DPRD Bali tetap proporsional. Hal itu akan mendapatkan lampu hijau dari eksekutif. "DPRD Bali mendukung program eksekutif dan capaian-capaian pendapatan juga melampaui target.



I Nyoman Sugawa Korry

Tetapi kami juga sampaikan untuk dana hibah/bansos di tahun 2021 juga proporsional," ujar Sugawa Korry. Dia menyebutkan selama ini masyarakat sangat terbantu dengan dana hibah/bansos yang difasilitasi DPRD Bali. Sehingga DPRD Bali mendorong tetap dianggarkan di tahun 2021.

"Sudah tentu dengan penyempurnaan dan mekanisme pencairan dan pola pelaporannya harus jelas," tegas politisi Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini. Dana hibah dan bansos supaya dianggarkan di Tahun 2021 mendapatkan dukungan dari fraksi lain. Namun dana hibah dan bansos pada 2021 mendatang lebih kepada kepentingan menjaga dan melestarikan kearifan lokal Bali. Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Gerindra DPRD Bali Jro Mangku Nyoman Ray Yusha. Mantan birokrat ini mengatakan bansos dan hibah yang difasilitasi anggota dewan lebih banyak untuk kelompok masyarakat yang bertujuan menjaga kearifan lokal, adat dan budaya Bali. Sehingga pihaknya merasa bansos dan hibah ini penting difasilitasi anggota DPRD Bali.

"Menjaga kearifan lokal, pelestarian adat dan budaya memerlukan finansial yang tidak sedikit. Untuk dana hibah bansos ini kami dari Fraksi Gerindra ingin tetap diberikan kepada masyarakat melalui anggota DPRD Bali untuk memfasilitasi," ujar politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ini. **nat**



TK Percontohan Dibangun di Busungbiu

★ Anggaran Rp 1,088 Miliar, Miliki Fasilitas Terlengkap di Bali

SINGARAJA, NusaBali

Kabupaten Buleleng kembali dibantu pemerintah pusat untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan terbaik di Buleleng. Salah satunya pembangunan TK Percontohan yang berlokasi di Desa/Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. TK Percontohan dengan bangunan dan sarana prasarana terlengkap ini disebut satu-satunya di Bali.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, Made Astika, Rabu (8/1), bantuan pembangunan TK Percontohan itu didapat pada tahun 2019 lalu. Saat ini proses pembangunan swakelola itu sudah dalam tahap *finishing* dengan anggaran total Rp 1,088 miliar. TK Percontohan ini disebut akan menjadi TK yang dengan bangunan fisik dan sarana prasarana terlengkap di Bali.

"Secara fisik itu ada ruang aula, tempat pentas anak-anak, ruang tamu, ruang guru, ruang bermain *indoor outdoor*, selain



Made Astika

ruang kelas. Kalau prasarana penunjangnya juga sangat lengkap baik dari bahan ajar hingga fasilitas bermain anak-anak termasuk kloset di kamar ke-

cilnya juga disediakan untuk anak kecil," jelas dia.

Astika mengatakan TK Percontohan bantuan pusat ini dipilih dibangun di Desa Busungbiu karena kesiapan lahan seluas 35 are. Selain juga jumlah siswanya yang cukup banyak hingga 70 orang lebih.

Dia menjelaskan jika dari sisi kurikulum dan sistem pembelajaran di TK Percontohan ini tak memiliki perbedaan dengan TK negeri di Buleleng. Kurikulum yang digunakan sama dengan kurikulum di TK negeri pada umumnya. Hanya saja TK percontohan lebih kepada penyediaan sekolah yang mengutamakan kenyamanan anak dari segi sarana prasarananya.

TK Percontohan ini juga diharapkan dapat mengimbaskan TK-TK negeri yang ada di Buleleng, untuk memberikan kenyamanan generasi emas selama di sekolah. Meskipun selama ini puluhan TK negeri di Buleleng sudah menjalankan proses pendidikan sesuai dengan Standar

Prosedur Minimal (SPM).

Sementara itu, selain membangun TK Percontohan, tahun ini Disdikpora Buleleng juga akan merenovasi TK Negeri Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt yang dindingnya retak-retak akibat diguncang gempa pada November 2019 lalu. Disdikpora Buleleng melalui APBD Kabupaten Buleleng tahun 2020 mengalokasikan Rp 150 juta untuk biaya perbaikan.

Proses renovasi yang dipastikan segera akan dikerjakan bulan-bulan ini akan merelokasi sementara siswa di TK Pangkung Paruk dengan meminjam gedung SD terdekat. Sehingga proses pembelajaran tak terganggu. "Ini menjadi prioritas walaupun masih bisa digunakan gedung sangat membahayakan dengan kondisi tembok retak. Jadi kami mengutamakan keselamatan siswa. Nanti sementara proses renovasi berjalan pinjam gedung SD 1 atau 2 yang kebetulan dekat dengan TK," jelas Astika. **k23**



POLEMIK PERUSDA

Bupati Minta Perusda Profesional

NEGARA, *Radar Bali* – Bupati Jembrana I Putu Artha buka suara terkait dengan kondisi Perusda Jembrana yang bangkut. Perusda dipastikan tetap ada namun dengan aturan yang baru dan manajemen yang profesional sehingga mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha lokal di Jembrana. Menurutnya, selama ini Perusda Jembrana seperti berburu di kebun binatang. Usaha yang dijalankan hanya sebagai tukang pungut parkir dan retribusi pasar. Semestinya sebagai perusahaan berkompetisi dengan pengusaha lain dengan bisnis yang inovatif dan tidak menggantungkan dari pengadaan pemerintah. “Jangan hanya cari pekerjaan yang gampang,” ujarnya.

Meski saat ini Perusda Jembrana sudah bangkrut tidak harus dibubarkan. Karena perusda harus ada di setiap kabupaten, hanya saja sejumlah aturan tentang perusda perlu diganti. Salah satunya mengenai perekrutan direktur harus dilakukan dengan profesional dan proporsional. “Direktornya harus seleksi jangan ditunjuk seperti sekarang ini, sedikit-sedikit bupati,” ungkapnya.

Dengan manajemen yang profesional dan bagus, maka hasilnya juga bagus. bupati menekankan agar Perusda Jembrana profesional dan harus bersaing dengan pengusaha-pengusaha di Jembrana. Mengenai pendirian BPR Jembrana, bupati menyebut perlu anggaran cukup besar sekitar Rp 24 miliar sebagai dana awal. Kemampuan pemerintah daerah belum bisa memenuhi kebutuhan penyertaan modal. Disamping itu, saat ini banyak BPR yang rugi. “BPR banyak yang rugi. Uang harus naruh Rp 24 miliar untuk parkir, darimana dapat. Tidak mungkin. Kita sudah BPD, saham juga ada di sana (BPD Bali),” tandasnya. (bas/rid)



Direktornya harus seleksi jangan ditunjuk seperti sekarang ini, sedikit-sedikit Bupati.”

I PUTU ARTHA
Bupati Jembrana



Pengerjaan Wantilan Molor, Kontraktor Didenda

GIANYAR, Radar Bali -Pengerjaan wantilan pura di Desa Pakraman Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati molor dari jadwal yang ditentukan. Proyek yang mestinya rampung pada 12 Desember 2020 lalu, hingga Januari 2020 belum juga rampung. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gianyar telah memberikan sanksi terhadap kontraktor.

Berdasarkan plang proyek yang tertera di depan wantilan, menjadi

kewenangan PUPR Gianyar. Proyek itu dengan nama pekerjaan pembangunan wantilan pura kawitan Cameng, Banjar Adat Cemenggaon, Desa Pakraman Cemenggaon, Desa Celuk, Sukawati. Proyek nomor SPK:640/5641/PUPR/2019 dianggarkan Rp 619 juta.

Proyek mulai dikerjakan mulai 12 Agustus 2019 selama 120 hari kalender. Atau dikerjakan selama 4 bulan. Apabila dihitung, semestinya proyek sudah harus rampung pada 12 Desember 2019 lalu. Salah

satu pekerja pemasang genteng yang ditemui mengaku diminta menggenjot pengejaan. "Kami diminta ngebut, minggu ini harus sudah jadi," ujar pekerja itu. Dia hanya diminta menggarap pemasangan genteng saja. "Atap saja. Untuk lantai kami tidak tahu," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Gianyar, Wayan Karya yang dikonfirmasi Rabu (8/1) membenarkan pengerjaan molor. Dia mengaku proyek itu diawasi oleh Bidang Cipta Karya PUPR Gianyar.



INDRA PRASETYA / RADAR BALI

MOLOR: Pembangunan wantilan pura di Desa Pakraman Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati molor dari jadwal.

"Detailnya bidang Cipta Karya yang tahu," ucapnya.

Mengenai hal itu, pihaknya langsung memberikan sanksi bagi kontraktor. Kontraktor

pelaksana, yakni PT Bangun Raya Nusantara Inti dengan konsultan pengawas CV Sukarma dan Rekan. "Dikenakan denda," tegas Karya tanpa merinci. (dra/dot)



☐ RADAR BALI ☐ TRIBUN BALI ☒ BALI POST ☐ NUSA BALI

☐ _____

Diperpanjang, Verifikasi Persyaratan Pencairan Dana Desa Adat

Denpasar (Bali Post) -

Tahapan verifikasi persyaratan pencairan dana desa adat masing-masing Rp300 juta sedianya berakhir Rabu (29/1) kemarin. Namun, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali memperpanjang tahapan ini sampai dengan hari Minggu (2/2). Utamanya untuk memberikan kesempatan bagi desa adat yang belum menyampaikan dokumen.

"Masih ada 92 desa adat yang belum mengajukan dokumen persyaratan alokasi dana desa adat," ujar Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, dikonfirmasi Rabu (29/1).

Selain itu, lanjut Kartika, beberapa dokumen persyaratan yang sudah diajukan desa adat masih ada yang harus disempurnakan sesuai juknis. Hingga 28 Januari lalu, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah terbit untuk 682 desa adat. Artinya, uang itu kini sudah ada di rekening desa adat.

"Per tanggal 28 Januari 2020, yang sudah cair (SP2D) berjumlah 682 desa adat dari 1.493 desa adat," jelasnya.

Dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, seluruh desa adat dialokasikan dana desa adat sebesar Rp447,9 miliar. Sehingga, masing-masing desa adat menerima Rp300 juta. Di dalamnya sudah termasuk pemberian insentif untuk bendesa adat sebesar Rp1,5 juta per bulan dan prajuru yang besarnya ditentukan melalui musyawarah.

Sebelumnya, Petengen Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, I Gede Arya Sena, mengatakan Pemprov Bali khususnya gubernur berniat baik memberikan dana desa adat Rp300 juta. Niat baik itu sudah ditindaklanjuti oleh desa adat dengan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat tahun 2020 yang dilengkapi Rencana Keuangan Tahunan 2020. Arya Sena menambahkan, masih adanya revisi lantaran bantuan langsung masuk ke rekening desa adat merupakan hal yang baru pertama kali. Selain itu, desa adat juga langsung mengelola kegiatan tanpa ada pendampingan dan belum semua memahami pola yang dimaksud di dalam juknis. (kmb32)

Edisi : Kamis, 30-1-2020

Hal : 2



Hasil Pungutan Dibagi ke Kadus, Ketua Bumdes hingga BPD

Sidang Perbekel Pemecutan Kaja Kasus Korupsi Pungutan Desa

DENPASAR, NusaBali

Perbekel Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, AA Ngurah Arwatha, 48, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pungutan desa di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (28/1) sore. Dalam sidang terungkap, Perbekel dua periode (2010-2016 dan 2016-2022) membagi-bagikan uang hasil pungutan tersebut ke perangkat dibawahnya.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nengah Astawa dan I Gusti Ayu Rai Artini terungkap jika uang hasil pungutan tersebut mengalir mulai dari Perbekel, Kepala Dusun, Ketua Bumdes hingga BPD (Badan Pemusyawaratan Desa). Dijelaskan, kasus ini berawal dari pungutan desa terhadap toko, pedagang, dan pasar desa



• NUSABALI/YUDA

PERBEKEL Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, AA Ngurah Arwatha saat menjalani sidang di PN Denpasar, Selasa lalu.

yang dipungut petugas dari Desa Pemecutan Kaja atas perintah perbekel. Petugas linmas memberikan pungutan dengan cara memberikan karcis senilai

Rp 3 ribu jika pengunjungnya ramai. Jika pengunjungnya sepi diberi karcis senilai Rp 2 ribu.

Karcis bertuliskan punia BUMDes itu dipungut setiap

hari. Hasil pungutan kemudian disetorkan ke bendahara desa. "Selain melakukan pungutan pada pedagang pasar, juga melakukan pungutan pada pengusaha toko dengan karcis kisaran Rp 15.000 - 250.000 tiap bulan per toko, tergantung jenis usaha. Petugas melakukan pungutan terhadap 27 - 30 pedagang dengan setoran Rp 125.000/hari atau sekitar Rp 3.000.000 per bulan," lanjut JPU.

Di awal kepemimpinan Arwatha pada 2010-2016, pungutan ini dimasukkan ke kas desa dan dijabarkan ke APBDes. Namun dimasa kedua kepemimpinannya yaitu mulai 2017-2018, uang pungutan dari toko, pedagang dan pasar desa tidak dimasukkan ke kas desa. Selain itu, penggunaan uang pungutan itu juga tidak ses-

uai APBDes. Pasalnya, hasil pungutan tersebut langsung dibagi oleh Perbekel Arwatha ke perangkat desa dan penyertaan modal desa BUMDes. "Terdakwa telah memperkaya diri sendiri, perangkat desa, kepala dusun, dan anggota BPD sebesar Rp 117.509.500 dan memperkaya BUMDes Rp 72.592.500, mengakibatkan kerugian negara Rp 190.102.000," tegas JPU.

Dalam dakwaan primer, perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedang dalam dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU yang sama. Menanggapi dakwaan jaksa, terdakwa melalui pengacaranya Made Adi Mustika tidak mengajukan eksepsi. **rez**



Uang Pungutan jadi Bancakan

■ Sidang Korupsi Perbekel Desa Pemecutan Kaja ■ Berdalih Punia tapi Mengikat

DENPASAR, Radar Bali - Modus korupsi di Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara dengan terdakwa Perbekel AA Ngurah Arwatha, 47, akhirnya terungkap gamblang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Uang pungutan dari pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Jaba Puri Agung Jero Kuta dan pengusaha/pemilik toko dijadikan bancakan atau dibagi-bagi dan dinikmati perbekel beserta perangkatnya.

Mulai kepala dusun hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapatkan *dum-duman*. Akibatnya, negara dalam hal ini Desa Pemecutan Kaja merugi Rp 190.102.000. Ironisnya, terdakwa sebagai perbekel yang menginisiasi perbuatan melanggar hukum itu. Saat didudukkan di kursi pesakitan, terdakwa terlihat pasrah meski mendapat dukungan moril dari belasan anggota keluarganya.

"Pada 2017 hasil pungutan dari PKL dan pengusaha toko tidak dimasukkan ke dalam APBDes. Demikian pula dengan pungutan yang sama tidak dianggarkan sebagai penerimaan pendapatan desa tahun anggaran 2018," beber jaksa penuntut umum (JPU) Gusti Ayu Rai Artini dan I Nengah Astawa di hadapan majelis hakim yang diketuai Angeliky Handajani Day.

JPU Rai membeberkan musabab korupsi yang disponsori terdakwa. Terdakwa sebagai perbekel sekaligus sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan desa, dalam memperoleh pendapatan desa dengan melakukan pungutan pada pedagang yang ada di pasar desa terletak di Jalan Sutomo, Denpasar.

Pelaksanaan pungutan itu didasarkan pada SK Kepala Desa Nomor 02/2005 tentang Pengenaan Sumbangan Pembangunan Desa. Pemungutan terhadap pedagang dilakukan petugas perlindungan masyarakat (linmas). Praktikanya, linmas dibagi menjadi tiga grup dalam melakukan pungutan kepada pedagang, pengusaha atau pemilik toko di Desa Pemecutan Kaja.

"Petugas linmas memberikan pungutan dengan cara memberikan karcis senilai Rp 3.000 jika pengunjungnya ramai. Jika pengunjungnya sepi diberi karcis senilai Rp 2.000," imbuh JPU Kejari Denpasar itu.

Karcis bertuliskan punia BUMDes itu dipungut setiap hari. Hasil pungutan kemudian disetorkan ke bendahara desa. Selain melakukan pungutan pada pedagang pasar, juga melakukan pungutan pada pengusaha toko

dengan karcis kisaran Rp 15.000 - 250.000 tiap bulan per toko, tergantung jenis usaha. Petugas melakukan pungutan terhadap 27 - 30 pedagang dengan setoran Rp 125.000/ hari atau sekitar Rp 3.000.000 per bulan.

Pada 2014 - 2016, terdakwa masih memasukkan pungutan ke dalam kas desa. Namun, sejak 2017 pendapatan asli desa berdasar pungutan pedagang pasar dimasukkan ke dalam BUMDes. Ini setelah Desa Pemecutan Kaja mendirikan BUMDes yang didirikan berdasar Peraturan Desa Nomor 3/2016 tanggal 1 Juni 2016.

Nah, dari sinilah perbuatan curas itu terjadi. Pendapatan yang bersumber dari pedagang yang sudah disetorkan ke bendahara desa, dalam periode Januari 2017 - Februari 2018 sebesar Rp 190.102.000 malah dibagikan kepada kepala desa, aparatur desa, dan anggota BPD desa sebesar Rp 117.509.500. Uang itu dijadikan tunjangan penghasilan kepala

desa beserta jajarannya.

Berdasar hasil audit keuangan

negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali ditemukan potensi penerimaan sebesar Rp 190.102.000. Setelah dilakukan pemeriksaan pada APBDes 2017 tidak terdapat laporan penerimaan pendapatan asli desa dari PKL dan pungutan pengusaha toko.

"Uang penerimaan hasil desa dipotong dan dibagi-bagikan kepada kepala desa, aparatur desa, dan BPD desa, sebesar Rp 117 juta. Dan, disetorkan ke dalam kas BUMDes sebagai penyertaan modal Rp 72 juta," jelas jaksa.

Abaikan Permendagri

MENURUT jaksa, terdakwa AA Ngurah Arwatha sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah mengabaikan asas-asas keuangan desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur berdasar asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, disiplin, dan tertib anggaran.

Terdakwa selaku kepala desa dalam menetapkan anggaran dan belanja desa juga tidak memasukkan uang pungutan pedagang kaki lima, pungutan pengusaha toko, perusahaan, dan setoran Pasar Jaba Puri Agung Jero Kuta ke dalam APBDes 2017 dan APBDes perubahan 2017.

Perbuatan terdakwa tidak memasukkan pendapatan desa ke dalam BUMDes secara mandiri tanpa melalui mekanisme APBDes bertentangan dengan Permendes PDTT Nomor 4/2015.

"Terdakwa telah memperkaya diri sendiri, perangkat desa, kepala dusun, dan anggota BPD sebesar Rp 117.509.500 dan memperkaya BUMDes Rp 72.592.500, mengakibatkan kerugian negara Rp 190.102.000," tegas JPU Rai.

Dalam dakwaan primer, perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedang dalam dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU yang sama.

Menanggapi dakwaan jaksa, terdakwa melalui pengacaranya tidak mengajukan eksepsi. Sidang lanjutan dua pekan lagi. (san/yor)



Dugaan Pungli Jaspel Memanas

- Diduga Terjadi 2014-2019, Polda Sudah Menyelidiki
- Manajemen RSD Mangusada Mengaku Siap Buka-Bukaan

DENPASAR, Radar Bali - RSD Mangusada di Kapal, Mengwi, Badung yang terlihat megah dari luar ternyata menyimpan gejala di dalamnya. Para dokter di rumah sakit pelat merah itu gaduh lantaran uang tunjangan jasa pelayanan (jaspel) diduga "disunat" alias dipungut liar (dipungli) manajemen ■

► Baca **Dugaan...** Hal 7



ADRIAN SUWANTO / RADAR BALI

DIPERTANYAKAN : Suasana halaman ruang dokter RSD Mangusada di Kapal, Mengwi, Badung. Uang tunjangan jasa pelayanan dokter kini jadi sorotan.

KEGADUHAN DUGAAN PUNGLI JASPEL

- **Pungutan** : Pungutan dilakukan 2014 hingga 2019.
- **Polat Pembayaran Jaspel** : Jaspel diberikan dengan cara ditransfer melalui rekening, menurut keterangan sumber, tidak ada faktur rinciannya, tidak ada penjelasan detail.
- **Tidak Tahu** : Salah seorang sumber dokter mengatakan bahwa baru mengetahui jaspelnya dipotong setelah dipanggil penyidik Polda Bali.
- **Disebut Sudah Sepakat** : Menurut Kabid Pengendalian dan Operasional RSD Badung, dr. Arya Widiana Pasek, memang ada pemotongan dilakukan

pihak manajemen atas dasar kesepakatan dengan pegawai dan manajemen sejak 23 Desember 2014 untuk dana suka-duka.



bersambung ke hal 7 ...

GRAFIS : GT DEWANTARA / RADAR BALI



PUSKESMAS



WAYAN PUTRA/RADAR BALI

JEBOL: Kondisi plafon Puskesmas Selat yang jebol, kemarin.

Baru Melaspas, Plafon Puskesmas Selat Jebol

AMLAPURA, Radar Bali - Bagian plafon puskesmas Selat Karangasem yang baru direhab jebol. Jebolnya plafon tersebut terjadi di ruang rawat inap, kemarin (4/1). Padahal puskesmas ini baru selesai direnovasi dan di-melaspas beberapa waktu lalu. Jebolnya plafon terjadi tepat di ruang tengah bangunan. Material jebol pun masih berserakan di lantai.

Menurut beberapa pegawai puskesmas Selat, jebolnya plafon dikarenakan ada kebocoran pada jaringan pipa air di bagian atas. Akibatnya, air merembes dan mengenai plafon hingga ambles.

Terkait kerusakan plafon, wakil bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa menilai pengerjaan puskesmas tersebut secara kualitas tidak bagus. Karena baru saja selesai sudah rusak. Hanya saja, pihaknya mengatakan kalau kerusakan tersebut masih menjadi urusan rekanan. Sehingga rehab akan dilakukan rekanan. "Ya kalau kondisinya seperti ini secara kualitas pengerjaannya tidak bagus," ujarnya. Saat sidak beberapa waktu lalu Artha Dipa juga sempat mengkritisi pengerjaan puskesmas tersebut. Dia protes soal jendela yang tipis.

Sementara Kadis Kesehatan Karangasem dr Putra Pertama membenarkan kalau plafon puskesmas selat jebol. "Ya masih menjadi tanggungan rekanan, jadi rekanan akan segera memperbaiki," ujarnya.

Hal yang sama juga dikemukakan Mertayasa dari CV Catur Utama Mandiri. Dirinya mengakui kalau ada jebol sedikit di ruang rawat inap. Untuk itu pihaknya akan segera melakukan perbaikan. "Ya kami akan segera perbaikan," ujar Mertayasa. (tra/dot)



Kelar Putusan, Ashari Dipecat

Pemberhentian Menunggu Salinan Putusan

SINGARAJA, Radar Bali – Perbekel Celukan Bawang nonaktif, Muhammad Ashari segera diberhentikan secara permanen dari jabatannya. Menyusul vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, yang kini telah berkekuatan hukum



Muhammad Ashari

tetap (*inkraht*).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pid-sus Kejari) Buleleng, I Wayan Genip, mengatakan, hingga Jumat (27/12) dirinya belum

dihubungi kemarin (31/12).

Lebih lanjut Mastika mengatakan, Dinas PMD Buleleng telah menunjuk pelaksana tugas (Plt), selama Ashari berstatus nonaktif dari jabatannya sebagai perbekel. Apabila telah diberhentikan secara tetap, rencananya pelaksana tugas akan tetap bertugas sampai dengan dilaksanakannya Penggantian Antar Waktu (PAW) di Desa Celukan Bawang.

"Nanti akan dilaksanakan PAW. Sebab sisa masa jabatannya lebih dari dua tahun. Makanya dilakukan PAW," jelasnya.

Sekadar diketahui Perbekel Celukan Bawang non aktif Muhammad Ashari dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan penjara, pada sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Selain itu Ashari juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 39.160.000. Apabila tidak membayar, maka hartanya dapat disita oleh kejaksaan untuk melunasi biaya pengganti.

Sepertinya sudah *inkraht*. Sampai Jumat tidak ada upaya hukum dari yang bersangkutan. Jadi otomatis waktu pikir-pikrnya sudah habis."

I WAYAN GENIP
Kasipidsus Buleleng

mendengar adanya upaya hukum lanjutan dari Ashari

► **Baca Ashari... Hal 7**

Tentang Nasib Ashari

Nama

Muhammad Ashari.

Status

Perbekel Celukan Bawang terpilih, nonaktif. Sebelumnya, pada 31 Oktober 2019 dia mendapat 1.187 suara, saat pemilihan perbekel (Pilkel), mengalahkan pesaingnya, M. Muhajir yang mengantongi 815 suara, Irwan 701 suara.

Penyebab

Jadi terpidana kasus korupsi dengan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan penjara.

Tenggat Pengajuan Banding

Rabu (25/12/2019) atau sudah habis waktu alias sudah *inkraht*, sudah berkekuatan hukum tetap.

Tindakan Selanjutnya

Pemecatan permanen masih menunggu salinan vonis

hukuman. Setelah digantikan sementara pelaksana tugas (Plt), nanti dilanjutkan penggantian dengan penggantian antar waktu (PAW).



GRAFIS : GT DEWANTARA / RADAR BALI

Namun bila hartanya tak tersisa lagi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

sebenarnya sudah ditahan di Lapas Singaraja. Meski begitu, dia berhasil menang dari balik

Saat perhelatan Pemilihan Perbekel (Pilkel) serentak pada 31 Oktober 2019 lalu, Ashari

jeruji besi. Saat itu ia mampu mengumpulkan 1.187 suara. Mengalahkan pesaingnya yakni

M. Muhajir yang mengantongi 815 suara, dan Irwan sebanyak 701 suara. (eps/pit)



Proyek Gedung Baru RSD Mangusada

Belum Rampung

MANGUPURA, Radar Bali - Pembangunan gedung baru Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada tak kunjung rampung. Pasalnya, ada proses pembangunan yang sudah jalan tetapi model bangunan yang harus diubah sesuai dengan permintaan dan kebutuhan rumah sakit.

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Badung IGA Ngurah Arinda Trisnawati, saat dikonfirmasi tak menampik hal tersebut. Dia mengatakan, belum rampungnya pembangunan lantaran ada perubahan pada alat radiologinya. "Jadi, desain bangunannya juga berubah. Makanya rampungnya di bulan Desember 2020 mendatang," katanya saat dikonfirmasi Selasa (31/12) kemarin.



MOLOR: Proyek gedung di RSD Mangusada yang belum rampung, kemarin.

Dikatakan, soal anggaran tidak ada masalah, sesuai kerja sama atau ten-

der, bangunan itu akan menghabiskan Rp 255.648.738.700. Kata dia, saat ini

proses pengerjaan sudah mencapai 35,97 persen. Sehingga nantinya akan dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2020. Mengingat ini proyek sifatnya tahun jamak (multi years).

Sementara dari peruntukan, Gedung D rencananya akan digunakan untuk poliklinik dengan sistem cluster dan ruang rawat inap kelas II dan kelas I. Gedung F rencana dimanfaatkan untuk pusat onkologi pelayanan khusus kanker, ruang pelayanan eksklusif seperti pelayanan bayi tabung, dan ruang khusus rawat anak. Gedung G, rencana menjadi pusat pelayanan cuci darah, juga pusat manajemen, untuk pendidikan dan pengembangan, dapur serta laundry. (dwi/yor)



Cek Portal Galian C

Dewan Curiga Masih Ada Kebocoran Pajak

Amlapura (Bali Post) -

Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana didampingi wakilnya, I Nengah Sumardi dan I Wayan Parka, melakukan pengecekan di portal galian C di Dusun Uma Anyar, Desa Ababi, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Senin (6/1) lalu. Sidak ini dilakukan untuk mengetahui kondisi pungutan pajak. Hasil pengecekan, dewan curiga masih adanya dugaan kebocoran pajak di portal tersebut.

Saat dikonfirmasi, Selasa (7/1) kemarin, Dana mengatakan, pihaknya sengaja mengecek aktivitas di portal galian C tersebut. "Sekitar pukul 11.00 Wita, kami baru menemukan ada sekitar 15 faktur pajak. Sedangkan di buku penjaga portal sudah ada sekitar 50 truk yang lewat. Bahkan, setelah mengetahui kami ada di sana, truk pengangkut galian dari utara itu justru diam, tak mau lewat. Itu yang membuat kami curiga. Ada dugaan masih ada tanda-tanda kebocoran," katanya.

Ia menjelaskan pengecekan baru dilakukan di satu titik saja. Belum lagi di portal-portal lainnya. Jika portal yang lainnya sama seperti itu, maka tingkat kebocoran pajak galian C cukup tinggi. Mengetahui kondisi itu, pihaknya meminta di-

nas terkait lebih maksimal melakukan pengawasan untuk menekan tingkat kebocoran. "Selama ini, antara kerusakan lingkungan dan jalan, tidak seimbang dengan pendapatan dari sektor galian C. Jadi, pengawas bisa lebih dioptimalkan ke depannya," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam waktu dekat ini, pihaknya juga bakal memanggil komisi yang membidangi untuk mencari di mana permasalahannya. Bahkan, kalau memungkinkan bisa dipasang CCTV di setiap portal. Upaya ini dilakukan agar diketahui jumlah truk yang lewat setiap harinya. "Kami berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi uang rakyat. Karena kalau pendapatan besar, maka imbasnya juga ke masyarakat," tegas imbuh Dana. (kmb41)



Rancangan APBD 2021 Dibahas Lebih Awal

Dewan Usulkan Tetap Ada Hibah

Denpasar (Bali Post) -

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali dan TAPD Provinsi Bali menggelar rapat tertutup di gedung dewan, Selasa (7/1) kemarin. Rapat utamanya membahas persiapan Rancangan APBD 2021 yang dilakukan lebih awal untuk menyamakan persepsi antara dewan dan eksekutif. Khususnya terkait aspek pendapatan dan belanja daerah di 2021 dengan mencermati realisasi pendapatan 2019 dan program digitalisasi.

"Banggar mengapresiasi realisasi pendapatan daerah 2019 mencapai 106 persen (Rp4,2 triliun) dan dari aspek laporan keuangan yang telah mencapai WTP untuk 2018," ujar Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry usai memimpin rapat.

Menurut Sugawa Korry, Banggar menginginkan tetap fasilitasi hibah oleh dewan yang dianggarkan dalam APBD 2021. Selain APBD dipakai untuk memenuhi program wajib seperti pendi-

dikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta lima prioritas pembangunan dalam visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali". Termasuk di dalamnya program-program terobosan, antara lain *shortcut* Mengwi-tani-Singaraja, penataan kawasan suci Besakih, dermaga segitiga emas, serta pusat kebudayaan Bali. Pasaunya, hibah tersebut dipandang sangat membantu masyarakat.

"Bentuknya (fasilitasi hibah - red) itu dievaluasi

untuk lebih mudah diawasi, lebih mudah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Tentang berapa besarnya, masih didiskusikan paling tidak sampai Februari," jelas Politisi Golkar ini.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan belum ada keputusan terkait ada atau tidaknya fasilitasi hibah oleh dewan dalam Rancangan APBD 2021. Kendati, Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya

telah mewacanakan pemangkasan hibah. "Tadi belum diputuskan, masih panjang itu," ujarnya.

Menurut Ika Putra, terlebih dahulu harus digelar Forum Pendapatan Daerah untuk bisa mengetahui indikasi anggaran. Komisi II DPRD Bali sudah ditugaskan untuk segera melaksanakan Forum Pendapatan Daerah dengan TAPD. Paling lambat digelar pertengahan Februari mendatang. Setelah target pendapatan 2021 ditentukan, barulah kemudian dirumuskan target belanja. (kmb32)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi: Telepon (0361) 819446 / 081337032965



Korupsi Bupati Cup

Lima Saksi Kompak Sebut Tidak Ada Tim Medis

Gianyar (Bali Post) -

I Ketut Suasta, mantan Sekretaris Umum Pengurus Cabang PSSI Gianyar, Selasa (7/1) kemarin kembali dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Terdakwa menjalani sidang lanjutan dalam agenda pembuktian dari jaksa.

Di hadapan majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi, JPU I Putu Iskadi Kekeran dan I Made Eddy Setiawan, menghadirkan lima saksi yang merupakan panitia seksi pertandingan. Mereka adalah Dede Setiawan, I Wayan Kosim, Gustu Ngurah Swimbawa, Ida Bagus Suluh dan I Wayan Suarya. Jaksa mengatakan mereka juga dari club sepak bola Gianyar.

Para saksi ini sekaligus mentahkan pertanggung jawaban, khususnya soal pengeluaran uang untuk tenaga medis atau kesehatan, uang pembinaan dan *top score*, bantuan kepada wasit, honor pelaksana pertandingan, dan laporan lainnya. Pasalnya, para saksi kompak mengaku tidak ada diter-

junkan tenaga medis saat itu. Juga tidak ada anak gawang, dan sebagian besar tidak mengetahui ada pembinaan *top score*.

Saksi Suarya ditanya soal *top score*, uang pembinaan dan soal piala. Selain itu, juga ditanya soal SK pertandingan. Namun saksi baru tahu ada SK setelah kasus ini dibidik kejaksaan. Dia tidak mengetahui ada tenaga medis.

Sementara saksi Ida Bagus Suluh menambahkan, saat pertandingan tidak ada tim medis, namun disediakan masing-masing club. Juga, sambung Ida Bagus Suluh, tidak anak gawang dalam turnamen Bupati Cup. Keterangan itu juga diperkuat saksi lainnya.

Perlu diketahui, untuk men-

jalankan Bupati Cup, terdakwa I Ketut Suasta mengajukan proposal ke bupati. Proposal itu ditandatangani Ketua PSSI Gianyar Pande Made Purwatha dengan bantuan dana Rp600 juta. KONI Kabupaten Gianyar yang ditandatangani I Nyoman Arjawa, selaku Ketua Umum KONI Gianyar mengajukan proposal senilai Rp2.923.200.000, yang ditunjukkan ke Bupati Gianyar.

Proposal itu untuk melaksanakan program kerja KONI Gianyar. Selanjutnya Bupati memberikan dan menyetujui hibah kepada KONI sebesar Rp2,5 miliar. Selanjutnya, Arjawa dan I Wayan Sudamia selaku Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Gianyar

menandatangani perjanjian hibah tersebut. Atas dasar itu, Ketua KONI Gianyar Arjawa mengajukan surat perihal penyaluran hibah Rp2,5 miliar yang salah satunya untuk PSSI Gianyar sebesar Rp500 juta.

Dana itu pun cair melalui BPD Bali Cabang Gianyar. Turnamen Bupati Cup 2016 pun berjalan. Namun laporan penggunaan dana yang dilaporkan terdakwa Ketut Suasta diduga tidak benar dan tidak sesuai dengan riil pengeluarannya. Di antaranya uang transpor, biaya garis lapangan, uang fotokopi hasil pertandingan, pengeluaran uang untuk tenaga medis atau kesehatan, uang pembinaan dan *top score*, bantuan kepada wasit, honor pelaksana pertandingan, dan laporan lainnya. Selisih laporan yang diduga tidak benar atau anggaran fiktif itu sebesar Rp152.450.000. (kmb37)



Pansus Segera Data Aset Milik Daerah

Tabanan (Bali Post) -

Persoalan aset selama ini terus muncul dalam tiap laporan Pemkab Tabanan. Ini dikarenakan masih adanya aset yang statusnya belum jelas. Sebab tidak semua aset itu, bersertifikat. Di samping itu ada pula aset yang menjadi sengketa. Karena itu harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Ketua Pansus aset DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa mengatakan, terkait aset itu pihaknya telah menggelar rapat internal Pansus untuk membagi tugas penanganan aset yang dimiliki Pemkab Tabanan.

Di mana ada dua kelompok besar aset yang dimiliki Pemkab Tabanan, yakni aset yang memiliki nilai ekonomis. Aset itu dianggap bisa mendatangkan pendapatan bagi daerah. Selain itu aset yang tidak bernilai ekonomi. Biasanya aset difungsikan untuk kepentingan sosial. Seperti sekolah, pelayanan kesehatan dan lainnya. "Aset yang dimiliki Pemkab harus terdata jelas," tegasnya dikonfirmasi, Selasa (7/1) kemarin.

Dikatakannya, memang seluruh aset milik Pemkab Tabanan seharusnya terdata

jelas. Bahkan semua wajib disertifikatkan, sehingga tidak ada alasan lagi pengurusan aset diabaikan. Dengan adanya sertifikat, otomatis status kepemilikannya jadi jelas. Eksekutif atau OPD yang menangani persoalan aset harus segera mensertifikatkan seluruh aset milik Pemkab, sehingga status kepemilikan Pemkab atas aset tersebut jelas. "Kalau tidak ada sertifikat bukan saja bisa diklaim pihak lain. Bahkan aset daerah bisa hilang," sebutnya.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Pansus terkait adanya aset yang menjadi sengketa itu. Pihaknya terus mengejar hal tersebut, termasuk ketika ada orang penting atau pejabat yang terlibat di dalamnya. Semuanya harus segera dituntaskan. Misalnya saja kasus aset di Pantai Nyanyi, Desa Beraban, Kediri, sempat menjadi sengketa. Sejauh ini pihaknya belum mengetahui kejelasan persoalan aset sejak dewan turun ke lokasi. "Sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya. Apalagi rencananya ada yang ingin mengelola aset tersebut," ucapnya.

Ditegaskan, pendataan aset yang dilakukan Pansus seb-

agai upaya memaksimalkan potensi aset yang ada itu untuk bisa memberikan kontribusi bagi daerah. Banyak aset yang memiliki nilai ekonomis yang belum tergarap secara maksimal. Karenanya, belum memberikan kontribusi optimal pada daerah. "Kami harap aset yang dimiliki Pemkab dapat memberikan pendapatan bagi daerah," katanya.

Hal senada disampaikan anggota Pansus I Gusti Ngurah Sanjaya. Seluruh aset yang dimiliki Pemkab Tabanan, kata Sanjaya harus terdata jelas. Selain itu seluruh aset harus memiliki sertifikat. Untuk aset yang belum punya sertifikat, maka harus segera diproses agar tidak menimbulkan persoalan. Kemudian aset itu juga harus diklasifikasi mana yang termasuk bernilai ekonomis dan mana kategori sosial. Untuk aset yang memiliki nilai ekonomis. Seperti perkebunan atau lainnya harus potensinya yang ada dimaksimalkan, sehingga mampu memberikan kontribusi pada daerah. "Kami di Pansus segera mendata aset yang dimiliki, sehingga potensinya dapat dimaksimalkan untuk peningkatan pendapatan daerah," harapnya. (kmb28)



Dana Masuk ke Kas Pemkab Rp7,9 Miliar

Peruntukan Pajak Penerangan Jalan Dipertanyakan

Bangli (Bali Post) -

Keberadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) di Bangli kerap dikeluhkan masyarakat. Masalahnya lampu PJU yang terpasang di pinggir jalan itu banyak yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan jalanan menjadi gelap pada malam hari. Bahkan di beberapa wilayah, masih ada jalan yang belum dipasang lampu PJU. Warga pun mempertanyakan peruntukan pajak penerangan jalan yang selama ini dibayarkan melalui PLN.

Anggota DPRD Bangli, Made Sudiasa, Selasa (7/1) kemarin tak menampik bahwa selama ini cukup banyak warga yang mempertanyakan peruntukan pajak penerangan jalan. Menurutnya, pertanyaan warga cukup beralasan. Sebab logikanya pajak penerangan jalan yang dipungut dari warga yang menjadi konsumen listrik, mestinya dipakai pemerintah untuk kebutuhan fasilitas penerangan jalan.

Sepengetahuannya selama ini pajak penerangan jalan yang masuk sebagai pendapatan daerah itu nilainya di atas Rp5 miliar. Namun di sisi lain, cukup banyak lampu penerangan jalan yang mati. Bahkan belum terpasang lampu. Sudiasa pun berharap, pendapatan yang bersumber dari pajak penerangan jalan itu bisa dipakai lebih banyak untuk penerangan jalan. Sehingga wilayah Bangli bisa benar-benar aman dan jalanan di Bangli tidak gelap-gelapan.

Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli, Ketut Riang, dikonfirmasi mengenai hal itu menjelaskan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen yang menikmati listrik. Konsumen dikenakan pajak setiap membayar listrik. Selama ini pajak penerangan jalan yang dibayarkan warga itu masuk ke Pemda melalui PLN.

Terkait peruntukannya, Riang mengatakan tidak ada aturan yang mewajibkan pemerintah daerah harus menggunakan sepenuhnya pendapatan dari pajak penerangan jalan untuk kebutuhan fasilitas penerangan jalan. Namun pemerintah punya kewajiban memberikan fasilitas penerangan jalan kepada masyarakat.

Di tahun 2019, kata Riang, pajak penerangan jalan yang diterima Pemkab Bangli itu dari masyarakat mencapai Rp7,9 miliar. Nilai itu melampaui target Rp6,8 miliar. Di tahun 2020 ini, pendapatan dari pajak penerangan jalan ditarget Rp7,6 miliar.

Pihaknya mengaku tidak tahu pasti seberapa besar pendapatan dari pajak penerangan jalan yang dimanfaatkan untuk fasilitas penerangan jalan. Sebab pembayaran tagihan listrik untuk PJU termasuk pemeliharaannya selama ini ditangani Dinas Perhubungan. (kmb40)



Realisasi PAD 2019 Hanya 87 Persen

Didominasi Turunnya Retribusi DTW dan Pajak

TARGET Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan tahun 2019 tidak tercapai. Dari Rp388 miliar lebih target yang dipasang, hanya bisa terealisasi 87 persen. Hal tersebut tentu sangat disayangkan, mengingat tahun-tahun sebelumnya target PAD selalu terlampaui. Lalu apa penyebabnya sehingga realisasi target PAD tidak tercapai tahun 2019?

Kepala Bapelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja, Selasa (7/1) kemarin menjelaskan, tidak tercapainya realisasi pendapatan salah satunya didominasi penurunan retribusi Daya Tarik Wisata (DTW) yang mencapai angka Rp40 miliar. Penyumbang PAD kedua PBB P2 dan BPHTB, dan penyumbang ketiga berupa PHR.

Dikatakannya, ada berbagai faktor yang menyebabkan pendapatan tak mencapai target untuk retribusi DTW. Faktor dimaksud seperti menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 kurang memuaskan lantaran terdampak bencana Gunung Agung, isu sampah, kesehatan, dan kriminalitas. "Tapi ingat, tingkat orang belanja menurun, pajak juga menurun. Ini

faktor yang hampir dirasakan semua daerah," ujarnya.

Dan untuk penurunan di sektor pajak, lanjut Wiratmaja, dikarenakan selama ini rata-rata hanya 60-70 persen wajib pajak yang taat membayar kewajibannya. Karena memang sejauh ini, wajib pajak yang tidak taat, belum ada penerapan sanksi ataupun hal-hal yang mende-sak mereka untuk membayar kewajibannya.

Begitupun selama hampir tujuh tahun tidak pernah ada penyesuaian NJOP. Selain juga OPD yang dinilai kurang greget berinovasi. Mereka terus berada di zona nyaman. Jika tetap bertahan dengan pola sama, maka target PAD 2020 yang dipasang Rp450 miliar tentu dianggap menjadi beban.

"Kalau mau berubah dan tidak merasa di zona nyaman, PAD bukan tujuan melainkan rutinitas yang harus dilakukan. Bagi saya angka Rp450 miliar itu tidak masalah. Namun harus ada pola yang dibangun oleh pemungut, kalau tetap dengan standar yang sama seperti saat ini, ya... sama saja," terangnya.

Khusus pendapatan dari sektor pajak, selain telah dibentuk pokja, juga akan dilakukan pendataan potensi wajib pajak baru. Seperti pedagang kaki lima yang memiliki omset Rp 5 juta ke atas perbulan. Untuk pendataan ke 133 desa di Kabupaten Tabanan, dikatakan Wiratmaja akan disiapkan petugas di desa didampingi dua orang pemerintah.

Untuk melakukan pendataan ini, bahkan sudah disiapkan anggaran. Nantinya yang disasar adalah pendataan pedagang termasuk wajib pajak yang membandel. Yang membandel akan dipasang stiker, bahwa usaha mereka tidak taat membayar pajak. Kalau stiker dicabut ada sanksi hukum. Karena di stiker itu dilengkapi *barcode*.

"Meski itu pedagang kali lima kalau sudah omsetnya di atas lima juta perbulan. Mereka wajib bayar pajak. Hal itu sudah diatur Perda. Target itu yang menjadi inovasi ke depan," terangnya memberi solusi. (bit)



Pemanfaatan Aset Pemprov Bali

Warga Desa Sumberkima Tolak Sistem Sewa

Singaraja (Bali Post) -

Puluhan warga Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak mengikuti mediasi terkait pemanfaatan tanah milik Pemprov Bali di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak. Mediasi ini dilakukan karena warga tidak mengajukan permohonan sewa tanah. Warga juga menolak kalau digusur.

Mediasi digelar di ruang rapat kantor Satpol PP Buleleng, Selasa (7/1) kemarin. Hadir dalam mediasi itu Kasatpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi didampingi Kasatpol PP Buleleng Putu Dana, Dandim 1609/Buleleng Letkol Inf. M Windra Listrianto, Camat Gerokgak Made Juartawan, dan Kapolsek Gerokgak Kumpul Made Widana.

Warga yang diwakili H. Mulyadi Putra yang juga anggota DPRD Buleleng mengatakan, alasan warga menolak menyewa tanah tersebut karena telah turun-temurun menempati tanah seluas 1,4 hektar itu. Selain sebagai rumah tinggal, tanah tersebut ditanami tanaman hortikultura sebagai sumber penghasilan utama warga. Selain tidak setuju menyewa tanah tersebut, warga juga

menolak kalau digusur. Kalau keputusan ini dijalankan dipastikan timbul masalah sosial dan ekonomi bagi warga. Untuk itu, dia meminta waktu melakukan perundingan satu bulan ke depan. "Di sana ada 300 jiwa dan secara turun-temurun sudah tinggal di situ. Kami tidak setuju kalau menyewa dan kalau digusur ke mana ratusan orang ini tinggal. Belum lagi ada siswa dan anak kecil," katanya.

Di sisi lain, Mulyadi Putra menyebut warga ini memiliki hak untuk mengajukan peralihan hak atas tanah tersebut. Usulan yang pernah diajukan itu belum disetujui oleh pemerintah hingga sekarang. Dirinya menilai ada kesan kurang adil, sebab Pemprov memiliki tanah dengan luas ratusan hektar yang seharusnya dimanfaatkan

dengan optimal. Faktanya tanah yang luasnya hanya 1,4 hektar dan ditempati 300 jiwa harus disasar.

Kasatpol PP Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, mengatakan pihaknya ditugaskan untuk melaksanakan amanat Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sesuai regulasi itu, pemprov mengelola aset dengan cara sewa, kerja sama dan bagi hasil. Sebelum menerapkan perda ini, pemprov meminta warga yang menempati tanah itu mengikuti regulasi yang ada. Hingga sekarang belum ada warga yang mengajukan permohonan sewa. Pemprov sudah melayangkan dua kali surat peringatan dan ketiga kali disampaikan kemarin. Kalau peringatan ketiga tidak diin-

dahkan, maka upaya terakhir adalah pengosongan. Sebelum upaya itu ditempuh, secara pribadi Dharmadi memberi kesempatan warga berunding kembali selama satu bulan sesuai permintaan warga. Pihaknya akan melaporkan hasil mediasi ini kepada Gubernur dan apa pun keputusannya nanti, warga harus siap menerima.

Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah, BPKAD Bali, Ketut Nayaka, mengatakan sesuai perda pemprov menyewakan tanah dengan tarif Rp3.000 per meter persegi. Selain itu, ada sistem kerja sama bagi hasil dan kontrak. Jika warga tidak mengikuti perda, maka tanah itu harus dikosongkan. (kmb38)



Pejabat DLHK Denpasar Dituntut Setahun

★ Terjaring OTT usai Terima Gratifikasi Rp 3 Juta

"Terdakwa tidak ada niat meminta atau melakukan pemerasan kepada pemohon ijin,"

DENPASAR, NusaBali

Oknum pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar, I Wayan Kariana, 44, yang tertangkap OTT (Operasi Tangkap Tangan) saat terima gratifikasi Rp 3 juta dituntut hukuman 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Dalam sidang yang digelar Selasa (7/1), JPU Kejari Denpasar yang diwakili I Gusti Ayu Putu Hendrawati dan Ni Luh Oka Arini Adikarini menyatakan terdakwa

terbukti bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu. Yakni, melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Selain dituntut pidana penjara selama 1 tahun, Kariana juga kena pidana denda. "Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Rp 10 juta subsidi 3 bulan penjara," tegas JPU yang juga merampas uang hasil gratifikasi Rp 3 juta untuk negara.

Dalam pertimbangan memberatkan jaksa disebutkan jika perbuatan terdakwa Kariana melawan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi. "Hal meringankan terdakwa sopan, mengakui perbuatannya dan nilai kerugian yang ditimbulkan terdakwa kurang dari Rp 5 juta," beber JPU.

Terdakwa Kariana yang didampingi kuasa hukumnya Warsa T Bhuwana yang diberi kesempatan menanggapi tuntutan melalui pledoi (pembelaan) meminta hukuman ringan-ringannya kepada majelis hakim. "Terdakwa tidak ada niat meminta atau melakukan pemerasan kepada pengurus ijin," pungkas Warsa.

Kasus ini berawal pada 11 Juli lalu saat terdakwa menemui I Gusti Ayu Parwati, selaku konsultan hukum PT Sari Melati Kencana Tbk di Pizza Hut Gatsu Tengah, Denpasar. Mereka membahas soal revisi nama, dan perjanjian lainnya. Setelah diperiksa oleh tim, ada persyaratan yang kurang. Yakni soal surat layak sehat rumah makan, izin air bawah tanah, swakelola pengelolaan sampah, DSDP penampungan limbah, membuat tempat penampungan limbah. Kekurangan itu

kemudian dicatat dalam berita acara. Atas dasar itu, terdakwa meminta saksi I Gusti Ayu Parwati menunggu di Pizza Hut Sanur. Di sana lagi dilakukan cek revisi dokumen dan ternyata kekurangannya sama. Saksi menyanggapi menyelesaikan kekurangan tersebut. Dan saat itu, terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa untuk mempermudah masalah itu, I

Gusti Ayu Parwati dimintai biaya oleh terdakwa. Alasannya supaya tidak berpengaruh terhadap proses penerbitan izin SPPL dan UKL-UPL yang dikeluarkan DLHK Kota Denpasar. Saksi pun saat itu memberi uang Rp 1 juta untuk mempermudah prosesnya.

Di hari yang sama, terdakwa melanjutkan pemeriksaan PT Sinar Wahyu Putra Transport, di Jalan Tukad Badung. Pemeriksaan izin dan dokumen dilaku-

kan. Yakni izin lingkungan dan pengelolaan sampah. Terdakwa mendekati Dewa Putu Awan Sudiasa, untuk menandatangani berita acara kekurangan. "Yang penting sama-sama mengertilah," kata terdakwa pada saksi. Saksi kemudian memberikan terdakwa uang Rp 2 juta, karena saksi takut izin yang diajukan diperlambat terdakwa.

Apesnya, saat terdakwa masuk ke dalam mobil dan membawa amplop Rp 2 juta itu, tim Saber Pungli Kota Denpasar dan polisi mencegat terdakwa. Mereka semua yang ada dalam mobil plat merah diminta turun dan polisi mengegedah. Ditemukanlah amplop isi Rp 1 juta dan Rp 2 juta tadi. Pengakuannya, kata jaksa, uang itu untuk beli bensin mobil, tambahan makan tim SPPL dan UKL-UPL dan untuk kepentingan pribadi. **rez**



Tutupi Kekurangan Pembayaran Iuran KIS PBI TAPD Rasionalisasi Anggaran Bansos DPRD

SINGARAJA, NusaBali

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Buleleng mulai menyisir anggaran guna menutupi kekurangan pembayaran iuran KIS PBI ke BPJS Kesehatan, senilai Rp 30,816 miliar. Salah satu bidikannya adalah memangkas jatah hibah bansos bagi anggota DPRD Buleleng. Sedangkan pemegang KIS PBI yang sempat dinonaktifkan, kartunya akan aktifkan kembali dalam waktu sebulan. Itu artinya, mereka akan mendapat pelayanan kesehatan secara gratis sebulan lagi.

Untuk diketahui, KIS PBI yang ditanggung melalui dana *sharing* Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng di tahun 2020 mencapai Rp 159,890 miliar, untuk 317.224 jiwa. Namun dana *sharing* yang baru dibayarkan hanya sebesar Rp 97 miliar. Sehingga ada kekurangan dana *sharing* Rp 62,890 miliar, dimana Pemkab Buleleng harus menyediakan dana *sharing* sebesar Rp 30,816 miliar. Dana sebesar Rp 30,816 miliar ini harus disiapkan kurun waktu 7 bulan ke depan.

Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka selaku Ketua TAPBD Buleleng, Selasa (7/1), mengungkapkan penyisiran anggaran dilakukan secara menyeluruh. Salah satunya adalah di DPRD Buleleng, dengan melihat jatah hibah bansos bagi masing-masing anggota dewan. Menurut Puspaka, sesuai dengan regulasi, hibah dapat diberikan manakala seluruh kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi. Sementara saat ini, masih dibutuhkan anggaran yang besar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan. "Nanti kita bahas bersama DPRD, yang jelas ada kebutuhan dan kita bahas bersama. Inilah yang kita sisir semua, agar bisa efisiensi, DPRD juga legowo manakala salah satu programnya juga disisir. Saya pikir teman-teman di dewan kepekaannya sangat tinggi untuk memahami bahwa kondisi masyarakat lebih penting dari segalanya," jelasnya.

Dari evaluasi itu, akan dilihat secara detail pendapatan-pendapatan yang sah diterima dan dirancang dalam APBD Perubahan Kabupaten Buleleng. Evaluasi akan dilakukan pada semua program kegiatan, mulai dari kegiatan

festival, hingga pembangunan infrastruktur. "Semuanya dievaluasi, kalau ngomong mencari kebutuhan anggaran itu tidak satu persatu tapi seluruhnya. Diperubahan anggaran inilah yang kita sempurnakan semua, bila ada hal yang harus disempurnakan," kata Sekda Puspaka.

Data dihimpun, jatah hibah bansos bagi masing-masing anggota DPRD Buleleng, sejatinya telah dipangkas dari Rp 1 miliar, menjadi Rp 500.000.000 per anggota. Kini dengan rasionalisasi anggaran untuk menutupi iuran ke BPJS Kesehatan itu, jatah hibah bansos anggota dewan itu kembali akan dipangkas.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, bila merasionalisasi jatah hibah bansos anggota dewan, perlu pembahasan lebih mendalam. Karena sejauh ini belum ada komunikasi dan koordinasi terkait dengan rencana tersebut. "Prinsipnya kalau memang nanti diperlukan untuk kepentingan yang lebih besar apalagi kebutuhan dasar masyarakat, kenapa tidak. Tetapi kan perlu kita diskusikan bersama-sama," kata politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Tejakula ini.

Di tempat terpisah, Kepala BPJS Singaraja Elly Widiyani mengatakan, addendum atas Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah dibuat dapat saja dilakukan, sesuai skema yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Skema itu bisa jumlah kepesertaan yang menyesuaikan anggaran, atau rentang waktu yang menyesuaikan anggaran.

Menurutnya, bila skema sesuai rekomendasi DPRD Buleleng dimana dana sebesar Rp 97 miliar dipergunakan untuk dalam rentang waktu 7 bulan, agar seluruh penerima KIS PBI bisa tercover, maka kekurangannya itu harus juga dipastikan. "Kalau skemanya itu untuk 7 bulan, bisa saja. Nah masalah kepesertaan aktifnya itu menunggu sebulan lagi, karena ini sudah tersistem dari Pusat. Jadi kalau ada yang memerlukan kartu dalam keadaan darurat, sebaiknya mendaftar mandiri dulu. Nanti setelah addendum perjanjian dengan pemerintah daerah, dan namanya didaftarkan oleh pemerintah, otomatis beralih jadi penerima bantuan iuran," jelasnya. **k19**



Februari, Kartu KIS-PBI Kembali Aktif

- Hasil Pembahasan Kerjasama Pemkab dan BPJS
- Darurat, Sementara Jadi Peserta Mandiri

SINGARAJA, Radar Bali - Warga pemegang Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) daerah rupanya harus bersabar. Mereka tak bisa menggunakan kartunya dalam waktu dekat ini. Sebab kartu-kartu itu baru akan aktif pada bulan Februari mendatang. Itu pun bila perjanjian kerjasama sudah tuntas ditandatangani.

Hingga kini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Singaraja, masih melakukan pembahasan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah. Konsekuensinya, kartu-kartu yang sudah terlanjur dinonaktifkan, baru bisa diaktifkan bulan depan.

Kepala BPJS Singaraja Elly Widiani mengatakan, perjanjian kerjasama sebenarnya bisa saja diambil sesuai dengan skema

yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Entah itu skema kepesertaan yang menyesuaikan dengan anggaran, atau skema waktu yang menyesuaikan dengan anggaran.

"Kemarin kerjasama yang sudah ditandatangani itu kan kepesertaan yang menyesuaikan dengan anggaran. Kami akui itu memang cukup ramai eksisnya. Kalau nantinya mau diubah jadi waktu yang menyesuaikan anggaran, bisa saja," kata Elly melalui sambungan telepon, Selasa (7/1).

Menurut Elly, kini jumlah peserta jaminan sosial di Buleleng ada di angka 73 persen. Dampaknya, layanan prioritas seperti yang didapat saat Universal Health Coverage (UHC) tak didapat lagi. Warga pemegang KIS-PBI yang baru didaft-

arkan, tak bisa lagi langsung aktif kartunya.

"Kalau saat UHC, peserta itu bisa langsung aktif kartunya. Kalau sekarang tidak bisa. Baru bisa aktif di bulan berikutnya. Jadi setelah revisi perjanjian itu, ya baru bisa aktif terhitung pada bulan Februari nanti," kata Elly.

Bagaimana bila ada warga yang membutuhkan kartu itu dalam keadaan darurat? Elly mengatakan warga sebaiknya mendaftar sebagai peserta mandiri untuk sementara waktu. Bila nantinya perjanjian telah diperbarui, otomatis kartu itu akan dialihkan menjadi penerima bantuan iuran. Dengan catatan warga itu didaftarkan oleh pemerintah.

"Sebaiknya mendaftar di mandiri dulu. Nanti setelah addendum perjanjian dengan pemerintah daerah, dan namanya didaftarkan oleh pemerintah, otomatis beralih jadi penerima bantuan iuran," katanya lagi. (eps/gup)



Pungli, Kasi DLHK Dituntut Minimal

DENPASAR, Radar Bali

- Kepala seksi (Kasi) Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar, Wayan Kariana dianggap terbukti memeras pengusaha yang mengurus izin.

JPU Ni Luh Oka Arini Adikarini di muka majelis hakim yang diketuai

Wayan Gede Rumega, kemarin (7/1) menyatakan, dakwaan Pasal 12 huruf e UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP terbukti. Yakni Kariana terbukti memeras dan menerima Rp 3 juta saat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Satreskrim Polresta Denpasar. Ia pun dituntut setahun penjara dan denda Rp 10 juta subsider tiga bulan penjara.

Salah satu pertimbangan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan nilai kerugian yang ditimbulkan terdakwa kurang dari Rp 5 juta. "Terdakwa bersikap sopan, mengakui bersalah dan mempunyai tanggungan keluarga," ungkap JPU Oka.

Atas tuntutan itu, terdakwa melalui kuasa hukumnya Warsa T. Bhuana, I Gede Bina dkk mengajukan pledoi secara lisan. Pengacara terdakwa menyatakan, terdakwa tidak ada meminta atau melakukan pemerasan, tidak ada niatan meminta dana pada pengurus izin. "Kami minta terdakwa dihukum ringan-ringannya karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga," ujar pengacara terdakwa. (san/yor)



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

Wayan Kariana



Sengketa Tanah Sumberkima Masih Alot

Terkait Aset 1,4 Hektare Milik Pemprov

GEROKGAK, *Radar Bali* - Masalah aset jadi satu di antara temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Per-

wakilan Provinsi Bali, belum ada titik temu solusi. Tanah seluas 1,4 hektare yang ditempati warga Dusun Sumberpao, Desa Sumberkima, Gerokgak, Buleleng, ini masih jadi sengketa.

Pemprov Bali melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan BPKAD Provinsi

Bali sudah ketiga kali bertemu warga Dusun Sumberpao. Pihak pemprov meminta melakukan pengosongan terhadap aset tersebut.

Walhasil, sebanyak 32 kepala keluarga (KK) tak kunjung menyetujui

► Baca *Sengketa...* Hal 7

Disebut Tidak Ada Kontribusi

■ SENGKETA...

Sambungan dari hal 1

Warga bersikukuh telah menempati lahan tersebut sudah puluhan tahun.

Kali ini Pemprov Bali pun kembali bertemu warga Dusun Sumberpao, Sumberkima, Gerokgak. Pertemuan dilakukan di Kantor Satpol PP Buleleng, Selasa kemarin (7/1).

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam lebih pemerintah provinsi Bali mengeluarkan surat peringatan (SP) III, agar segera warga mengosongkan lahan tersebut.

"Ini sudah jadi temuan BPK, karena aset tersebut meski ditempati warga, namun tak ada hasil sama sekali puluhan tahun. Sehingga hari ini kami keluaran SP III" papar Kasatpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi.

Menurut Rai, pihaknya sudah mengeluarkan surat peringatan (SP) I dan SP II, ditujukan kepada warga. Tetapi surat tersebut tak respons. Boleh warga menempati lahan tersebut, namun tetap harus membayar sewa lahan seluas 1,4 hektare. "Jika warga tetap bersikukuh menempati lahan tersebut,

tetap kami ambil tindakan tegas yakni menggusur," ucapnya.

Rai menambahkan bahwa pemprov agar mengosongkan lahan tersebut sebenarnya adalah penegakan peraturan daerah terkait masalah aset. Itu tertuang dalam amanat peraturan daerah Provinsi Bali No. 7 tahun 2018 tentang penggunaan lahan aset pemprov maka masyarakat wajib memiliki izin pemprov dan aturan yang menyertainya (sewa menyewa) bagi yang memanfaatkan lahan/tanah. "Kami berharap setelah pertemuan warga mentaati aturan tersebut, namun apa tawaran warga memberikan batas waktu selama sebulan untuk rembuk kembali terkait aset tersebut. Kami tetap menunggu, sembari menunggu kebijakan Gubernur Bali," jelasnya.

Sementara itu, Mulyadi Putra, sebagai perwakilan warga Dusun Sumberpao, Desa Sumberkima mengatakan meski dikeluarkan surat SP III oleh Pemrov Bali. Warga Sumberpao menolak untuk mengosongkan lahan tersebut. Jika dilakukan pengusuran warga tetap bertahan di lahan seluas 1,4 hektare.

"Kami meminta diberikan waktu selama sebulan untuk warga rembuk kembali terkait lahan

tersebut. Sehingga ada solusi yang bisa kami tawarkan kepada Pemprov Bali," ungkapnya.

Mulyadi menjelaskan berbagai alasan, sehingga warga tetap ingin bertahan di lahan tersebut. Dulunya tanah itu adalah tanah rabasan warga yang mulai dibuka dan ditempati sejak tahun 1939, ditempati secara turun-temurun. Menurutnya, warga juga membayar pajak atas tanah tersebut.

Saat ini ada sekitar 300 jiwa lebih yang menempati lahan tersebut. Jika pemprov tetap dengan menggusur, maka harus mempertimbangkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sana. Karena sebagai besar masyarakat hidup sebagai petani.

Mediasi ini seharusnya mencari jalan keluar, kalau ingin disewakan lahan berapa besaran sewa yang dikeluarkan masyarakat. Namun tetap melihat faktor kondisi sosial masyarakat dan kondisi lahan.

"Saya berharap pemprov bijaksana dan dapat memberikan rasa keadilan hak atas tanah terhadap para petani yang menempati lahan tersebut," ungkap Mulyadi.

Di sisi lain, Kepala UPT Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Aset Provinsi Bali, Ketut Nayaka,

menyebut rencana pemprov untuk lahan seluas 1,4 hektare di Sumberpao, Sumberkima, ini sebagai lahan pertanian. Selama ini masyarakat menggarap tanah tersebut, namun menurutnya tidak kontribusi kepada pemerintah daerah.

Sedangkan secara angka dari luas 1,4 hektare nilai aset bisa dilihat dari nilai pasaran tanah di aset tersebut. Sekarang per arenya mencapai Rp 30 juta. "Karena ini sudah menjadi temuan BPK, dari sana kami bergerak. Bukan lahan itu saja, tetapi semua aset milik pemprov jika tidak sesuai dengan ketentuan. Maka kami akan lakukan penertiban terhadap aset-aset itu" ucapnya.

Diakui Nayaka, warga sebenarnya sempat membayar retribusi pada tahun 1980-an silam. Warga yang menempati lahan tersebut juga sempat mengusulkan permohonan tanah aset tersebut, namun ditolak pemprov. "Sejak itu warga tidak pernah membayar kontribusi atas aset tersebut," bebernya.

Nayaka menambahkan jika nanti ada rencana warga ingin menyewa lahan tersebut. Nilai sewanya tetap mengacu pada Pergub dan Perda Bali sesuai klasifikasi. (uli/pit)

Edisi : Rabu, 8 Januari 2020

Hal : 1 dan 7



Kuasa Hukum Curiga Ada Keterlibatan Pelaku Lain

● Sidang Penggelapan Pajak Hotel Hanging Garden

GIANYAR, TRIBUN BALI - Sidang perdana kasus penggelapan pajak Hotel Hanging Garden, Payangan, Gianyar senilai Rp 13 miliar dengan terdakwa tunggal, Arif Muhammad Lutfi, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, Selasa (7/1).

Pihak korban, Ade Chairani Nursafitri yang juga kakak kandung terdakwa, melalui pengacaranya berharap pengadilan bisa membongkar kasus ini. Sebab diduga, pelakunya lebih dari satu orang.

Kuasa hukum korban, IGN Wirabudiasa Jelantik SH, mengatakan, pengadilan harus membongkar pelaku-pelaku penggelapan ini. Sebab yang menjadi korban bukan hanya uang negara, tetapi juga perusahaan.

Ia menduga ada pelaku lain berdasarkan kejanggalan-kejanggalan yang tampak nyata. Satu di antaranya adalah rentang waktu. Di mana hotel ini dituding menggelapkan pajak sekitar tiga tahun, dari Oktober 2015 sampai November 2017.

Padahal dari segi aturan pembayaran pajak, kata dia, ketika seseorang terlambat membayar pajak selama tiga bulan saja, maka sudah diberikan Surat Peringatan (SP1). Namun dalam kasus ini, pihak Hanging Garden baru diberikan SP1 pada tahun 2018.

"Kami punya resi pajak. Kami selama tiga tahun tidak terima teguran, dan tahun 2018 ada SP katanya kami nunggak pajak," ujar

Wirabudiasa.

Ia tidak mengatakan terdakwa tidak bersalah. Namun hanya berharap pengadilan bisa mengungkap pelaku-pelaku lain. "Semoga dalam persidangan pelaku-pelaku lain terungkap. Kami sudah siapkan bukti-bukti untuk mengungkap kejanggalan ini," tandasnya.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Kejari Gianyar, Ni Made Widyastuti, disebutkan terdakwa Arif Muhammad sejak Oktober 2015 sampai November 2017 telah menggelapkan uang pembayaran pajak Hotel Hanging Garden. Atas perbuatannya, korban selaku Direktur PT Buahhan (induk Hotel Hanging Garden) mengalami kerugian Rp 13 miliar lebih.

Pada 12 Oktober 2013, korban membuka rekening PT Buahhan di Bank CIMB. Saat itu ia memberikan surat kuasa pada terdakwa, yang merupakan adik kandungnya untuk mengelola dan melakukan transaksi atas rekening tersebut, yang salah-satunya digunakan untuk membayar pajak restoran, hiburan Spa, serta pajak Hotel Hanging Garden.

Dalam pembayaran pajak tersebut, terdakwa mengambil uang dari rekening PT Buahhan, dan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar ke BPKAD Gianyar, ia dibantu oleh konsultan pajak PT Buahhan, Wyan Tagel Wira Prasasta yang kini berstatus sebagai saksi. Namun Arif Muhammad hanya menjalankan tugas selama setahun. (weg)



Pemkab Genjot Pungutan Pajak Pedagang Omset Rp 5 Juta

● Target PAD Tabanan 2019 Meleset 13 Persen

TABANAN, TRIBUN BALI

- Pemkab Tabanan akan menggenjot pungutan pajak kepada pedagang yang memiliki omset Rp 5 juta ke atas. Sebab di tahun 2019, 13 persen target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak, meleset. Penyebabnya, ada beberapa faktor, seperti tak optimalnya pungutan pajak dan pendapatan retribusi di Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang menurun hingga Rp 40 miliar lebih.

Khusus untuk realisasi peningkatan pendapatan dari wajib pajak pedagang, Pemkab akan menggandeng pihak desa untuk melakukan pendataan.

Selain menarget pedagang, Pemkab juga akan melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Karena selama ini belum pernah ada penyesuaian dalam waktu kurang lebih tujuh tahun.

Dengan beberapa program ini, target PAD Rp 450 miliar di 2020 optimis tercapai. Sebaliknya, jika Pemkab masih menerapkan pola yang sama atau stagnan seperti sebelumnya, target tak akan pernah tercapai.

"Ada beberapa faktor yang menyebabkan target PAD 2019 tak tercapai. Salah satunya adalah penurunan pendapatan di DTW andalan di Tabanan hingga Rp 40 miliar," kata Kepala Bapelitbang Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja, Selasa (7/1).



TRIBUN BALI/MADE PRASETIA ARYAWAN

"Tingkat orang belanja juga menurun, praktis pajak juga menurun. Ini faktor yang hampir dirasakan semua daerah

Ida Bagus Wiratmaja

Kepala Bapelitbang Tabanan

Wiratmaja menjelaskan, penurunan pendapatan dari DTW disebabkan turunnya jumlah kunjungan ke Bali, khususnya Tabanan karena beberapa dampak seperti bencana alam. Selain itu, juga dampak dari isu kese-

hatan seperti virus dan tingkat kriminalitas yang cukup banyak.

"Tingkat orang belanja juga menurun, praktis pajak juga menurun. Ini faktor yang hampir dirasakan semua daerah," ujarnya.

Namun, kata dia, selain DTW ada beberapa faktor yang menyebabkan PAD tak tercapai. Seperti kurang optimalnya pemungutan pajak PBB P2, BPHTB, dan PHR. Termasuk juga pungutan pajak kepada pedagang yang memiliki omset Rp 5 juta ke atas.

Khusus untuk pendapatan dari sektor pajak, selain telah dibentuk pokja, juga akan dilakukan pendataan potensi wajib pajak baru seperti pedagang yang memiliki omset Rp 5 juta ke atas per bulan. Untuk pendataan ke 133 desa di Tabanan, akan disiapkan petugas di desa didampingi dua orang dari Pemkab.

"Pungutan ini sudah ber-

laku sejak lama atau sejak Perda Nomor 23 tahun 2011 tentang Pajak Restoran diterapkan pada 2011 lalu. Hanya saja, pelaksanaannya kurang optimal," ungkapnya.

Wiratmaja melanjutkan, selama ini wajib pajak yang taat membayar rata-rata 60-70 persen saja. Hal itu disebabkan oleh belum adanya sanksi untuk wajib pajak yang telat membayar pajak. Namun untuk ke depannya, bagi pengusaha yang membandel akan dipasang stiker bahwa usaha tersebut tidak taat membayar pajak. Kalau stiker dicabut, ada sanksi hukum. Karena di stiker dilengkapi dengan barcode.

"PAD bukan tujuan, melainkan rutinitas yang harus dilakukan. Bagi saya angka Rp 450 miliar itu tidak masalah, namun harus ada pola yang dibangun oleh pemungut, kalau tetap dengan standar yang sama seperti saat ini, ya sama saja," ucapnya. (mpa)



Komisi II Soroti Revitalisasi Pasar Semarapura

Bertahun-tahun Tak Kunjung Tuntas

Semarapura (Bali Post) -

Proses revitalisasi Pasar Semarapura yang tidak kunjung tuntas memantik persoalan yang perlu diberikan solusi elegan. Terlebih, melihat masalah kepemilikan kios yang sangat rumit. Hal itu membuat masalah di sana tak kunjung tuntas. Atas permasalahan itu, Komisi II DPRD Klungkung memanggil Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Klungkung beserta pengelola pasar, Selasa (14/1) kemarin.

Kepala Dinas Koperasi Wayan Ardiasa mengatakan ada empat pasar yang dikelola langsung Pemkab Klungkung yakni Pasar Mentigi, Pasar Kusamba, Pasar Galiran termasuk Pasar Semarapura. Khusus persoalan Pasar Semarapura, Ardiasa mengakui belum bisa menyelesaikan masalah kepemilikan kios hak milik di atas hak milik. Ini salah satu kunci persoalan. Akibatnya, proses revitalisasi Pasar Semarapura itu menjadi terhambat. Dia mengaku sudah menindaklanjuti persoalan itu dengan meminta pendapat hukum dari kejaksaan. Dia berharap hal itu bisa menjadi pembuka penyelesaian persoalan revitalisasi pasar yang sudah

menjadi masalah menahun.

Ketua Komisi II DPRD Klungkung Wayan Misna mengatakan rapat kerja ini sebagai langkah lembaga dewan menggali seluruh persoalan pengelolaan pasar, dan bagaimana cara pemerintah daerah menyelesaikannya. Seperti kasus revitalisasi Pasar Semarapura, pihaknya juga ingin mendengar langsung seperti apa kendalanya, sehingga lembaga dewan bisa bersama-sama mendorong berbagai langkah solusi untuk segera menuntaskannya. Mengenai langkah eksekutif meminta pendapat hukum kepada kejaksaan, politisi PDI-P ini mengaku sangat mendukung.

"Titik persoalannya adalah

masih adanya kios hak milik di atas aset hak milik pemerintah daerah. Jadi, hak milik di atas hak milik. Ini membuat revitalisasi Pasar Semarapura terus berlarut-larut," katanya.

Pendapat kejaksaan dibutuhkan pemerintah daerah, karena mengalami kebuntuan ikhwal adanya kepemilikan kios itu. Karena sebelumnya ada perjanjian antara pedagang dengan pemerintah daerah tahun 1995.

Pasar Semarapura ini ada sebanyak 18 unit gedung. Seluruhnya sudah masuk daftar aset Dinas Koperasi Klungkung. Blok A sudah sesuai dengan hak sewa. Kemudian dari blok B sampai blok F jumlahnya 561 kios. Semua statusnya masih hak milik

terdiri 348 orang pemilik. Dari Blok B sampai Blok F, seluruh kios itu statusnya memang hak milik, tetapi yang menjadi persoalan adalah kios hak milik itu berdiri di atas tanah aset Pemkab Klungkung. Inilah yang harus diselaraskan kembali dengan pedagang, agar dipahami dan bisa dimaklumi. Sebab, jika ini terus dibiarkan maka akan terus menjadi temuan BPKP.

Dia berharap pendapat hukum dari kejaksaan bisa memberi solusi, terkait kebuntuan langkah pemerintah daerah melakukan proses revitalisasi pasar. Pihaknya mengaku akan terus mengawal persoalan ini dan mendukung penuh upaya-upaya pemerintah daerah. Namun, konsentrasi pengelolaan pasar jangan hanya terpusat di Pasar Semarapura saja. Tetapi juga di tiga pasar lainnya, agar seluruhnya tertata dan memberi rasa nyaman kepada pedagang maupun masyarakat. (kmb31)



PERBEKEL PUN BERANI KORUPSI

KEPALA Desa Pemecutan Kaja, Denpasar, Senin (13/1), ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Penetapan ini menambah daftar kepala desa atau yang di Bali disebut perbekel terjerat kasus korupsi. Sejak tahun 2014 ada lima kepala desa di Bali yang diproses hukum khusus tindak pidana korupsi. Ada gejala kini perbekel mulai berani korupsi, tindak pidana yang umumnya dilakukan pejabat yang lebih tinggi jabatannya.



KEPALA DESA DI BALI TERJERAT KORUPSI

- Januari 2014 Kepala Desa Bungamekar Klungkung I Ketut Tamtam diduga Korupsi dana Gerbangsadu Rp 449 Juta
- 2015 Kepala Desa Satra Klungkung Ni Made Ratnadi Korupsi APBDes senilai Rp 1,43 Miliar
- September 2018 Kepala Desa Baha Mengwi Badung I Putu Sentana diduga Korupsi APBDes Rp 1 Miliar
- Januari 2019 Kepala Desa Celukan Bawang Grogak Buleleng Muhammad Ashari diduga korupsi pembangunan Kantor Desa senilai Rp 194 juta
- Januari 2020 Kepala Desa Pemecutan Kaja

Anggaran Dana Desa di Bali

2015	185,4 Miliar
2016	416,26 Miliar
2017	537,26 Miliar
2018	530,17 Miliar

● 2019 : 630.189.586.000
● 2020 : 657.798.211.000

Jumlah Desa
636

Modus Korupsi Dana Desa

Markup proyek fisik Markup Pembelian ATK Membuat Perjalanan Dinas Fiktif Membuat proyek Fiktif Pematangan Dana Desa Peminjaman Dana Desa untuk Kepentingan Pribadi

Data Indonesia Corruption Watch menyebutkan kini pelaku korupsi kepala desa meningkat cukup tajam. Tahun 2015 hingga 2018 saja di seluruh Indonesia ada hampir 231 kepala desa yang terseret korupsi. Sementara Presiden Jokowi menyodorkan angka yang lebih besar yakni 900 kades korupsi. Ada gejala, meningkatnya jumlah kades tersangkut korupsi terjadi sejak alokasi dana desa yang demikian besar.

Akademisi FISIP Unud I Made Anom Wiranata, S.I.P., M.A. menyebutkan, secara umum korupsi terjadi apabila tak ada kontrol dan pengawasan melekat. Dalam

konteks desa, memang ada lembaga perwakilan yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai pengawas. Sayangnya anggota BPD ini, kata Anom, lebih banyak orang-orang dekat kades. "Warga desa sering tidak mengetahui siapa wakil mereka di BPD," kata Anom yang baru saja menyelesaikan program doktoralnya ini.

Di sisi lain, lanjut Anom, makin beraninya perbekel korupsi juga karena faktor jumlah alokasi dana desa yang cukup besar, tetapi pengawasannya sangatlah lemah.

Hal. 11
Sistem Elektoral



I Nyoman Mardika



Anom Wiranata

Dari Hal. 1

"Tidak mungkin, BPK dan BPKP turun ke semua desa. Akibatnya potensi korupsinya tinggi," tegasnya. Pemilihan perbekel yang menggunakan sistem elektoral juga berperan dalam mendorong perbekel korupsi karena pemilih yang pragmatis.

Dalam pandangan pengiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) I Nyoman Mardika, desa saat ini mengelola anggaran yang begitu besar. "Berdasarkan Permendagri 20/2018 adalah kuasa penggunaan anggaran dalam mengelola keuangan desa," katanya.

Sistem Elektoral

Karena itu, kata Mardika, perbekel berkewajiban melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Transparansi menjadi hal yang wajib.

Dengan dana yang cukup besar, kata Mardika, seharusnya tidak ada lagi pungutan-

pungutan oleh desa. "Sehingga kasus yang menyeret Perbekel Pemecutan Kaja sangat disayangkan," tegasnya. Apalagi berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perbekel tidak diperkenankan melakukan pungutan. (ata)

Edisi : Rabu, 15 Jan 2020

Hal : 11



RS Nyitdah Terima DAK Pusat Rp65 M

Tabanan (Bali Post) -

Pembenahan terus dilakukan rumah sakit Nyitdah di Kecamatan Kediri pascamendapatkan akreditasi tipe C. Salah satu yang akan digarap untuk bisa melayani masyarakat secara prima, yakni membangun Unit Gawat Darurat (UGD) di tahun 2020. Sumber anggaran pendirian UGD tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dinas Kesehatan sendiri mendapat kucuran dana bantuan pusat Rp65 miliar untuk melanjutkan pembangunan RS Nyitdah itu. Tetapi, sejauh ini masih tahap lelang manajemen konstruksi.

Direktur UPT Rumah Sakit Nyitdah, dr. Nyoman Wisma Berata, mengatakan jika memang benar di tahun 2020 untuk di RS Nyitdah itu dibangun UGD untuk bisa memberikan layanan

maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana pembangunan berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Benar, rencananya memang akan dibangun UGD sesuai usulan ke Kemenkes," ujarnya. Selasa (14/1) kemarin.

Lokasi UGD itu nantinya kata dr. Wisma Berata berada di bagian tengah. Meski diakuinya memang saat ini di RS Nyitdah sudah ada UGD-nya. Hanya belum memenuhi syarat dan kapasitasnya kecil, karena itu digunakan untuk pelayanan *emergency* kandungan.

Untuk gedung UGD yang rencananya dibangun itu sifatnya umum. Namun, anggaran Rp35 miliar yang diperuntukkan membangun UGD tersebut hanya sebatas penyediaan gedung saja, tanpa peralatan penunjang. Dimana gedung utara dan

selatan akan tertutup dengan UGD. Dari *master plan* awal, UGD yang rencananya dibangun lantai tiga, hanya bisa dibangun lantai satu saja, karena keterbatasan anggaran. "Yang dibangun hanya lantai satu saja, agar UGD bisa berjalan, lantai dua dan tiga struktur saja," terang Wisma Berata.

Setelah UGD yang baru sudah terbangun, UGD lama akan digunakan khusus untuk pelayanan kandungan dan kebidanan. Saat ini pembangunan UGD masih persiapan tender. Karena harus ada tender konsultan. Sekarang sedang berproses lelang manajemen konstruksi. Intinya persiapan manajemen tender konstruksi. "Mudah-mudahan akhir Januari sudah ada proses tender dan ada pemenang manajemen konstruksi," harapnya.

Kepala Bapelitbang Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja, pernah menyampaikan Dinas Kesehatan mendapatkan kucuran dana dari pusat sebesar Rp65 miliar. Dana itu untuk melanjutkan pembangunan RS Nyitdah. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan kucuran DAK tahun sebelumnya. "Ini mungkin yang dimaksud hadiah Presiden Jokowi, karena tumben dapat DAK sebesar ini, biasanya paling banyak Rp25 miliar," ungkap Wiratmaja.

DAK itu, kata Wiratmaja, akan digunakan membangun gedung baru melengkapi gedung yang sudah ada. Selain bantuan dari pusat, juga diharapkan adanya hibah provinsi untuk melanjutkan pembangunan di RS Nyitdah, sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal. (kmb28)



Jelang Launching, Bupati Artha Tinjau Pembangunan RSU Negara



• NUSABALI/IB DIWANGKARA

BUPATI I Putu Artha meninjau pembangunan gedung baru di RSU Negara, Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Jembrana, Selasa (14/1).

NEGARA, NusaBali

Pembangunan enam gedung baru di RSU Negara yang menelan APBD Jembrana sebesar Rp 178 miliar dengan pola rancangan bangun tahun jamak 2018-2019, telah rampung. Rencananya, berbagai fasilitas baru di RS milik Pemkab Jembrana ini akan diluncurkan pada Februari mendatang. Guna memastikan kesiapan jelang launching, Bupati Jembrana I Putu Artha meninjau sejumlah gedung baru tersebut, Selasa (14/1).

Bangunan pertama yang ditinjau Bupati Artha adalah gedung instalasi gawat darurat (IGD) berlantai tiga. Pada lantai satu IGD dikhususkan untuk tempat pelayanan pasien kedaruratan. Sedangkan lantai di atasnya, ruang operasi dan penyembuhan pasien. Di gedung ini juga sudah disediakan lift untuk memudahkan pasien. Guna menunjang pelayanan dan kecepatan penanganan, tersedia 9 kamar operasi dari sebelumnya 4 kamar. Sementara kamar ICU, disiapkan sebanyak 10 kamar, dan sementara baru difungsikan 5 kamar lantaran masih menunggu kesiapan pemasangan alat penunjang medis.

Setelah dari gedung IGD, pengecekan ke gedung rawat inap pasien kelas 1, kelas 2, kelas 3,

serta VIP. Gedung rawat inap yang berada di areal belakang RSU, ini sudah difungsikan 100 persen. Bahkan tingkat kunjungan pasien, disebutkan sudah melonjak, dan tingkat hunian kamar sudah mencapai 80 persen. Di samping mengecek kondisi gedung, Bupati Artha juga mengamati pelayanan, dan menyoroti antrean panjang di tempat kasir dan pemesanan obat di ruang instalasi rawat inap kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3. "Ini harus dijadikan evaluasi. Masyarakat banyak mengantre. Apakah sisi pelayanannya yang lambat karena protap tidak berjalan atau karena minimnya jumlah tenaga pendukung. Ini saya minta di-

perhatikan," ujar Bupati Artha, di hadapan Direktur RSU Negara dr I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata.

Bupati Artha menekankan kepada pejabat struktural dan fungsional di RSU Negara, agar gedung RSU Negara yang kini lebih nyaman dan megah, ini harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan. Hal itu berlaku untuk seluruh jajaran pegawai RSU di semua bidang. "Fasilitas RSU ini saya rasa sudah sangat lengkap dan nyaman. Tinggal imbangi dengan pelayan yang baik dan ramah. Percuma gedungnya bagus kalau pelayanan diberikan tidak bagus. Rumah sakit harus responsif ketika terjadi keluhan masyarakat," ucapnya.

Direktur RSU Negara dr I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata, menjelaskan enam gedung baru yang baru saja selesai dibangun adalah gedung IGD, poliklinik, laboratorium, bedah sentral, rawat inap kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas VIP. Realisasi fisik seluruh gedung baru sudah 100 persen, tinggal masa pemeliharaan. Selain membangun gedung baru, juga dilakukan penataan halaman parkir yang kini lebih luas. Sebelumnya parkir RSU Negara sering memaknai badan jalan.

"Untuk pemanfaatan seluruh gedung yang baru, ini kami sedang proses perpindahan layanan maupun alat-alat. Kami perlu mengatur kembali, karena layanan rumah sakit tetap jalan saat proyek pembangunan," ujar Oka Parwata. **ode**



Pemkab Badung Validasi Data Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan



WAKIL Bupati Badung I Ketut Suiasa memimpin rapat membahas validasi data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, di Puspem Badung, Selasa (14/1).

MANGUPURA, NusaBali

Pemerintah Kabupaten Badung melakukan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Validasi data ini ditargetkan rampung akhir Januari 2020, sehingga Badung benar-benar memiliki data akurat terkait kepesertaan penduduk Badung di BPJS Kesehatan.

"Dengan data yang valid, akan lebih efektif dalam penggunaan anggaran APBD untuk pembayaran BPJS Kesehatan," kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung I Made Wira Dharmajaya di Puspem Badung, Selasa (14/1).

Wabup Suiasa mengatakan

langkah validasi data PBI BPJS Kesehatan ini untuk mendapatkan data pasti yang nanti berdampak langsung pada kepastian anggaran dalam APBD. Diakui data PBI BPJS yang tercatat 256 ribu jiwa lebih belum rasional dibandingkan jumlah penduduk Badung yang mencapai 488 ribu jiwa. "Artinya ada 50 persen warga yang kita biayai dari APBD. Padahal bila bicara logika, jumlah pengangguran sedikit begitu pula KK miskin juga menurun. Karena itulah kita inginkan dana APBD ini agar efektif sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Sehingga dana-dana ini berapa sebenarnya yang layak dan patut kita anggarkan," jelasnya.

Sebelum mengeksekusi pembayaran pada Februari 2020 nanti, Wabup Suiasa menginginkan data yang pasti dan valid. Untuk itu semua perangkat daerah terkait diajak bekerja, sehingga di akhir Januari 2020 ini sudah valid memiliki data yang sebenarnya. Setelah itu, di internal baru melakukan komparasi dengan apa yang dimiliki BPJS.

"Tugas kita yaitu validasi data per sektor dulu. Data tersebut dibawa ke Kominfo untuk dibuatkan data kolektor. Dengan demikian, kita dapat melihat data riil dan itulah yang nanti kita bicarakan dengan BPJS untuk penganggarannya lebih lanjut," tandasnya. **asa**



V

Peserta KIS Di-"cover" 100 Persen

Dewan Rekomendasikan Perubahan Pembayaran PBI Daerah

Singaraja (Bali Post) -

Persoalan akibat dicabutnya 134.691 warga kurang mampu pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) akhirnya terselesaikan. Seluruh peserta KIS tetap ditanggung sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah (APBD) sampai 7 bulan tahun ini. Bupati Buleleng diminta melakukan perubahan (*addendum*) perjanjian kerja sama (PKS) dengan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) terkait pembayaran iuran PBI daerah.

Demikian diputuskan dalam rapat koordinasi (rakor) Badan Anggaran (Banggar), Komisi IV DPRD dan Pemkab di gedung dewan, Senin (6/1) kemarin. Rakor dipimpin Ketua Banggar Gede Supriatna didampingi Wakil Ketua Ketut Susila Umbara dan Gede Suradnya. Sementara dari Pemkab hadir Sekda Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. Rakor ini secara khusus mendapat atensi anggota Komisi IV DPRD Bali Putu Mangku Mertayasa.

Ketua Banggar Gede Supriatna mengatakan, gejala yang belakangan muncul di masyarakat menjadi pengalaman yang tidak boleh terulang untuk kedua kalinya. Dia pun menyebut tidak ada alasan bagi pemerintah tidak memberikan jaminan kesehatan kepada warga miskin. Sebab, masalah kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. "Jaminan kesehatan ini adalah kebutuhan masyarakat dan jangan lagi kita membebani masyarakat. Jangan sampai masyarakat sakit karena tidak bisa berobat ke rumah sakit.

Masalah kekurangan anggaran kita carikan jalan keluarnya," katanya.

DPRD menyepakati menerbitkan rekomendasi kepada Bupati Putu Agus Suradnya. Rekomendasi itu meminta agar Bupati melakukan perubahan (*addendum*) PKS pembayaran KIS PBI daerah dengan menggunakan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp97 miliar. Alokasi dana sebanyak itu untuk meng-cover seluruh warga miskin pemegang KIS PBI daerah dan sudah dihitung dengan keputusan pemerintah yang menaikkan tarif iuran BPJS. Dengan perubahan itu, pihaknya memastikan tidak ada kepesertaan KIS yang dicabut. Sementara karena beban kenaikan tarif itu, maka anggaran yang sudah dipasang dalam APBD itu hanya cukup sampai 7 bulan di tahun ini. Kebutuhan anggaran untuk tiga bulan lagi, pemerintah bersama DPRD telah menyepakati untuk melakukan penyesiran sumber anggaran yang akan dibahas dalam APBD perubahan mendatang.

Sekda Buleleng, Ir. Dewa Ketut Puspaka, mengatakan untuk memenuhi kekurangan anggaran iuran PBI untuk tiga bulan nanti, dalam lima bulan ke depan pemerintah melakukan penyesiran alokasi angga-

ran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Program yang tidak urgen dipastikan anggarannya akan dievaluasi. Bahkan, Puspaka mengisyaratkan kalau ke depan akan ada rasionalisasi anggaran, salah satunya dana perjalanan dinas.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Bali, Putu Mangku Mertayasa, mengatakan persoalan kekurangan anggaran iuran PBI daerah ini harus disikapi dengan serius, karena menyangkut pemenu-

han hak dasar masyarakat. Untuk itu, kekurangan anggaran wajib dipenuhi dengan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan yang lebih bermanfaat. "Kalau untuk *sharing* PBI Provinsi, kami tidak meragukan komitmen Pak Gubernur. Harapannya di daerah pun sama dan untuk pemenuhan anggaran PBI ini saya harap bisa ditutupi dengan pengalihan anggaran untuk kegiatan yang sebenarnya bisa dinomorduakan," jelasnya. (kmb38)

Edisi : Selasa, 7 Januari 2020

Hal : 10



Dewan Tunda Persetujuan Pinjaman Daerah Rp25 Miliar

Semarang (Bali Post) -

Rencana eksekutif mengajukan pinjaman daerah untuk melanjutkan pembangunan gedung RSUD Klungkung senilai Rp25 miliar, mulai dibahas lembaga dewan. Dalam rapat kerja yang digelar pekan lalu, pihak legislatif melalui Ketua DPRD Klungkung memutuskan menunda persetujuan pinjaman daerah itu. Dewan justru meminta eksekutif mengajukan LO (*legal opinion*) bagaimana perspektif hukum dari kejaksan. Bila dalam petunjuk LO itu diberikan lampu hijau dari kejaksan, barulah pihaknya dapat memberikan persetujuan lembaga dewan.

Ketua DPRD Klungkung, A.A Gede Anom, Senin (6/1) kemarin, mengatakan dalam rapat itu, pihaknya tidak dalam wilayah melarang atau memperbolehkan. Alasannya, perihal pinjaman daerah itu sudah masuk ke dalam KUA-PPAS sejak dirinya belum menjabat sebagai unsur pimpinan. Sehingga, pihaknya perlu mendapatkan LO sebagai pandangan hukum dari kejaksan. Penjelasan hukum dari kejaksan itu penting, sehingga rencana pinjaman daerah ini tidak menyalahi prosedur.

Anom mengatakan DPRD memahami pinjaman daerah tersebut

digunakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Namun, pengelolaan pinjaman daerah juga wajib taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta memenuhi prinsip kehati-hatian.

Kabag Hukum Made Sulistiwati, Senin kemarin, mengatakan sebagaimana instruksi Sekda, pihaknya sudah menyiapkan surat permohonan mengajukan LO. Hal itu sesuai ketentuan PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Sebab, pinjaman jangka menengah dan panjang itu, wajib mendapat persetujuan DPRD. Apalagi rencana pinjaman daerah ini sudah tertuang dalam RPJMD dan RKPD. Rencananya, pinjaman daerah ini digunakan pembangunan gedung perawatan pasien penyakit dalam di RSUD Klungkung. Selain itu untuk perluasan gedung perawatan pasien bedah dan pengadaan alat kesehatan, dengan nilai pinjaman senilai Rp25 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dewa Putu Griawan, mengakui rencana pinjaman ini, sudah masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah). Selain itu, juga sudah masuk RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Sehingga, otomatis juga masuk ke dalam APBD Induk 2020. Proses selanjutnya tinggal menunggu persetujuan dalam wujud keputusan dari lembaga dewan.

"Sesungguhnya, rencana pinjaman ini sudah muncul dalam KUA-PPAS. Karena saat itu masa peralihan dari anggota dewan lama ke dewan terpilih, pada poin ini belum sempat diparipurnakan," katanya.

Pembahasan itu, seharusnya dilakukan saat penyusunan KUA-PPAS awal Agustus tahun lalu. Tetapi malah terlewatkan, inilah yang menjadi urgensi persoalan tersebut. Sehingga diperlukan pendapat hukum berupa LO dari kejaksan. Alasannya, untuk mengetahui apakah tidak salah, setelah penetapan, baru ada persetujuan yang dimaksud, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 16 ayat 2 PP 55 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

"Setelah nanti diperoleh persetujuan dewan. Langkah selanjutnya baru meminta pertimbangan ke Kemendagri, sebelum pinjaman daerah itu diajukan ke bank yang memberikan suku bunga terendah," tegasnya. (kmb31)



Pajak

Melebihi Target

Penerimaan KPP Pratama Badung Selatan Capai Rp1,2 Triliun

PADA tahun 2019, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan menorehkan prestasi yang sangat baik dalam hal pencapaian penerimaan pajak. KPP Pratama Badung Selatan dapat merealisasikan penerimaan mencapai Rp1,20 triliun.

Pencapaian ini melebihi target 107,85 persen dari target Rp1,12 triliun. Untuk itu, KPP Pratama Badung Selatan mensyukurinya dengan mengadakan syukuran potong tumpeng di KPP Pratama Badung Selatan, Senin (6/1) kemarin.

Kepala KPP Pratama Badung Selatan Vincentius Sukanto didampingi Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Dewa Nyoman Sukardina mengatakan, pencapaian ini menempatkan KPP Pratama Badung Selatan di posisi kedua penerimaan pajak terbesar kedua di Bali setelah KPP Pratama Badung Utara dan peringkat ke-13 secara nasional dari

354 kantor.

"Pencapaian ini merupakan pertama kali selama 10 tahun terakhir. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Wajib Pajak (WP) yang sudah taat membayar pajak dan melakukan pelaporan. Tanpa kontribusi WP yang baik, tentu penerimaan ini tidak tercapai," ujarnya.

Secara nasional penerimaan pajak hanya 81 persen. Namun KPP Pratama Badung Selatan mampu mencapai 107,85 persen. Penerimaan ini pun mengalami pertumbuhan 31,45 persen dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak itu terdiri dari PPh (Pajak Penghasilan) dengan capaian 107 persen dan PPn (Pajak Pertambahan Nilai) dengan pencapaian 109 persen.

Penerimaan pajak yang bagus ini tidak terlepas dari sektor andalan Badung Selatan, yaitu akomodasi, makan dan minum, serta perdagangan besar yang kontribusinya cukup besar. Sektor-sektor

tersebut tidak berimbas per-ekonomian secara global.

Ia mengaku beberapa upaya khusus diakuinya harus dilakukan, yaitu pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan pelayanan yang baik, maka ada kepatuhan sukarela yang tinggi dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Kontribusi terbesar penerimaan pajak dikatakan dari hasil pelayanan, yaitu sebesar 80 persen. Strategi yang dilakukan adalah jemput bola dan juga penyisiran wajib pajak. Sedangkan dari penegakan hukum hanya 20 persen. "Teman-teman ke lapangan turun memfasilitasi pelaporan pajak para WP. Cita-cita kami bisa 100 persen pembayaran pajak dari kepatuhan pembayaran sukarela," harapnya.

Meski target pajak belum turun dari pusat, namun biasanya target pajak naik 20 persen dari penerimaan tahun sebelumnya, yaitu Rp 1,35 triliun. (ad131)



Pembebasan Lahan Shortcut Titik 7-8 dan 9-10 12 Bidang Lahan Senilai Rp 5,963 Miliar Terpaksa Diproses di PN Singaraja



Sekretaris Panitia Pengadaan Lahan Shortcut, Ngurah Mahartha Kertha.

SINGARAJA, NusaBali

Proses pembebasan lahan proyek Shortcut Titik 7-8 dan Titik 9-10 di Jalur Denpasar-Singaraja via Bedugul, masih alot. Selain ada keberatan atas nilai ganti rugi, bukti kepemilikan hak juga menjadi kendala dalam pembayaran ganti rugi. Info terakhir, ada 12 bidang lahan senilai Rp 5,963 miliar yang ganti ruginya terpaksa diproses di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

12 Bidang Lahan Senilai Rp 5,963 Miliar Terpaksa Diproses...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Panitia Pengadaan lahan saat ini masih minta petunjuk ke Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Bali dan mohon legal opinion kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja terkait permasalahan kelengkapan bukti kepemilikan lahan Shortcut Titik 7-8 dan Titik 9-10, yang berlokasi di tiga desa bertetangga kawasan Kecamatan Sukasada, Buleleng: Desa Wanagiri-Desa Pegayaman-Desa Gitgit.

Data terakhir yang dihimpun NusaBali di Badan Pertanahan Negara (BPN) Buleleng, Senin (6/1), dari 299 bidang lahan yang dibebaskan, baru 169 bidang yang dapat diproses pembayaran ganti ruginya. Sedangkan sisanya, 130 bidang lahan belum dapat diproses, karena beberapa kendala, seperti keberatan pemilik atas nilai ganti rugi dan bukti hak kepemilikan belum lengkap.

Pemilik tanah yang keberatan mencapai 12 bidang lahan, dengan nilai ganti rugi

ditaksir sebesar Rp 5,963 miliar. Karena masih bermasalah, 12 bidang lahan ini ganti ruginya diproses di PN Singaraja. Sedangkan 118 bidang lahan masih bermasalah, karena bukti-bukti kepemilikan hak belum lengkap.

Bukti kepemilikan hak ini harus disetor lengkap, agar pembayaran bisa diproses. Namun faktanya, ada beberapa bukti kepemilikan seperti sertifikat yang masih menjadi jaminan di bank. Selain itu, ada juga pemilik lahan yang tidak mampu menunjukkan bukti akta jual beli atas lahan. Bukan hanya itu, kelengkapan silsilah juga menjadi kendala, karena pelepasan hak harus dilengkapi tandatangan seluruh keluarga. Dalam hal ini, ada salah satu keluarga tidak tinggal di Bali.

Sekretaris Panitia Pengadaan Lahan Shortcut Titik 7-8 dan Titik 9-10, Ngurah Mahartha Kertha, mengatakan untuk pemilik lahan yang keberatan, proses pembayaran ganti ruginya nanti lewat konsinyasi (penitipan) di PN Singaraja.

Menurut Ngurah Mahartha, ada 12 bidang lahan yang kemungkinan proses pembayaran nilai ganti ruginya melalui PN Singaraja.

Dari 12 bidang lahan itu, kata dia, 3 bidang yang sudah resmi mengajukan keberatan ke PN Singaraja. Sedangkan 7 bidang lahan lagi menolak nilai ganti rugi, namun tidak mengajukan keberatan. Sisanya, 2 bidang lahan lagi terkendala karena bukti kepemilikan hak masih menjadi jaminan di bank.

"Namun, apa pun itu, jelas ini tidak bisa diproses. Sehingga proses pembayaran ganti ruginya nanti lewat PN Singaraja. Jadi, kami fokus dulu dengan yang setuju atas nilai ganti rugi lahan. Mereka tinggal melengkapi bukti kepemilikan lahan saja," terang Ngurah Mahartha saat dikonfirmasi NusaBali di Singaraja, Senin kemarin.

Menurut Ngurah Mahartha, terhadap persoalan kelengkapan bukti kepemilikan lahan, pihaknya masih meminta petunjuk ke Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Bali di Den-

pasar. Selain itu, juga mohon legal opinion ke Kejari Singaraja. Pasalnya, ditemukan ada beberapa kasus peralihan hak yang terjadi tahun 2013, justru tidak dilengkapi dengan akta jual beli. Dengan tidak adanya akta jual beli itu, berarti kewajiban membayar pajak tidak terpenuhi.

"Kalau kami validasi ini, kami khawatir dituduh konspirasi penggelapan pajak BPHTB. Jadi, ada persoalan hukum di situ. Makanya, kami minta petunjuk ke atasan dan mohon legal opinion ke Kejaksaan. Langkah ini agar semuanya bisa berjalan lancar," tandas Ngurah Mahartha.

Sekadar dicatat, luas lahan yang dibebaskan untuk proyek Shortcut Titik 7-8 dan Titik 9-10 mencapai 22 hektare, terbagi dalam 299 bidang tanah. Rinciannya, 175 bidang tanah di Desa Pegayaman (sisi tengah), 115 bidang tanah di Desa Gitgit (sisi utara), dan 9 bidang tanah di Desa Wanagiri (sisi selatan). Pemprov Bali mengalokasikan dana sebesar Rp 190 miliar untuk pembebasan lahan shortcut ini. **k19**



Bus Sekolah Gratis di Badung Tak Masuk Dalam APBD 2020

MANGUPURA, NusaBali

Wacana Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan bus sekolah gratis untuk antar jemput siswa sampai sekarang belum terwujud. Bahkan, yang digadang-gadang bakal direalisasikan tahun 2020 pun masih tak jelas aliás ngambang. Belakangan justru muncul kabar bila pengadaan bus sekolah gratis tidak masuk dalam APBD induk tahun 2020.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung AA Rai Yuda Darma, saat dikonfirmasi tak menyangkal bila wacana bus sekolah gratis belum dianggarkan pada tahun 2020 ini. "Sebetulnya kami sudah usulkan, tapi belum masuk dalam anggaran pada tahun ini," kata Yuda Darma, Minggu (5/1).

Namun, mantan Kabag Kesra Setda Badung ini tak patah arang. Dia berupaya mengusulkan untuk mendapatkan bantuan dari pusat. "Kami upayakan bagaimana pun caranya. Kami akan usulkan ke pusat supaya mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan bisa," harapnya.

Wacana bus sekolah gratis di Badung telah muncul sejak beberapa tahun lalu. Wacana ini sebetulnya buntut dari kurang efektifnya kendaraan pengumpan bus Trans Sarbagita di wilayah Kuta Selatan. Bersamaan dengan itu muncul usulan untuk memanfaatkan moda transportasi yang dikerjakan pihak ketiga tersebut untuk mengangkut pelajar menuju sekolah.

Semula program ini bakal direal-

isasikan tahun 2019. Namun karena ada rasionalisasi, sehingga gagal. Sempat muncul wacana dimasukkan tahun 2020, namun kembali tidak jadi prioritas.

Berdasarkan perencanaan awal, wilayah yang akan mendapatkan transportasi gratis khusus pelajar ini yakni di seluruh kecamatan di Kabupaten Badung. Tetapi pelaksanaannya dirancang bertahap. "Mungkin awal-awal kita akan pakai sebagai role model adalah kecamatan yang ada Badung Utara seperti Petang, Abiansemal, dan Mengwi. Hal itu karena kepadatan lalulintasnya masih ideal. Selanjutnya akan mencakup kecamatan yang ada di Badung Selatan (Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan)," tandasnya. **asa**



Solusi Penonaktifan 134.691 Jiwa Pemegang KIS PBI Dana Tanggungan Rp 97 Miliar Diajukan untuk 7 Bulan

SINGARAJA, NusaBali

Lembaga DPRD Buleleng, akhirnya mengeluarkan rekomendasi mengakhiri kegaduhan penonaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kelas III secara mendadak, per 1 Januari 2020. Rekomendasi itu meminta agar Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana segera membuat *addendum* terhadap perjanjian kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan, dimana anggaran pembayaran iuran dari pemerintah daerah sebesar Rp 97 miliar, sepenuhnya dipakai sampai 7 bulan ke depan.

Rekomendasi tersebut keluar, setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Buleleng menggelar rapat, Senin (6/1) pagi di ruang rapat gabungan komisi Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja. Rapat tersebut dipimpin Ketua Dewan, Gede Supriatna, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Dewa Ketut Puspaka selaku Ketua TAPD.

Dalam rapat tersebut terungkap, dana sharing antara Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng, untuk membayar iuran kepesertaan JKN bagi 317.244 jiwa warga Buleleng, belum mengacu pada kebijakan kenaikan iuran kelas III dari Rp 23.000 perbulan menjadi Rp 42.000 perbulan. Dalam APBD Induk 2020, dana sharing yang dialokasikan hanya sebesar Rp 97 miliar setahun, rinciannya Pemprov Bali sekitar Rp 49,47 miliar dan Pemkab Buleleng sekitar Rp 47,53 miliar. Padahal kalau mengacu pada kenaikan iuran untuk kelas III, maka total kebutuhan dana yang mesti dialokasikan bagi 317.224 jiwa, mencapai Rp 159,890 miliar setahun. Sehingga ada kekurangan dana sekitar Rp 62,890 miliar.

Akibat kekurangan tersebut, ter-

jadilah penonaktifan kepesertaan JKN bagi 134.691 jiwa warga Buleleng. Penonaktifan inilah yang membuat situasi gaduh, karena pemegang kartu ditolak saat berobat ke rumah sakit.

Lembaga Dewan akhirnya mengeluarkan rekomendasi agar Bupati segera membuat *addendum* terhadap PKS dengan BPJS Kesehatan. Karena dalam PKS tersebut, dana sebesar Rp 97 miliar untuk kebutuhan setahun bagi 317.244 jiwa warga Buleleng. Nantinya dalam *addendum*, dana sebesar Rp 97 miliar akan diperuntukkan sampai 7 bulan ke depan (Juli 2020). Sedangkan sisanya untuk 5 bulan berikutnya, akan dialokasikan kembali dalam Perubahan APBD tahun 2020. "Prinsip kami, jangan lagi bebani masyarakat dalam hal kesehatan, karena ini menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Masyarakat harus dilayani kebutuhan dasarnya itu, biarkan kami atau pemerintah yang memikirkan dananya," tegas Ketua Dewan, Gede Supriatna.

Sementara Ketua TAPD, Dewa Ketut Puspaka mengatakan, rekomendasi dari Lembaga Dewan itu akan dilaporkan kepada Bupati selaku pengambil kebijakan. Sedangkan masalah kekurangan dana sharing sebesar Rp 62,890 miliar, Dewa Puspaka menyatakan bakal berusaha memenuhi kebutuhan dana sharing tersebut. Dijelaskan, mengacu pada regulasi sharing dana maka Pemprov Bali memiliki kewajiban sebesar Rp 32,074 miliar, sedangkan Pemkab Buleleng sebesar Rp 30,816 miliar. "Dana sebesar Rp 30 miliar lebih itu tidak sedikit, jadi kami berusaha menyisir dananya. Kami akan utamakan dulu kebutuhan dasar, setelah itu baru kebutuhan lainnya. Bisa jadi akan ada rasionalisasi nantinya," kata Puspaka. **k19**



Tidak Bikin BUMDes, 12 Desa Terancam *Blacklist*

SINGARAJA, NusaBali

Sebanyak 12 desa di Buleleng, terancam tidak mendapat kesempatan menerima berbagai bantuan dana dari pemerintah pusat. Ini lantaran, ke 12 desa itu belum juga membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga batas akhir, Desember 2019. Padahal ke 12 desa itu telah diperingatkan agar segera membentuk BUMDes sampai akhir tahun 2019.

Kepala Dinas PMD Bule-

leng, Made Subur, mengatakan. "Bagaimana kami bisa menyalurkan dana bantuan, karena dana bantuan itu harus dikelola oleh BUMDes. Kenapa BUMDes, karena masing-masing desa sudah mengelola banyak dana, mulai dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan dana perimbangan," kata Subur.

Masih kata Subur, sejatinya pembentukan BUMDes itu tidak sulit sepanjang pihak desa punya kemauan. Karena banyak potensi yang bisa

Desa yang Belum Punya BUMDes

- Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak
- Desa Ume Jero, Kecamatan Busungbiu
- Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu
- Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu
- Desa Bubunan, Kecamatan Seririt
- Desa Gunung Sari, Kecamatan Seririt
- Desa Gesing, Kecamatan Banjar
- Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar
- Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar
- Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada
- Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada
- Desa Suwug, Kecamatan Sawan

leng, Made Subur dikonfirmasi Senin (6/1) tidak menampik masih ada 12 desa yang belum memiliki BUMDes. Terhadap desa-desa yang belum memiliki BUMDes tersebut, pihaknya sulit melayani pengajuan bantuan dana ke pemerintah pusat. Padahal sudah ada dana bantuan sebesar Rp 300 juta yang siap diberikan kepada masing-masing desa yang telah membentuk BUMDes. Dana tersebut bersumber dari DAPM yang dikelola oleh

saja penyedia ATK, tetapi bisa juga biro jasa," tandasnya.

Menurut informasi di-himpun, desa yang belum membentuk BUMDes karena desa tersebut kesulitan menemukan potensi yang dikelola oleh BUMDes. Di samping itu, pihak desa juga kesulitan mencari SDM untuk mengelola BUMDes. Masalahnya, pendapatan yang diberikan tidak sesuai dengan tanggungjawab dalam mengelola BUMDes, yang belum memberikan pendapatan pasti. **k19**



49 Ribu Peserta PBI Dipangkas

Tak Lagi dapat Jaminan Kesehatan Gratis

TABANAN, Radar Bali- Pemerintah kabupaten Tabanan melakukan pemangkasan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari kelompok Peserta Bantuan Iuran (PBI). Jumlahnya 49 ribu lebih. Pemangkasan dilakukan lantaran Pemkab tidak mampu meng-cover pembayaran peserta BPJS dari PBI karena kenaikan iuran PBI dari yang semula Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu.

Pemangkasan kepesertaan pun menimbulkan gejolak. Kemarin (6/1) Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RS Tabanan dan BPJS Kesehatan untuk menyamakan persepsi terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kepesertaan PBI yang menjadi tanggungan pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr. I Nyoman Suratmika mengakui masih ada permasalahan dalam proses penganggaran kepesertaan BPJS Kesehatan dari PBI. Pasalnya, pemerintah provinsi

Bali hanya mau meng-cover dana subsidi sebanyak 73.324 peserta dari total peserta PBI yang mencapai 122.388. "Pemkab sebenarnya sudah siap, cuman dari pihak Pemprov hanya menyetujui 73.324 peserta, sehingga terpaksa ada pemangkasan peserta PBI," jelas Suratmika kemarin.

Untuk bisa mengcover biaya iuran peserta PBI di Tabanan dengan jumlah awal 122.388 peserta dengan nilai iuran Rp 42 ribu, Pemkab Tabanan harus menyiapkan dana sebesar Rp 61 miliar per tahun melalui sharing anggaran. Di antaranya 49 persen dibayarkan Pemkab Tabanan dan 51 persen dianggarkan provinsi Bali. Nilai anggaran untuk Pemkab Tabanan dari 49 persen ini mencapai Rp 30,2 miliar. Nah, 51 persen yang dianggarkan provinsi Bali Rp 31,4 miliar. "Tapi sesuai surat Sekda provinsi Bali tertanggal 17 Desember 2019, Tabanan hanya mendapat jatah 73.324 peserta PBI untuk dicover," kata Suratmika.

Dari 122.388 peserta PBI dipangkas hingga 49 ribu peserta PBI yang tidak lagi mendapatkan hak jaminan kesehatan gratis. Sementara untuk jumlah peserta 73.324 PBI, anggaran

yang disiapkan mencapai Rp 36,9 miliar berupa sharing anggaran, 49 persen senilai Rp 18,224 miliar untuk Pemkab Tabanan, dan 51 persen dengan nilai Rp 18,847 miliar untuk provinsi Bali per tahun. "Letak permasalahannya adalah pada kenaikan iuran, orang tidak punya uang bagaimana mau menganggarkan dana sesuai dengan data 2019 lalu. Nyatanya provinsi hanya memberikan jatah segitu (73 ribu) untuk Tabanan," ungkapny.

Untuk bisa mengcover peserta yang tidak masuk PBI, Pemkab Tabanan harus menyiapkan dana tambahan sebesar Rp 24 miliar lebih per tahun sehingga peserta PBI yang mencapai 122.388 peserta itu bisa tercover seperti di tahun sebelumnya.

Pemangkasan kepesertaan PBI menjadi tugas dan kewenangan dari Dinas Sosial Tabanan. "Itu tupoksi dari Dinsos yang punya kewenangan bagaimana proses pemangkasannya. Tugas kami hanya budgeting dan pelayanan saja," imbuh Suratmika.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan menuturkan pemangkasan yang dilakukan Dinas Sosial berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Tabanan. Peserta yang dinona-

ktifkan dianggap tidak pernah menggunakan kartu KIS selama ikut kepesertaan PBI. "Kami diberikan waktu sampai 31 Desember 2019 oleh BPJS menyerahkan data PBI di Tabanan. Jadi berdasarkan aktif dan tidaknya. Karena kalau mau melakukan pendataan butuh waktu enam bulan," kata Gunawan.

Sementara dari jumlah 73.324 peserta PBI yang diserahkan ke pihak BPJS Kesehatan, terdapat 800 peserta PBI yang dinilai tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta PBI. "Mungkin yang 800 peserta dikembalikan karena pemegang kartunya sudah meninggal atau sudah beralih menjadi peserta mandiri. Sehingga masih ada kuota 800 yang kami ambil dari 49 ribu peserta yang terkena pemangkasan. Kami diberikan waktu hingga tanggal 14 Januari ini untuk memenuhi kepesertaan PBI sesuai kuota yakni 73.324 jiwa," tukasnya.

Disinggung soal nasib peserta PBI yang dipangkas, kata dia, masih dilakukan pembahasan. Para peserta yang tidak lagi mendapatkan jaminan kesehatan PBI ini bisa beralih menjadi peserta mandiri. "Itu sudah konsekuensi. Tapi akan disusahakan dan akan dirapatkan dulu terkait mereka yang tidak lagi tercover kepesertaan PBI," terang Gunawan.

Solusi untuk mengcover pembiayaan peserta yang tidak lagi tercover ini, Pemkab Tabanan harus menyiapkan dana sebesar Rp 24 miliar dari jumlah 49 ribu peserta yang diputus.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Made Suarta menambahkan solusi tersebut akan disetujui untuk mengcover dana kekurangan sekitar Rp 24 miliar tersebut. Kemungkinan akan dianggarkan di anggaran perubahan. "Sekarang kami koordinasikan lebih lanjut dengan bupati dan pak ketua (DPR) agar bisa memberikan pelayanan dengan maksimal," tegasnya.

Sedangkan Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga berharap, peserta PBI yang dinonaktifkan bisa kembali menjadi peserta PBI. Dia juga berharap BPJS memiliki kebijakan untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan bagi mereka yang dinonaktifkan kepesertaannya. "Bolehkah pemerintah untuk ngebon sementara ini? Jalankan dulu nanti belakangan dibayar, dianggarkan berikutnya. Karena untuk menganggarkan sekarang kan sudah tidak bisa. Baru bisa diperubahan atau di induk 2021 nanti. Kalau sekarang dipotong nanti ribut masyarakat," ucap Dirga. (zul/dot)



BUMDES

Di Buleleng 12 Desa Belum Punya

SINGARAJA, *Radar Bali* – Sebanyak 12 desa di wilayah Buleleng hingga kini belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng pun mengancam akan mencabut insentif modal usaha bagi desa-desa yang tak kunjung membentuk BUMDes.

Sebenarnya seluruh desa di Buleleng sudah diberikan batas waktu membentuk BUMDes, paling lambat pada 31 Desember 2019. Pembentukan itu harus didasarkan pada Peraturan Desa (Perdes). Sementara susunan personalia pengurus BUMDes, harus dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) perbekel.

Sayangnya, hingga kini ada 12 desa yang belum membentuk BUMDes. Diantaranya Banyupoh, Bubunan, Umajero, Pelapuan, Gunungsari, Gesing, Kaliasem, Kedis, Silangjana, Suwug, Banjar Tegeha, dan Gitgit ■

► Baca *Di Buleleng...* Hal 7

Dinas PMD Ancam Cabut Insentif Modal

■ DI BULELENG...

Sambungan dari hal 1

Alasannya pun beragam. Alasan yang paling sering dijadikan dalih ialah terjadi pemilihan perbekel di wilayah tersebut.

Kepala Dinas PMD Buleleng Made Subur mengatakan, dirinya sudah wanti-wanti mengingatkan agar seluruh desa membentuk BUMDes. Sebab pembangunan desa, tak bisa mengandalkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa semata.

"Kalau nanti dana desa itu tidak dianggarkan lagi bagaimana? Makanya desa itu harus

kreatif mencari sumber pendanaan. Salah satunya lewat BUMDes ini," kata Subur.

Menurutnya, desa sebenarnya tak perlu ruwet berpikir lini usaha yang akan dibuka di BUMDes. Lini usaha itu bisa saja bergerak di bidang jasa. Seperti penjualan alat tulis kantor, foto copy, atau biro jasa. Bisa juga melirik lini bisnis simpan pinjam, jasa wisata, pengelolaan sampah, unit usaha air bersih, maupun pertanian.

Lebih lanjut Subur mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan para perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa-desa tersebut.

Tujuannya, agar mereka bisa segera membentuk BUMDes. Faktanya, hingga kini BUMDes belum juga terbentuk.

Tadinya, Dinas PMD berencana memberikan insentif modal usaha sebesar Rp 50 juta. Insentif itu bisa digunakan untuk dana operasional, pengadaan ATK, maupun sewa sekretariat.

"Tapi karena belum ada BUMDes-nya, ya sudah hilang anggarannya. Nanti kami akan turun kesana bersama inspektorat, kejaksaaan, dan kepolisian melakukan audit. Biar jelas alasannya, kenapa belum ada BUMDes di sana," tukas Subur. (eps/pit)



Keberatan Warga Diteruskan ke Pengadilan

Pemilik Lahan yang Terdampak Proyek Shortcut 7-10

Tanpa AJB, Tak Bisa Divalidasi Pertanahan

SINGARAJA, Radar Bali - Sejumlah pemilik lahan yang terdampak proyek pembangunan ruas jalan shortcut 7-10 secara resmi mengajukan keberatan pada Tim Pembebasan Lahan. Rencananya keberatan itu akan diteruskan pada Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga dapat dilakukan proses konsinyasi pembayaran.

Dalam proses pembebasan lahan

jalan shortcut titik 7-10, tercatat ada 299 bidang yang terdampak. Sebanyak 169 bidang telah menyatakan kata sepakat menerima ganti rugi. Selain itu, ada 19 bidang yang akan diselesaikan lewat konsinyasi di pengadilan. Sementara 111 lainnya, masih melengkapi dokumen penunjang.

Sekretaris Tim Pembebasan Lahan Ngurah Mahartha mengatakan, cukup banyak warga yang belum bisa melengkapi dokumennya. Misalnya sertifikat yang kini tengah disimpan di luar Bali. Selain itu ada sejumlah proses jual beli yang tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Contohnya, tanah yang melalui proses jual beli pada tahun 2013 lalu. Ternyata tanah itu belum dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) di PPAT. Entah itu di notaris maupun di camat. Tanah



EKA PRASETYA/RADAR BALI

yang belum dilengkapi AJB, tak dapat divalidasi oleh Kantor Pertanahan.

"Sesuai undang-undang, segala jual beli tanah yang terjadi di atas tahun 1997 itu harus ada akta jual beli di

Sesuai undang-undang, segala jual beli tanah yang terjadi di atas tahun 1997 itu harus ada akta jual beli di PPAT. Kalau tanah yang tidak ada akta jual beli kemudian divalidasi, kami bisa terindikasi konspirasi. Nggak main-main, kami bisa kena penggelapan pajak penjual, pajak pembeli, dan BPHTB."

NGURAH MAHARTHA

Sekretaris Tim Pembebasan Lahan

PPAT. Kalau tanah yang tidak ada akta jual beli kemudian divalidasi,

kami bisa terindikasi konspirasi. *Nggak main-main*, kami bisa kena penggelapan pajak penjual, pajak pembeli, dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)," kata Mahartha saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (6/1).

Terhadap permasalahan itu, Mahartha menyebut pihaknya masih meminta pertimbangan ke sejumlah pihak. Di antaranya pada Kantor Wilayah Pertanahan Bali, Kejaksaan Negeri Buleleng, bahkan tak menutup kemungkinan meminta penetapan pengadilan. "Masyarakat *kan* sekarang posisinya terjepit. Tanah mereka kena jalur, dan itu harus dapat ganti rugi. Kami coba minta *legal opinion* (Persoalan AJB), biar masalah ini tidak buntu," tegasnya.

Lebih lanjut Mahartha mengatakan,

ada 19 bidang tanah yang akan dibayarkan melalui proses konsinyasi di Pengadilan Negeri Singaraja. Total biaya yang akan ditipkan di pengadilan mencapai Rp 5,96 miliar.

Langkah konsinyasi diambil karena sejumlah pertimbangan. Diantaranya 7 pemilik tanah tidak hadir saat musyawarah ganti rugi, 2 pemilik tanah sertifikatnya tengah menjadi agunan di bank, dan 10 lainnya telah mengajukan keberatan.

Warga yang mengajukan keberatan itu pun cukup beragam alasannya. Ada yang menganggap harga yang ditawarkan tidak layak, biaya ganti rugi imaterial tidak diperhitungkan, serta kerugian imaterial akibat pemindahan tempat ibadah (*sangah kemulan*) juga tak turut diperhitungkan. (eps/gup)



Pansus Telusuri Aset Daerah yang Bermasalah

TABANAN, Radar Bali - Pansus VI Pendapatan Daerah dan Aset DPRD Tabanan akan menelusuri aset milik Pemkab Tabanan yang bermasalah. Disamping itu juga akan dilakukan pendataan aset yang berpotensi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus VI Pendapatan Daerah dan Aset DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa se usai menggelar rapat pansus di Kantor DPRD Tabanan, Senin (6/1). Menurutnya pansus VI harus memiliki tindakan konkrit dalam meningkatkan pendapatan dan aset daerah. "Maka dari itu ditengah kesibukan, kami gelar rapat supaya ada tindakan konkrit untuk capaian kita bekerja, jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja," tegasnya.

Dewan yang akrab disapa Komet ini menuturkan, pihaknya akan

mencari kebocoran pendapatan serta memperbaiki apabila ada kekeliruan dalam upaya peningkatan pendapatan tersebut. Selain itu yang menjadi perhatian lebih adalah pihaknya akan melakukan pendataan terhadap aset milik daerah. "Berapa yang sudah bersertifikat, berapa yang belum, serta yang mana saja aset yang menghasilkan dan mana yang aset yang tidak produktif, itu nanti akan kita minta datanya kepada OPD terkait," imbuhnya.

Disamping itu, pansus ini juga akan meminta data aset-aset daerah yang bermasalah, seperti halnya beberapa tahun lalu ada saling klaim lahan di pinggir Pantai Nyanyi antara Pemkab Tabanan dengan oknum. Juga ada saling klaim lahan antara Pemkab Tabanan dengan Desa Adat di Tun-

juk. "Aset-aset yang bermasalah itu akan kami selesaikan," tukasnya.

Sementara itu, aset-aset daerah yang sudah menghasilkan dalam arti disewakan atau dikontrakkan, pihaknya juga akan mengkaji kembali terhadap nilai kontraknya. "Itu akan dikroscek, apa nilai kontraknya sudah sesuai dengan kondisi saat ini, jangan sampai nilainya kontraknya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau itu sampai terjadi patut dicurigai ada oknum yang main dibelakang, jadi itu perlu dikaji," tuturnya.

Wakil Ketua Pansus VI, I Putu Eka Putra Nurcahyadi menambahkan, berdasarkan data yang diperoleh terdapat 722 aset daerah yang sudah disertifikatkan. Maka dari itu pansus VI akan memastikan agar tidak ada aset yang hilang sehingga harus dikelola dengan optimal. (zul/dot)



Rapat Eksekutif-Legislatif Pasca Penonaktifan KIS-PBI Ribuan Warga di Buleleng

Segera Diaktifkan, tapi Anggaran Pemkab hanya Cukup Tujuh Bulan

Masalah penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) terutama bagi para Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah, akan segera tuntas. DPRD Buleleng merekomendasikan pada pemerintah agar seluruh kartu yang nonaktif, diaktifkan kembali. Sayangnya belum jelas kapan kartu-kartu nonaktif itu bisa digunakan lagi.

**EKA PRASETYA, Radar
Bali, Singaraja**

KEPUTUSAN itu diambil dalam rapat antara Badan Anggaran DPRD Buleleng, Komisi IV DPRD Buleleng,

dan Pemkab Buleleng. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna itu, dilangsungkan di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng, Senin (6/1) pagi. Turut hadir Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka bersama sejumlah kepala dinas, serta Anggota Komisi IV DPRD Bali Putu Mangku Mertayasa.

Dalam rapat itu terungkap bahwa isu kenaikan tarif iuran BPJS itu telah dibahas dalam rapat pembahasan APBD 2020. Saat itu DPRD sudah meminta agar pemerintah segera mengalokasikan tambahan anggaran, mengingat ada wacana kenaikan iuran.

Hanya saja, saat itu pemerintah bergeming. Alasannya belum ada surat resmi yang masuk ke pemerintah daerah, saat pembahasan anggaran dilakukan. Alhasil setelah APBD 2020 ketok palu, muncul masalah

seperti yang kini terjadi.

Dari 317.244 orang warga Buleleng yang memegang KIS-PBI pada tahun 2019 lalu, kini dikepras menjadi 182.553 orang saja. Sementara 134.691 orang pemegang kartu lainnya, dinonaktifkan status kepesertaannya. Tak pelak hal itu memicu gejolak masyarakat.

Dalam pertemuan itu akhirnya diputuskan agar pemerintah tetap membayarkan iuran pada 317.244 orang pemegang KIS-PBI seperti data penerima 2019 lalu. Konsekuensinya, iuran yang bisa dibayarkan hanya cukup untuk tujuh bulan saja. Total iuran yang harus dibayarkan selama 7 bulan itu mencapai Rp 97 miliar.

"Sisanya yang 5 bulan lagi, kita carikan solusi di anggaran perubahan. Kesehatan ini kebutuhan dasar. Harus dipenuhi. Sudah mutlak itu. Masalah kekurangan uangan-



EKA PRASETYA/RADAR BALI

NASIB RAKYAT: Baik eksekutif maupun legislatif akhirnya setuju KIS-PBI ribuan warga Buleleng kembali diaktifkan.

ya, biar nanti kita bahas masalah ini. Jangan lagi bebani masyarakat yang sedang sakit dengan masalah ini," kata Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.

Sementara itu, Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka men-

gatakan, pemerintah sebenarnya telah menganggarkan biaya sebesar Rp 97 miliar untuk membiayai iuran BPJS. Dengan asumsi tarif iuran sebesar Rp 25.500 per orang per bulan, anggaran sebesar itu sudah cukup untuk mencakup

seluruh masyarakat Buleleng.

Masalahnya, terjadi kenaikan tarif yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2020 lalu. Akibatnya pemerintah mengambil kebijakan mengurangi jumlah penerima KIS-PBI. Evaluasi kepesertaan itu mencakup pemegang KIS-PBI yang meninggal dunia, pindah domisili, maupun yang tak tercantum dalam basis data masyarakat miskin.

Terhadap rekomendasi dari DPRD Buleleng, Puspaka mengatakan pemerintah akan segera membahasnya. Sebab rekomendasi dewan itu menimbulkan dampak yang cukup serius. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp 62,89 miliar untuk membayar iuran di 5 bulan tersisa.

Dari alokasi anggaran tersebut, dibutuhkan komitmen bersama antara Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng. Sebab

selama ini alokasi iuran BPJS dianggarkan bersama-sama antara provinsi dengan kabupaten. "Kalau alokasi dari kabupaten saja itu sekitar Rp 30,8 miliar, sisanya dari provinsi. Ini tentu harus diambil solusinya. Itu bukan uang kecil. Nanti akan dibahas secara simultan dimana cari sisanya. Mudah-mudahan ada tambahan penghasilan lagi, sehingga bisa dialokasikan untuk menyelesaikan ini," kata Puspaka.

Hanya saja, Puspaka belum dapat memastikan kapan kartu-kartu nonaktif itu dapat digunakan kembali. Puspaka menyebut akan melaporkan hal tersebut pada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Setelah mendapat persetujuan, baru pemerintah melakukan revisi terhadap perjanjian kerjasama dengan BPJS yang telah ditandatangani pada 1 Januari 2020 lalu. (*gup)



Tak Relevan, Sepuluh Perda Dikaji

NEGARA, *Radar Bali* – Setelah melakukan inventarisasi peraturan daerah (Perda) Jembrana, diputuskan sebanyak sepuluh Perda akan dikaji. Perda yang dikaji tersebut karena sejumlah alasan, diantaranya sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Keputusan mengkaji perda tersebut berdasarkan rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jembrana dengan bagian hukum dan hak asasi manusia sekretariat daerah Jembrana, Senin (6/1). Menurut ketua Bapemperda DPRD Jembrana I Dewan Komang Wiratnadi, keputusan untuk mengkaji Perda tersebut setelah melakukan inventarisasi Perda Jembrana. "Dari rapat tadi kami bahas sebanyak sepuluh perda akan dikaji," jelasnya.

Menurut politisi PDIP tersebut, terhitung sejak tahun 1991, produk hukum kabupaten Jembrana berupa Perda sebanyak 269 Perda,

termasuk perda mengenai APBD Jembrana. Sebanyak 70 Perda sudah dicabut karena sudah tidak relevan dengan perubahan zaman dan tidak sesuai dengan aturan

lain, sebanyak 80 perda merupakan Perda APBD yang berubah setiap tahun. Karena itu, sisanya masih ada sebanyak 119 perda. "Perda yang dicabut bukan sekarang, tapi beberapa Perda dicabut sejak beberapa tahun lalu," ungkapnya

Perda yang ada dan berlaku tersebut, sebanyak sepuluh Perda akan dikaji karena sudah tidak relevan dengan perubahan zaman. (bas/rid)



ONGKOS PILKADA



M. BASIR/RADAR BALI

LEGA: Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Mulyawan

Tambahan Anggaran Disetujui, Tapi Dipotong

NEGARA, Radar Bali - Permohonan anggaran yang diajukan Bawaslu Jembrana untuk Pilkada 2020, akhirnya disetujui untuk ditambah. Namun nilai yang disetujui tidak sesuai pengajuan tambahan awal, hanya disetujui separuhnya. Anggaran tersebut untuk honor jajaran pengawas *ad hoc* di tingkat Kecamatan. Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Mulyawan mengatakan, permohonan anggaran tambahan untuk tahapan Pilkada Jembrana sebelumnya sebesar Rp 474 juta. Karena pemerintah kabupaten meminta rasionalisasi, kemudian dikurangi menjadi Rp 280 juta. Realisasinya diberikan sebesar Rp 227 juta. "Tambahan anggaran tersebut kami rasa sudah cukup untuk menambah kekurangan anggaran sebelumnya," jelasnya.

Tambahan anggaran yang diminta Bawaslu Jembrana pada pemerintah kabupaten Jembrana tersebut untuk tambahan kekurangan honor panitia *ad hoc*. Pasalnya, pembentukan panitia pengawas tingkat kecamatan lebih lama dari anggaran sebelumnya, jadi membutuhkan anggaran tambahan. Sebelumnya Bawaslu Jembrana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4,3 miliar untuk kegiatan pengawasan Pilkada Jembrana. Anggaran tersebut merupakan anggaran terkecil dibandingkan dengan kabupaten lain. "Dengan anggaran yang kecil ini, kami akan maksimalkan pengawasan," tegasnya. (bas/rid)



49 Ribu Warga Miskin Tabanan Dicoret dari PBI Kesehatan

● Pemprov Hanya Mampu Gelontor Rp 18 Miliar

TABANAN, TRIBUN BALI - Komisi IV DPRD Tabanan akhirnya menggelar rapat dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan membahas tak tercovernya 49 ribu warga miskin PBI (Penerima Bantuan Iuran) sejak iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III naik menjadi Rp 42 ribu. Pemkab Tabanan kekurangan anggaran, hingga harus menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan 49 ribuarganya.

Rapat digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Tabanan, Senin (6/1). Dalam pertemuan tersebut terungkap, Pemkab kekurangan anggaran. Total sharing anggaran antara Pemkab dan Pemprov Bali hanya sekitar Rp 36 miliar. Akibatnya, yang dapat dicover hanya sebanyak 73.324 jiwa dari total anggota PBI sebanyak 122.388 jiwa. Sedangkan, 49.064 jiwa terpaksa dinonaktifkan. Karena untuk mengcover keseluruhan, memerlukan anggaran Rp 61,6 miliar. Artinya masih kekurangan anggaran Rp 24 miliar lebih.

"Sesuai Perpres terkait kenaikan premi BPJS ini, berimbas ke masalah anggaran. Dan setelah koordinasi dengan pihak Pemprov, hanya bisa membiayai senilai Rp 18 miliar dari yang seharusnya Rp 31 miliar. Sharing dananya 51 persen (Pemprov) dan 49 persen (Pemkab) ada total Rp 36 miliar," kata Kadis Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan usai rapat.

Kalau dulu, kata dia, dengan anggaran Rp 33 miliar lebih sudah bisa mengcover seluruh peserta sebanyak 122.388 jiwa. Sementara sekarang, dengan anggaran Rp 36 miliar hanya bisa mengcover 73 ribu jiwa PBI. Sisanya terpaksa dinonaktifkan.

Menurut Gunawan, penonaktifan PBI dengan cara melihat keseringan pemegang KIS menggunakan layanan.



TRIBUN BALI/ MADE PRASETIA ARYAWAN

BPJS KESEHATAN - Komisi IV DPRD Tabanan memanggil eksekutif dan BPJS Kesehatan membahas penonaktifan peserta PBI Kesehatan yang mencapai 49 ribu warga miskin dampak kenaikan iuran Kelas III BPJS Kesehatan, Senin (6/1).

Dari penelusuran data, ternyata sebanyak 49 ribu jiwa tidak aktif karena tak pernah menggunakan pelayanan. Mereka dinonaktifkan mulai 1 Januari 2020 lalu.

"Sesuai kesepakatan, pemegang KIS yang selama ini mempergunakan pelayanan kesehatan dianggap aktif (73 ribu). Sementara yang tidak pernah mempergunakan pelayanan kesehatan, tidak kelihatan saat pengecekan, sehingga itulah yang kita non-aktifkan dan ketemu jumlah 49 ribu," jelasnya.

Namun setelah data 73 ribu jiwa itu diserahkan ke pihak BPJS Kesehatan, ada yang dikembalikan sebanyak 800 jiwa. Karenanya, dari 49 ribu yang dinonaktifkan, ada peluang masuk untuk menutup data 800 orang yang dikembalikan BPJS. Data tersebut paling lam-

bat diserahkan pada 14 Januari mendatang.

"800 orang itu dikembalikan karena kemungkinan ada yang sudah dinonaktif, meninggal atau beralih ke mandiri. Jadi dikembalikan lagi oleh BPJS. Dan setelah ini akan kami lakukan pendataan lagi di jumlah 49 ribu yang sebelumnya non-aktif," ucapnya.

Ketua Komisi IV, I Made Suarta awalnya meminta agar kekurangan dana untuk mengcover semua penerima KIS PBI ditalangi dulu, nanti akan dimasukkan pada APBD Perubahan 2020. "Maunya kita di DPRD, masyarakat dicover dulu, tapi karena ada PKS dengan BPJS sehingga tak bisa ditanggung dulu. Selama beberapa bulan masyarakat yang dinonaktifkan tersebut terpaksa tak lagi ditanggung," ucapnya. (mpa)



134.000 PBI Kesehatan Diaktifkan

■ Gubernur Tambah Dana Rp 5 M ke Buleleng ■ 317.244 Warga Miskin Tercover Sampai Juli

SINGARAJA, TRIBUN

BALI - Kabar gembira bagi masyarakat kurang mampu, yang bantuan jaminan kesehatannya sempat dinonaktifkan oleh Pemkab Buleleng. Muncul keputusan, Pemkab akan mengaktifkan kembali 134 ribu peserta kurang mampu yang jaminan kesehatannya sempat dinonaktifkan.

Keputusan ini merupakan hasil rapat yang digelar oleh Komisi IV DPRD Buleleng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Buleleng, Senin (6/1).

Seusai rapat, Ketua TPAD Buleleng Dewa Ketut Puspaka mengatakan, sebelumnya anggaran yang dimiliki Pem-

kab untuk memberikan bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp 92 miliar. Namun belakangan, Pemprov kembali menambahkan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk Pemkab Buleleng. Sehingga total anggaran yang kini dimiliki Pemkab untuk memberikan bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp 97 miliar.

Setelah dihitung, anggaran tersebut dapat mengcover kembali 134 ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan. Dengan anggaran sebesar Rp 97 miliar itu, Pemkab Buleleng kini

bisa memberikan bantuan jaminan kesehatan kepada 317.244 PBI.

Namun, kata Puspaka, anggaran Rp 97 miliar itu hanya cukup untuk menanggung 317.244 peserta sampai Juli 2020. Sementara untuk Agustus sampai Desember, masih kekurangan anggaran sekitar Rp 62 miliar. Kekurangan anggaran itu akan dipikirkan lagi bersama Pemprov Bali. "Kurangnya lagi Rp 62 miliar. Kalau menurut *sharing* anggaran antara Pemkab Buleleng dengan Pemrov Bali, berarti kami di Pemkab Buleleng itu perlu menyediakan anggaran lagi Rp 30 miliar sementara sisanya Rp 32 miliar itu dari

provinsi. Kami masih memikirkan dimana lagi mencari Rp 30 miliar itu, karena itu jumlah yang sangat besar. Kami masih punya waktu lagi lima bulan untuk memikirkan itu," jelasnya.

Pengaktifkan kembali 134 ribu PBI itu dilakukan secepatnya. Puspaka mengaku sudah meminta Asisten I merancang perubahan (addendum) perjanjian dengan BPJS Kesehatan dari yang awalnya dirancang untuk 12 bulan menjadi hanya tujuh bulan. "Kalau sudah selesai rancangan, laporkan ke Bupati lalu tinggal manggil BPJS. Secepatnya lah diaktifkan lagi," terangnya.

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna mengatakan, pihaknya sudah merekomendasikan kepada bupati agar 134 ribu PBI yang sempat dinonaktifkan, diaktifkan

kembali kendati hanya selama tujuh bulan. Untuk Agustus sampai Desember, sebut Supriatna, nanti didiskusikan lagi, menentukan dari mana anggarannya. "Masa-

lah kesehatan ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat harus dilayani. Masalah uangnya biar lah kami yang sakit mikirkan," katanya. (rtu)

Hapus Festival di Kecamatan

ANGGOTA Komisi IV DPRD Bali, Putu Mangku Mertayasa yang turut hadir dalam rapat di DPRD Buleleng, menyebutkan, kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Berkaca dari persoalan ini, Mangku Mertayasa menyarankan kepada Pemkab Buleleng untuk menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak "bermanfaat" di Buleleng. Salah satunya adalah festival di masing-masing kecamatan.

"Kalau dilihat jumlah dana yang dihabiskan untuk satu festival cukup besar. Masing-masing kecamatan itu menghabiskan Rp 350 juta per

kecamatan. Kemudian masing-masing desa juga harus mengeluarkan Rp 50 juta untuk partisipasi di kecamatan. Dana-dana itu sebenarnya bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan masyarakat di Buleleng," ungkapnya.

Selain itu, Mangku Mertayasa juga meminta kepada Dinas Sosial Buleleng agar melakukan validasi data. Sehingga bantuan jaminan kesehatan ini lebih tepat sasaran, dan hanya diberikan bagi masyarakat miskin. "Kami akan laporkan ke Gubernur menyangkut kebutuhan dana lagi Rp 32 miliar itu," tutupnya. (rtu)



Diresmikan Desember 2019, Jebol Januari 2020

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Belum genap setahun diresmikan, Taman Lansia atau Taman Lila Ulangun di kawasan DAM Oongan sudah jebol. Pantauan *Tribun Bali* kemarin, taman yang diresmikan 16 Desember 2019 ini jebol pada senderan sisi timurnya.

Panjang jebol sekitar tiga meter. Materialnya tergerus dan menyisakan lempengan yang merupakan jalan setapak bagian atas dan di bawahnya sedikit gundukan tanah.

Warga yang duduk di gazebo taman, Wayan Kerta mengatakan, senderan ini sudah lama jebol. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemkot Denpasar yang dalam hal ini Dinas PUPR Kota Denpasar.

Kerta pun menyesalkan jebolnya senderan ini yang tak kunjung diperbaiki dan seakan tak diperhatikan. "Ini sudah lama jebolnya. Harusnya kan segera dilakukan perbaikan," katanya, Senin (9/3).

Sedangkan Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, I Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta mengatakan, senderan ini telah jebol Januari 2020. Ini disebabkan kondisi air deras yang membuat senderan tidak kuat menahan derasnya alir-



TRIBUN BALI/I PUTU SUPARTIKA

JEBOL - Kondisi Taman Lansia Tukad Oongan, Senin (9/3). Senderan taman ini jebol sejak bulan Januari 2020.

an. "Pusaran air juga memang berpusat tepat di tempat jebolnya tersebut," katanya.

Jimmy menambahkan, proyek penataan ini masih merupakan tanggung jawab rekanan dengan masa pemeliharaan selama satu tahun. "Saat masih dilakukan pengkajian untuk memperkuat senderan agar tidak kembali tergerus. Setelah dilakukan pengkajian baru akan dilanjutkan dengan membuat case dam," katanya.

Untuk diketahui, penataan taman yang berada di Jalan Noja Saraswati, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara ini dilaksanakan di

atas lahan seluas 1.095 meter persegi. Dana untuk pembangunannya menggunakan Dana APBD Kota Denpasar sebesar Rp 3,6 miliar lebih.

Taman Lansia ini dilengkapi beberapa fasilitas, mulai dari parkir, toilet, ruang edukasi, pusat kuliner, taman, fasilitas vegetasi dan pencahayaan, serta jalur pejalan kaki.

Jimmy mengklaim, karena tempatnya yang jauh dari pusat kota akan membawa ketenangan bagi pengunjung. Penataan yang dimulai sejak 9 Juli 2019 lalu, telah rampung dikerjakan pada 5 Desember 2019 lalu. (sup)



☐ RADAR BALI ☐ TRIBUN BALI ☒ BALI POST ☐ NUSA BALI
☐ _____

Pembangunan Jalan Alternatif Pembebasan Lahan Terbayar Rp6,7 Miliar

Gianyar (Bali Post) -

Pemkab Gianyar sudah dalam tahap menyiapkan jalur alternatif guna mengatasi jalan amblas di Desa Sukawati menuju Tegenungan, Desa Kemenuh. Bahkan proses pembebasan lahan untuk jalur alternatif sepanjang 150 meter itu sudah dirampungkan, dengan nilai Rp6,7 miliar. Memasuki tahun ini baru akan dilakukan pembuatan badan jalan alternatif. Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya mengungkapkan hal itu, Senin (13/1) kemarin.

Wisnu Wijaya menerangkan, seputaran jalur yang saat ini amblas sebelumnya juga sempat longsor. Pemerintah sudah melakukan perbaikan dengan membangun senderan, namun beberapa tahun lalu longsor kembali terjadi pada tebing dengan kedalaman puluhan meter. "Sekarang dengan kondisi seperti itu tidak mungkin kita perbaiki lagi, di samping dengan biaya cukup tinggi," katanya.

Melihat kondisi itu, Bupati Gianyar I Made Mahayatra

akhirnya memerintahkan untuk menyiapkan jalan alternatif. Dikatakan, jalan alternatif tersebut tetap melintasi jembatan antara Desa Sukawati dengan Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh. "Jalan alternatif tetap melintasi jalur jembatan Tegenungan itu. Kami sudah ada pembebasan lahan, bahkan sudah dibayar. Tinggal membangun jalan," katanya.

Terkait pengerjaan pembangunan jalan alternatif, Wisnu Wijaya meminta masyarakat untuk bersabar. Dijelaskan, membangun jalan baru di atas lahan bekas sawah itu akan membutuhkan waktu untuk pemadatan tanah. "Masyarakat tolong bersabar, karena membangun jalan dengan tanah bekas sawah itu perlu proses agar tanah tidak labil. Tahun ini mungkin akan dibentuk badan jalan saja dulu, kita pastikan batas batasnya," katanya.

Wisnu Wijaya mengatakan, pihaknya bisa saja bergerak cepat membuat jalan. Namun jika terburu-buru dikhawatirkan konstruksi jalan justru

tidak bagus. Sementara terkait banyaknya masyarakat yang tetap melewati jalan amblas, kata Wisnu Wijaya, pemerintah sudah memasang plang dilarang memasuki jalan tersebut. Didekat jalan amblas juga sudah ditaruh sejumlah drum hitam.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gusti Ngurah Suwastika menambahkan, pembebasan lahan sudah dirampungkan sejak akhir 2019. "Keempat pemilik lahan sudah setuju, jadi pembebasan lahan sudah rampung," katanya.

Suwastika mengatakan, lahan yang dibebaskan 2.818 meter persegi dengan nilai yang dipasang dalam DPA Rp6.960.000.000. Namun, setelah negosiasi menjadi Rp6.773.200.000, sehingga ada anggaran Rp186.800.000 yang dikembalikan ke kas daerah. "Jadi, Rp6.773.200.000 itu pun sudah terbayarkan ke pemilik lahan. Terkait pembebasan lahan sudah tidak ada masalah lagi," imbuhnya. (kmb35)



Perbekel Pemecutan Kaja Ditahan Kejaksaan

★ Dugaan Korupsi Pungutan Desa Rp 190 Juta

DENPASAR, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar langsung melakukan penahanan terhadap Perbekel Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, AA Ngurah Arwatha, 48, pasca dilimpahkan dari Polresta Denpasar, Senin (13/1). Perbekel dua periode (2010-2016 dan 2016-2022) ini terjerat kasus dugaan korupsi pungutan desa senilai Rp 190 juta.

Awalnya, Perbekel Arwatha datang ke Kejari Denpasar dikawal sekitar 5 penyidik dari Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Denpasar sekitar pukul 10.00 Wita. Penyidik lalu melimpahkan Arwatha bersama berkas dan barang bukti ke penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Denpasar.

Setelah menjalani pemeriksaan administrasi, sekitar pukul 12.00 Wita, Arwatha yang menggunakan rompi tersangka berwarna oranye keluar ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan yang sudah menunggu di depan lobi kejaksaan yang akan membawanya ke Lapas Kelas IIA, Kerobokan, Kuta Utara, Badung.

"Yang bersangkutan (Arwatha, red) resmi kami tahan dan kami titipkan 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Kerobokan," kata Kasi Pidsus Kejari Denpasar I Nengah Astawa didampingi Kasi Intel IGN Ary Kesuma.

Dalam dakwaan primer penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 2 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 64 KUHP. Sedangkan dalam dakwaan subsider, penyidik memasang Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 64 KUHP. "Perbekel menjadi tersangka tunggal. Karena pembagian uang pungutan merupakan inisiatif perbekel sendiri," lanjutnya.

Dijelaskan, kasus ini berawal dari pungutan desa terhadap toko, pedagang, dan pasar desa yang dipungut petugas dari Desa Pemecutan Kaja atas perintah perbekel.

Di awal kepemimpinan Arwatha pada 2010-2016, pungutan ini dimasukkan ke kas desa dan dijabarkan ke APBDes. Namun dimasa kedua kepemimpinannya yaitu mulai 2017-2018, uang pungutan dari toko, pedagang dan pasar desa tidak dimasukkan ke kas desa. Selain itu, penggunaan uang pungutan itu juga tidak sesuai APBDes.

Pasalnya, hasil pungutan tersebut langsung dibagi oleh Perbekel Arwatha ke perangkat desa dan penyertaan modal desa BUMDes. "Dari perhitungan yang dilakukan ada kerugian keuangan desa sebesar Rp 190 juta," ujar Kasipidsus Nengah Astawa.

Sementara itu, Made Adi Mustika sebagai pengacara tersangka mengatakan tidak mengajukan penangguhan penahanan pasca penahanan Perbekel Pemecutan Kaja, Arwatha. Disebutkan, meski Arwatha sempat syok karena tahu akan ditahan, namun ia memastikan kliennya siap menghadapi.

Disebutkan, Perbekel Arwatha sudah mengembalikan uang sekitar Rp 120 juta yang ditiip di penyidik. Sedangkan uang yang belum dikembalikan sekitar Rp 72 juta karena sudah masuk ke BUMDes dan tidak dinikmati Arwatha.

Sementara itu, terkait dengan ditahannya Perbekel Desa Pemecutan Kaja AA Ngurah Arwatha, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Denpasar, IB Alit Wiradana saat dikonfirmasi mengaku hanya baru mendengar penahanan namun belum mengetahui kronologinya. Dia mengaku masih akan mencari informasi kejelasan kasus perbekel tersebut.

"Jadi untuk saat ini belum bisa memberikan kepastian tindak lanjutnya. Yang jelas, kami peroleh kepastian dulu, jika sudah ada kepastian seperti apa baru bisa melakukan tindak lanjut," katanya. **rez, mis**



Anggaran Bencana Cuma 0,2 Persen

Padahal
Diharapkan
Minimal 2 Persen
dari APBD

DENPASAR, Radar Bali - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo datang ke Kantor Pusdalops Bali, Renon kemarin (14/1). Dalam kesempatan itu, terungkap bahwa anggaran kebencanaan di Bali masih sangat kecil. Hanya Rp17 miliar, alias 0,23 persen dari APBD yang mencapai Rp7,281 triliun.

"Untuk anggaran kebencanaan, dianggarkan Rp 17 miliar. Jumlah itu sudah melebihi daerah lain," kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Made Rentin dalam kunjungan Kepala BNPB ke Bali kemarin.

Dia menyatakan, ke depannya, ada keinginan seperti yang diimbau Prof. Syamsul Maarif, pendiri BNPB, agar anggaran kebencanaan idealnya 2 persen dari APBD. "Idealnya 2 persen. Kami tidak jauh tertinggal di angka Rp17 sampai Rp20 miliar sudah mampu akomodasi

dir kalau direkap dan ditotal keseluruhan sudah menuju ke sana (angka ideal 2 persen)," kata Rentin.

Dia juga menyatakan, dengan ekspektasi yang diinginkan berdasarkan acuan dari pusat, sebenarnya Pemprov Bali sudah mampu bergerak ke arah ideal itu dengan dukungan anggaran dari pimpinan terutama Gubernur Bali, Wayan Koster. Kenyataannya, anggaran yang ke arah ideal ini sebetulnya jauh dari angka ideal. Bagaimana tidak, dengan anggaran Rp17 miliar, itu hanya 0,2 persen belanja APBD. Dengan APBD Bali 2020 sebesar Rp7,281 triliun, maka 2 persennya adalah Rp145 miliar.

Rentin menyatakan, Bali memang rawan bencana. Terutama longsor dan pergerakan tanah yang tinggi. Potensi atau ancaman bencana longsor dan pergerakan tanah ini berada di Karangasem, Bangli, Buleleng dan sebagian Badung. Daerah Badung, seperti di bagian utara khususnya Abiansemal dan Petang. "Termasuk Tabanan, seperti Pupuan dan juga Jembrana," terangnya.

Data yang diperbarui tanggal



KUNJUNGAN: Kepala BNPB Doni Monardo saat berkunjung ke Kantor Pusdalops Bali, di Renon, kemarin.

1 Januari sampai 13 Januari, bencana yang terjadi sudah di atas rata-rata. Ada 120 kejadian bencana didominasi pohon tumbang. Dengan demikian, masyarakat diperingatkan agar lebih awal meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana. "Lebih waspada cuaca ekstrem dan angin kencang, hujan lebat cukup lama. Mohon diwaspadai intensitasnya. Tolong diwaspadai cuaca ekstrem, dominan pohon tumbang," jelas Rentin.

Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo menceritakan kekesalannya karena beberapa

hutan di Indonesia gundul tak ditanami pohon. Lebih parah dibandingkan *illegal logging*, ia mencontoh banjir bandang dan longsor yang terjadi di Lebak, Banten awal Januari lalu, begitu dahsyat hingga 30 desa di 6 kecamatan terdampak, aktivitas lumpuh total, ribuan rumah hancur, dan 17.200 mengungsi. Selain itu, banyak alih fungsi lahan.

"Illegal logging banyak, juga ditebang. Tunggu saja longsor. Pertanian ke perkebunan alih fungsi lahan. Daerah banjir bandang tanah longsor ada sebagian permukaan bumi

yang dirusak. Contoh Lebak. Belum pernah dalam sejarah Lebak banjir dahsyat. Kenapa begitu? Karena bagian hulu tambang ilegal. Kantong air menumpuk, dan tanah ada lubang. Apa lagi kemiringan 30 derajat," jelasnya.

"Gimana coba melakukan rehabilitasi kemiringan 30 derajat ditanami sawah padi tanpa diimbangi vegetasi lain," keluhnya.

Ia menambahkan tidak hanya di Lebak, tapi di Nusa Tenggara Barat juga demikian. Hutannya juga ada yang habis. Doni banyak mendapat aduan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) soal ini. Begitu pula di Bali, ia meminta Pemerintah Bali, Kepolisian Daerah Bali dan TNI juga sama-sama menjaga hutan di Bali. Terutama Taman Nasional Bagian Barat (TNBB). Ia menyatakan jangan sampai TNBB rusak. "Tolong dijaga. Minta maaf bukan saya perintah. Minta tolong dijaga. Jajaran kodam dan kepolisian. Di Bali hutannya sedikit. Taman nasional daerah nggak boleh dimasuki oleh orang," harap jenderal bintang tiga ini. (feb/yor)



☐ RADAR BALI ☒ TRIBUN BALI ☐ BALI POST ☐ NUSA BALI
☐ _____

Ditahan, Kades Pemecutan Kaja Bungkam

● Tersangkut Dugaan Korupsi Pungutan Desa

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Mengenakan busana adat dibalut rompi warna merah bertuliskan "Tahanan Pid-sus Kejari Denpasar", Kepala Desa (Kades) Pemecutan Kaja, Anak Agung Ngurah Arwatha (48) turun dari lantai II Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar.

Tidak ada satu patah kata pun keluar dari bibir Ngurah Arwatha saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Ia memilih bungkam sembari menutupi wajahnya dengan

kedua tangan, menghindari bidikan para pewarta foto.

Dikawal tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Denpasar, ia pun digiring menuju mobil tahanan untuk selanjutnya dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kero-bokan.

Ngurah Arwatha langsung ditahan oleh penyidik Pidsus Kejari Denpasar usai menjalani pelimpahan tahap II dari penyidik kepolisian Polresta



TRIBUN BALI/RIZAL FANANI

DITAHAN - Kepala Desa Pemecutan Kaja, Anak Agung Ngurah Arwatha, ditahan oleh tim Pidsus Kejari Denpasar usai menjalani pelimpahan tahap II dari penyidik Polresta Denpasar, Senin (13/1).

BERSAMBUNG • HAL 7

Edisi : Selasa, 14 Jan 2020
Hal : 7



Sambungan

Langsung Ditahan, Kades...

Sambungan Hal.1

Denpasar. Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara dugaan korupsi pungutan Desa Pemecutan Kaja tahun 2017-2018. Sebelumnya oleh penyidik Polresta Denpasar, terhadap pria yang kali kedua menjabat sebagai Perbekel atau Kepala Desa Pemecutan Kaja ini tidak dilakukan penahanan.

"Tersangka tidak mengetahui akan ditahan oleh jaksa. Siapa pun (ditahan) pasti akan syok," ucap Made Adi Mustika selaku anggota tim kuasa hukum Ngurah Arwatha saat ditemui di sela pelimpahan, Senin (13/1).

Mustika mengatakan, baik tim kuasa hukum maupun Ngurah Arwatha tidak mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik Kejari Denpasar. Saat ditanya alasan penyidik menahan kliennya, Mustika menyatakan, itu adalah kewenangan penyidik Kejaksaan. "Penahanan ini adalah kewenangan Kejaksaan, tapi itu kan alasannya (penahanan) subyektif. Klien kami sudah mengembalikan uang Rp 120 juta. Yang belum dikembalikan sekitar Rp70-an juta," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Denpasar, I Nengah Astawa mengatakan, ditahannya tersangka karena telah memenuhi unsur obyektif dan subyektif. "Obyektifnya sudah memenuhi UU KUHP Pasal 21. Itu memberikan ruang bagi kami melakukan penahanan. Unsur subyektifnya, kami khawatir beliau melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi lagi perbuatannya," papar Astawa didampingi Kepala Seksi Intelijen (Kasi

Intel) Kejari Denpasar, Agung Ary Kesuma.

Tersangka, kata Astawa, akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan. Jaksa asal Rendang, Karangasem ini menyatakan, telah menunjuk lima jaksa penuntut untuk menangani perkara ini. Pula Kejaksaan segera melimpahkan ke pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) untuk nantinya menjalani persidangan.

"Segera akan kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Paling tidak dua minggu ke depan sudah kami limpahkan ke pengadilan, berbarengan dengan pelimpahan kasus Dauh Puri Klod," cetusnya.

Ditanya tentang kronologi singkat perkara ini, Astawa menceritakan bahwa perkara yang membelit Ngurah Arwatha terkait dengan pungutan Desa Pemecutan Kaja, yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pemecutan Kaja dari tahun 2017 hingga 2018.

"Pengutannya tidak disetorkan ke kas desa. Sehingga pemanfaatannya tidak melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pada tahun 2010 sampai 2016, pengutannya disetorkan ke kas desa dan pemanfaatannya dijabarkan dalam APBDes," urainya.

Modusnya, kata Astawa, yang bersangkutan (tersangka) memungut uang iuran dari toko, dan pasar desa. Uang pungutan itu lah yang tidak disetorkan ke kas desa. Melainkan dibagi untuk perangkat desa maupun penyertaan modal desa kepada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). "Padahal menurut aturan Permendes (Peraturan Kementerian Pedesaan),

bahwa penyertaan modal ke Bumdes itu harus melalui APBDes. Kerugian sekitar Rp 190 juta," ungkapnya.

Diuraikan dalam berkas perkara pelimpahan bahwa tersangka sejak bulan Desember 2016 memerintahkan anggota Linmas Desa Pemecutan Kaja untuk melakukan pungutan untuk meminta sumbangan. Yakni kepada pedagang kaki lima sebesar Rp 2 ribu sampai Rp 3 ribu. Pungutan sumbangan ke pedagang toko dan gudang dengan besaran bervariasi. Juga pungutan sumbangan ke pedagang Pasar Jaba Jro Kuta dengan total penerimaan rata-rata sebulan Rp 13 juta sampai 14 juta.

Uang sumbangan itu dikumpulkan oleh bendahara desa dan tidak dimasukkan ke kas desa. Juga tidak dimasukkan ke dalam penerimaan asli desa. Kemudian sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Februari 2018, Kepala Desa Pemecutan Kaja memerintahkan bendahara desa memotong pungutan rata-rata Rp 7 juta sampai Rp 11 juta setiap bulan. Potongan itu untuk dibagi ke kepala desa, perangkat desa kadus dan BPD desa. Sisanya disetorkan ke kas Bumdes Pemecutan Kaja.

Dalam perkara ini, Ngurah Arwatha disangkakan dakwaan alternatif, Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (can)



Disperindag Pertajam Aset Pasar Yangapi

Bangli (Bali Post) -

Pasar Amerta Gunung Sari atau yang selama ini lebih dikenal masyarakat dengan nama Pasar Yangapi sangat memprihatinkan. Pasar yang dibangun pemerintah di era 90-an itu terbengkalai dan tak terurus. Kios-kios yang ada banyak kosong akibat ditinggalkan oleh pedagang. Tidak pelak, kondisinya pun rusak parah. Meski keadaan seperti itu sudah berlangsung bertahun-tahun, sampai sekarang belum juga ada upaya pemeliharaan atau revitalisasi pihak Pemkab, terhadap pasar yang ada di Kecamatan Tembuku itu.

Plt. Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bangli, Wayan Gunawan, dikonfirmasi Minggu (5/1) kemarin mengungkapkan, pihaknya sejatinya punya keinginan melakukan perbaikan/revitalisasi terhadap pasar Yangapi. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan. Alasannya, terben-tur kepemilikan aset. Pasar Yangapi yang memiliki banyak kios, tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Bali.

Pihaknya mengaku kurang tahu pasti bagaimana kerja

sama pemanfaatan aset tersebut selama ini. Karenanya, tahun ini ia berencana melakukan penajaman aset. "Yang jelas dulu kan memang ada surat menyuratnya. Tapi itu belum saya temukan. Karenanya kami akan per-jelas lagi. Kalau memang suratnya tidak berlaku lagi, biasanya kan ada batas waktu untuk hak guna pakainya, maka kami akan mohonkan lagi. Sehingga bisa kami lakukan pemeliharaan dan revitalisasi," jelasnya. Menurut Gunawan kalau upaya itu

tidak dilakukan maka kondisi pasar Yangapi sekarang akan terus menerus jadi PR Disperindag.

Ditambahkannya, Pasar Yangapi merupakan salah satu dari empat pasar rakyat yang ada di Kabupaten Bangli. Pasar itu saat ini masih beroperasi dan dimanfaatkan beberapa pedagang. Dari pasar itu, Disperindag selama ini mendapat pendapatan penarikan retribusi.

Sebagaimana pantauan selama ini, kondisi Pasar Yangapi nampak tak terurus.

Bangunan yang ada di pasar sudah mengalami banyak kerusakan. Terutama kios-kios yang ada di sisi selatan pasar. Hampir sebagian besar kios itu nampak kosong akibat tidak lagi ditempati pedagang. Selain bagian atapnya banyak jebol, kerusakan juga banyak terjadi pada pintu *rolling door*. Bahkan di beberapa kios, terlihat sudah tidak dilengkapi *rolling door*. Tak hanya rusak, lingkungan pasar itu juga kumuh.

Bupati Bangli I Made Gi-an-yar beberapa waktu lalu sempat mengungkapkan rencananya akan mengubah Pasar Yangapi itu menjadi Pasar Agro, bahkan sempat pula ada rencana menjadikan pasar itu sebagai rumah sakit. Namun sampai sekarang, rencana itu masih sebatas wacana. (kmb40)



☐ RADAR BALI ☐ TRIBUN BALI ☒ BALI POST ☐ NUSA BALI
☐ _____

KASUS-KASUS PUNGLI DIDUGA MELIBATKAN UNSUR DESA ADAT

PENGUNAAN DANA PUNGUTAN DESA ADAT

- Pembiayaan Upacara
- Pembangunan Pura
- Santunan Kematian
- Operasional Sekretariat
Desa Adat

JENIS PUNGUTAN OLEH DESA ADAT

- Pengelolaan Wewidangan
Desa Adat
- Iuran Krama Tamiu
- Dana Punia Tempat Usaha

SUMBER PENDAPATAN DESA ADAT

**Pasal 65 ayat (1) Perda
No. 4 Tahun 2019**

- Pendapatan Asli Desa Adat
- Hasil Pengelolaan
Padruwen Desa Adat
- Alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi
- Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Bantuan Pemerintah Pusat
- Hibah dan Sumbangan (Dana Punia)
Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat
- Pendapatan Lain-lain Desa Adat yang Sah



Grafis : Tomik Cahya/Bali Post

Edisi : Senin, 6 Januari 2020

Hal : 1



Pungutan Desa Adat

PERLU REGULASI JELAS DAN TEGAS



● **26 September 2017.** Bendesa Adat Tanjung Benoa diperiksa dalam kasus dugaan pungli perusahaan water sport di Desa Tanjung Benoa, Kuta Selatan. Pungutan berdasarkan Pararem Tanjung Benoa, tanggal 25 April 2015 bagian dari Gali Potensi Desa.

● **12 Agustus 2018.** OTT dugaan pungli pemilik boat penyeberangan ke Jungutbatu Nusa Penida. OTT dilakukan tim Ditpolair Polda Bali di Kantor Scoot Fast Cruises di Jalan Hang Tuah, Sanur Kaja, Denpasar Selatan.

● **1 November 2018.** Dugaan pungli di Pantai Matahari Terbit Sanur. Pungutan yang merupakan retribusi masuk kawasan dikelola oleh BUMDes Adat Sanur.

● **6 November 2018.** Dugaan pungli tiket di tempat wisata Tirta Empul, Desa Manukaya Let, Gianyar. Tiket masuk berlogo Desa Adat Manukaya Let untuk pengunjung dari pukul 15.00 - 18.00.

Pungutan oleh desa adat di Bali sempat dianggap sebagai pungutan liar (pungli) oleh pihak aparat hukum. Pascapenetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, pungutan oleh desa adat diberikan ruang legalitas dengan sejumlah persyaratan. Meski demikian, regulasi tertulis dan tegas tentang bolehnya desa adat melakukan pungutan perlu dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya agar ada kesatuan pemahaman, baik dari pihak desa adat maupun pemerintahan, terutama aparat hukum.

Perda Desa Adat telah diundangkan. Namun di tingkat akar rumput masih merasakan kegamangan dalam hal legalisasi pungutan desa adat. Hal ini disebabkan masih umumnya ketentuan yang diatur dalam perda yang diklaim memperkuat desa adat tersebut.

Bendesa Adat Denpasar A.A. Ngurah Rai Sudarma, Jumat (3/1) mengungkapkan, diperbolehkannya pungutan desa adat akan membantu mewujudkan berdirinya desa adat.

Hal. 11
Hukum Nasional

Hukum Nasional

Dari Hal. 1

Namun perlu diantisipasi kebijakan ini agar tidak tumpang tindih dengan peraturan hukum nasional yang ada.

Dikatakannya, regulasi ini penting menjadi pedoman bagi desa adat agar bisa sejalan dengan hukum nasional lainnya. Karena itu, Majelis Desa Adat perlu melakukan koordinasi agar regulasi yang ada bisa paralel dengan peraturan hukum lainnya.

Selain itu, adanya kebijakan memberikan kewenangan desa adat melakukan pungutan diharapkan tidak diskriminatif. Karena itu, diperlukan sebuah regulasi yang jelas dan kuat, bukan hanya sebatas *pararem*. Mengingat, dalam satu desa adat bisa terdiri dari banyak banjar

adat. Seperti di Denpasar ini ada 105 banjar adat yang memiliki karakteristik masing-masing. "Saya pribadi sangat mendukung kebijakan ini, namun harus dilengkapi dengan regulasi agar tidak tumpang tindih," ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Pawongan (Patajuh II) Desa Adat Denpasar A.A. Putu Gede Wibawa menegaskan, pungutan yang selama ini dilakukan desa adat diten-

tukan melalui *parum agung*. Artinya, mana saja yang kena pungutan dan apa saja yang tidak kena semua diputuskan dalam *parum agung* tersebut. Terkait dengan penggunaannya, lebih banyak untuk operasional sekretariat. Karena biaya untuk di sekretariat cukup besar. Misalnya, ada undangan dari banjar-banjar, surat menyurat, serta keperluan di sekretariat. (kmb12)



27 Desa Digelontor APBDes Rp 36 Miliar

★ Masyarakat Wajib Ikut Mengawasi Dana Desa

DENPASAR, NusaBali

Sebanyak 27 desa di Kota Denpasar digelontor dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020. Total dana yang diberikan kepada seluruh desa sebesar Rp 36.913.390.000 atau Rp 36 miliar lebih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, Minggu (5/1) mengungkapkan, anggaran tersebut sudah diproses dan diketok palu pada 31 Desember 2019 lalu. Untuk saat ini seluruh desa di Denpasar masih diajak untuk melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun kedepan.

RPJMDes tersebut nanti dalam rangka mengeksekusi anggaran Rp 36 miliar itu agar tepat sasaran. Sebab, dana yang didapat masing-masing desa berbeda-beda mulai dari Rp 970 juta hingga Rp 2,9

miliar. Perbedaan dana yang didapat masing-masing desa menurut luas cakupan wilayah mereka. "Saat ini masih sedang pembentukan RPJMDes. Bagaimana nantinya dana sebesar itu bisa dieksekusi dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Menurut Gus Alit sapaannya, setelah RPJMDes selesai, baru mulai menjalankan program, dimana seluruh desa wajib membuat baliho rincian dana hingga alokasinya untuk dipajang di depan kantor desa masing-masing.

Mereka wajib transparansi dana kepada masyarakat, dari alokasi hingga rincian penggunaannya. "Jika tidak ada baliho tersebut perlu dipertanyakan," imbuh Gus Alit.

Masyarakat kata dia, juga wajib ikut mengawasi pergerakan dana tersebut. Jangan sampai ada salah pemakaian karena anggaran yang diberikan khusus untuk program desa. "Yang jelas mereka wajib

membuat baliho. Pihak desa juga harus transparan dananya dipakai apa yang jelas agar sesuai dengan visi dan program Kota Denpasar," ungkapnya.

Dana desa kedepannya diharapkan bisa dimanfaatkan untuk skala prioritas tentang apa tujuannya. "Terutama peningkatan kualitas masyarakat dan pengurangan kemiskinan, termasuk untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif kaitannya juga pengembangan lingkungan," imbuhnya.

Dengan dana desa yang cukup besar didapatkan desa, aparat desa juga diingatkan untuk bisa tertib administrasi, akuntabel, dan tetap antisipatif, terutama masalah disiplin administrasi terkait pelaporan harus tepat waktu. "Harus tepat waktu sekarang makanya kita lakukan monev terus jangan sampai ada temuan lagi pelanggaran administrasi," tandasnya. mis

Edisi : Senin 6 Januari 2020

Hal : 3



Dikabarkan Tersandera Penyidik Kejari

Dugaan Korupsi Silpa Dauh Puri Klod

DENPASAR, *Radar Bali* - Mantan Bendahara Desa Dauh Puri Klod, Ni Luh Putu Ariyaningsih, 33, sudah sebulan mendekam di Lapas Perempuan Denpasar. Namun, hingga kini jaksa penyidik pidana khusus (pid-sus) Kejari Denpasar yang menyidik kasus ini belum juga merampungkan berkas penyidikan untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Ada kabar tak sedap yang menyebut para penyidik Kejari Denpasar yang menangani kasus ini bekerja setengah hati lantaran "tersandera" politik. Sumber kuat koran ini menyebutkan, ada kekuatan besar yang mencoba mengintervensi Kejari Denpasar. Kabarnya, ada upaya melindungi sekaligus menyelamatkan mantan Perbekel Dauh Puri Klod, I Gusti Made Wira Namiartha yang saat ini duduk sebagai anggota

DPRD Kota Denpasar dari PDIP.

Informasi yang beredar, intervensi itu datang dari orang-orang kuat dan berkuasa di Kota Denpasar. Mereka sengaja menekan Kejari Denpasar agar Ariyaningsih saja yang dijadikan tersangka alias ditumbalkan. Di lain sisi, para penyidik merasa dalam posisi yang benar. Mereka sudah bekerja keras mengungkap kasus ini.

Para penyidik juga sudah mengantongi alat bukti kuat dugaan keterlibatan mantan perbekel dalam kasus ini. Di antaranya hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Bukti lain menurut sumber koran ini, yaitu adanya penarikan uang sebanyak dua kali oleh mantan perbekel. Tarikan pertama Rp 70 juta, dan tarikan kedua Rp 80 juta. Total Rp 150 juta.

Informasi yang didapat koran ini klop atau sesuai dengan keterangan Ariyaningsih saat ditahan penyidik. "Pak Perbekel pernah menarik langsung (uang) dua kali. Semuanya sudah saya sam-

paikan pada jaksa," beber Ariyaningsih saat ditahan 3 Desember 2019 lalu.

Para penyidik kabarnya juga galau lantaran Kajari Denpasar sebelumnya, Jehezkiel Devy Sudarso sudah merestui penetapan tersangka dua orang sekaligus, yaitu mantan bendahara dan mantan perbekel. Namun, ketika Devy dimutasi, hanya Ariyaningsih yang ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi tersebut kabarnya membuat para penyidik maju mundur dalam menetapkan tersangka baru. Meskipun secara alat bukti cukup kuat, tapi para penyidik tidak leluasa bergerak.

Terkait beredarnya kabar intervensi politik terhadap kinerja Kejari Denpasar, koran ini mengonfirmasi langsung Namiartha. Kepada koran ini, Namiartha membantah. "Tidak ada saya dilindungi. Saya tidak berani bicara apapun, agar tidak salah. Biarkan aparat penegak hukum yang menjalankan. Tidak ada intervensi," sangkal pria yang akrab disapa Jik Nami, itu.

Ditanya apakah pernah bertemu langsung dengan Kajari Denpasar yang baru Luhur Istighfar, Namiartha mengatakan tidak pernah. Selama ini yang pernah ditemui adalah penyidik. "Saya tidak pernah bertemu dengan Kajari. Saya bertemu penyidik karena saya diperiksa, maka otomatis datang," tukasnya.

Seperti diketahui, dugaan korupsi dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBDes 2017 Dauh Puri Klod, Denpasar Barat telah menetapkan satu orang tersangka per 31 Oktober 2019. Yakni Ni Luh Putu Ariyaningsih, mantan bendahara desa. Ariyaningsih dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. Dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sekitar Rp 770 juta. Berdasarkan audit BPKP kerugian negara sekitar Rp 980 juta. Meski demikian, mantan kepala desa masih aman, padahal dalam pengelolaan keuangan desa, penarikan dana milik desa di bank harus sepengetahuan kepala desa. (san/yor)



Bali Resik Sampah Plastik di Kawasan Tahura

Denpasar (Bali Post) -

Gerakan semesta berencana yang dilakukan di Provinsi Bali melalui program "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", khususnya dalam menjaga kesucian alam, Minggu (12/1) kemarin dilaksanakan kegiatan bersih sampah plastik di kawasan Tahura Ngurah Rai.

Ratusan orang terlibat dalam kegiatan yang bersinergi dengan kegiatan HUT ke-73 BPK RI. Tema kegiatan antara lain menjaga kesucian alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia *sekala niskala*.

Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan lingkungan sangat penting maknanya terutama dalam rangka pembangunan

berkelanjutan bagi sebuah daerah dan negara. Apapun alasannya, lingkungan harus dijaga. Setelah itu baru berpikir bagaimana menjaga lingkungan itu, seperti pariwisata. Sektor tersebut juga harus ikut menjaga lingkungan karena menyangkut kenyamanan dan kesehatan.

Lingkungan Bali harus dijaga bersama-sama, menjadi komitmen bersama, agar lingkungan tetap asri, tetap sehat, tetap memberi oksigen yang cukup dan tetap memberikan kenyamanan bagi fasilitas umum.

Dalam menjaga lingkungan ini, maka diperlukan gerakan-gerakan dalam menjaga lingkungan Bali. Apakah gerakan menanam, gerakan menjaga kebersihan harus ditumbuhkan. Kali ini, Bali

Resik sampah plastik juga melibatkan instansi vertikal, yakni BPK RI Perwakilan Bali.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Sulianto, mengatakan melalui kegiatan BPK Peduli Gerakan Bali Resik Sampah, setidaknya BPK juga berperan untuk mengetahui apakah program lingkungan bersih lingkungan sehat sudah dilaksanakan dengan baik apa belum, terutama dalam hal persampahan.

Melalui kegiatan ini, minimal BPK Perwakilan Bali berpartisipasi membangun Bali yang sadar akan sampah. Sedangkan dari kegiatan resik sampah, melihat kondisi di kawasan Tahura, sudah ada dampak gerakan untuk membangun budaya bersih. (kmb16)



Bali Post/kmb16

SAMPAH - Kegiatan bersih sampah plastik di kawasan Tahura Ngurah Rai.



Dana Ogoh-ogoh di Badung Rp 40 Juta Per Sekaa Teruna

MANGUPURA, NusaBali

Bantuan dana peningkatan kreativitas sekaa teruna (ST) untuk pembuatan ogoh-ogoh di Kabupaten Badung di 2020 ini melonjak drastis. Dari Rp 24 juta di tahun 2019, naik menjadi Rp 40 juta untuk masing-masing sekaa teruna.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten I Gde Eka Sudarwitha, menegaskan bantuan dana peningkatan kreativitas ST mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020. "Per sekaa teruna akan diberikan uang sebesar Rp 40 juta dipotong pajak 15 persen. Di Badung total ada 534 sekaa

teruna," ungkapnya, Minggu (12/1).

Bahkan, besaran bantuan senilai Rp 40 juta tersebut sudah masuk dalam APBD Induk 2020. "Jadi, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan sekitar 40 persen atau mengalami peningkatan sebesar Rp 16 juta dari nominal sebelumnya sebesar Rp 24 juta dipotong pajak 15 persen," papar mantan Camat Petang, ini.

Dengan adanya bantuan ini, Sudarwitha berharap semua ST dapat menyalurkan kreativitasnya dalam membuat ogoh-ogoh. Sebab, ogoh-ogoh

ini juga akan diberikan penilaian mulai dari segi bahan, cara pembuatan hingga hasil akhirnya. Seperti biasanya, persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam pembuatan ogoh-ogoh ini di antaranya adalah ogoh-ogoh harus menggambarkan sosok buta kala, berbahan alami yang ramah lingkungan, tinggi maksimal 5 meter.

"Ogoh-ogoh yang dilombakan juga tidak boleh bermuatan politik, tidak mengandung unsur pornografi, tidak berbau SARA," tegasnya.

Mengenai kapan pencairan dana bantuan tersebut, Sudar-

witha belum berani memastikan. Sebab, harus menunggu petunjuk dari pimpinan.

Walau begitu, seluruh ST se-Badung diminta untuk segera mengumpulkan kelengkapan administrasi seperti fotokopi rekening Bank BPD atas nama ST yang bersangkutan, KTP ketua ST, susunan pengurus ST, serta pengesahan lembaga. Kelengkapan administrasi ini harus sudah dikumpulkan paling lambat 15 Januari 2020. "Bila persyaratan sudah lengkap dan sudah ada petunjuk dari pimpinan, maka dana bisa dicairkan," tandasnya. **as**



Dinas PUPR Sedot Lumpur di Sungai Buatan Puspem Badung

MANGUPURA, NusaBali

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung mengerahkan mobil penyedot lumpur untuk membersihkan konsep ring river yang ada di Puspem Badung. Penyedotan lumpur dilakukan karena terjadi pendangkalan, semenjak intensitas hujan meningkat belakangan ini.

"Penyedotan lumpur kami lakukan bertahap sejak Sabtu (11/1). Kami akan terus pantau supaya tidak terjadi pendangkalan serupa ke depannya," kata Kepala Dinas PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba, Minggu (12/1).

Birokrat asal Tabanan ini menyatakan, kemungkinan

ring river kembali mengalami pendangkalan sangat besar. Sebab, aliran air berasal dari saluran subak. Bila irigasi di Subak Kwanji berlumpur karena hujan, bisa dipastikan lama kelamaan mengendap di ring river tersebut. "Kami akan rutin pantau bersama Bagian Perwat Setkab Badung, bila sudah dirasa banyak lumpur akan langsung disedot," tegasnya.

Walaupun masalah lumpur belum bisa diatasi, paling tidak sampah tidak ada yang terbawa aliran air dan masuk ke ring river. "Iya berkat dipasang jaring pengamanan, jadi paling tidak sampah tidak ikut terbawa, sehingga bisa kita lihat sekarang ring river terbebas dari sampah," ucap

Surya Suamba.

Sekadar mengingatkan, sungai buatan dengan konsep ring river yang ada di kawasan Puspem Badung mengalami pendangkalan, Jumat (10/1). Air juga tampak kecokelatan dan penuh dengan endapan lumpur. Kondisi ini terjadi semenjak hujan mengguyur wilayah Badung.

Pembangunan ring river dimaksudkan untuk mempercantik kawasan Puspem Badung. Pembangunan ring river dianggarkan sekitar Rp 5,4 miliar lebih. Anggaran bersumber dari APBD Badung tahun 2018. Ring river tersebut memiliki panjang 325 meter dengan kedalaman 1 meter dan lebar 2 meter. **asa**



Tabanan Rancang E-Ticketing Terintegrasi

TABANAN, NusaBali

Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengenalkan seluruh objek wisata, Pemerintah Kabupaten Tabanan merancang penerapan e-ticketing terintegrasi. Sudah ada 25 objek wisata yang didata untuk penerapan tiket elektronik terintegrasi tersebut. Konsep tersebut saat ini tengah dalam kajian.

Kepala Bapelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja mengatakan penerapan e-ticketing dilakukan untuk mengenalkan objek wisata yang belum berkembang. Padahal objek wisata dimaksud memiliki potensi dan nilai jual untuk dikunjungi. "Obyek wisata di Tabanan total ada 25, selama ini yang terkenal baru empat, Tanah Lot, Danau Beratan, Jatiluwih, dan Alas Kedaton. Padahal masih ada tempat yang lain," ungkapnya, Minggu (12/1).

Menurut Wiratmaja, untuk penerapan tersebut kini prosesnya masih dalam kajian dengan anggaran Rp 200 juta.

Pemkab Tabanan akan bekerjasama dengan perguruan tinggi guna membahas kajian tersebut. "Kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan pertengahan tahun 2020 sistemnya sudah selesai," tegas Wiratmaja.

Diterangkannya, pada sistem e-ticketing terintegrasi ini, wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Tabanan akan ditawarkan tidak saja datang ke satu objek wisata, namun ke lebih dari satu objek melalui paket wisata.

Misalnya, pada sistem e-ticketing terintegrasi ini membuat lima paket (satu paket berisi lima daerah yang dikunjungi). Maka dalam satu paket ada lima tempat bisa dikunjungi wisatawan yang berpedoman pada jarak yang berdekatan antara satu objek wisata dengan objek wisata lainnya.

"Misalnya menggabungkan atau memaketkan kunjungan ke DTW Tanah Lot, Yeh Gangga, Museum Subak, taman kupu-kupu, dan objek wisata ke puri dalam satu paket. Hal sama juga dilakukan pada

obyek wisata lainnya yang jaraknya berdekatan," bebernya.

Namun dalam menentukan paket kunjungan wisata tersebut, bisa saja dilakukan pengkajian lagi bila wisatawan menginginkan datang ke objek yang tidak termasuk dalam satu paket yang ditawarkan.

"Nanti di luar paket tersebut bisa juga digolongkan atas klasifikasi objek wisata, semisal didasari pada tempat atau objek wisata terfavorit atau paket khusus. Maka dari itu sistem ini masih dalam peng-

kajian. Jika kajian bagus akan dilanjutkan, jika negatif bisa tidak diteruskan, tergantung hasil kajiannya nanti," katanya.

Dan nantinya jika tiket elektronik ini sudah rampung, rencananya semua pengelolaan sistem e-ticketing terintegrasi ini melalui BUMDa Dharma Santika (PDDS). "Selain untuk mengenalkan objek yang belum berkembang, penerapan sistem tiket elektronik terintegrasi juga sebagai upaya meningkatkan PAD Tabanan," tandas Wiratmaja. **des**



Pembangunan SMPN 14 Denpasar Terbentur Kepemilikan Lahan



Tanah eks BaliTex di Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur yang rencananya bakal dibangun SMPN 14 Denpasar.

DED rampung Provinsi belum lakukan proses hibah

DENPASAR, NusaBali

Pembangunan SMPN 14 Denpasar yang rencananya akan dilakukan mulai April 2020 ini tampaknya masih belum bisa di proses. Lelang yang seharusnya dilakukan Februari 2020 masih terbentur kepemilikan tanah atau lahan. Tanah eks BaliTex di Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur merupakan milik provinsi yang belum dihibahkan ke Pemkot Denpasar hingga saat ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, I Nyoman Jimmy Sidharta saat dihubungi, Minggu (12/1) mengaku sudah siap untuk melakukan proses pembangunan tahap demi tahap kelanjutan SMPN 14 Denpasar. Pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk pembangunan tahap per-

tama. Detail Engenering Design (DED) bahkan sudah rampung sejak September 2019 lalu.

Namun, eksekusi lelang belum bisa dilakukan karena hibah tanah yang berada di eks BaliTex seluas 47 are tersebut belum dilakukan proses hibah ke Pemkot Denpasar. Dengan proses hibah yang belum diserahkan oleh provinsi, pihaknya pun belum bisa melakukan lelang di Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) Kota Denpasar.

Saat ini, kata Jimmy, pihaknya sudah siap dah bahkan sudah proses berkas lelang di LPSE. Namun, jika proses hibah belum juga dilakukan otomatis proses lelang juga ditunda. "Kalau dari kami sudah cukup siap dari DED, anggaran hingga lelang kami sudah persiapkan. Tapi apa daya, tanah yang kami akan bangun itu belum dihibahkan ke Denpasar ya kami tidak berani membangun," ungkapnya.

Dikatakannya, jika hibah tidak segera diproses maka dikhawatirkan pelaksanaan lelang dan proses pembangunan fisik akan

molor. Jadwal selesai juga tidak tepat waktu. Sedangkan, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah semakin dekat. "Tujuannya pemerataan sekolah, tapi kalau prosesnya belum selesai kami khawatir ini akan terus mundur. Jadi kami khawatir juga dengan waktu pendek bisa gak nanti diselesaikan oleh rekanan," imbuhnya.

Jimmy mengatakan, tahapan lelang direncanakan mulai bulan Februari hingga Maret 2020. Sehingga pengerjaan fisik bangunan bisa dimulai bulan April 2020 dengan waktu pengerjaan 210 hari. Fisik yang dikerjakan dalam tahap awal jika memang sudah dihibahkan yakni ruang kelas sebanyak 9 ruangan, dan ruang laboratorium sebanyak 6 kelas dan dinding pembatas sekolah.

Untuk ruang guru, dan gedung penunjang lainnya baru bisa dilakukan tahun berikutnya karena terbentur anggaran. "Kalau anggaran kami harus kaji kembali karena bahan mulai naik, tahun ini sudah bergeser harga bahannya. Jadi kami cek kembali cukup gak anggaran Rp 15 miliar itu. Tapi kalau kami lihat untuk pembangunan ruang belajar dan dinding pembatas itu nambah lagi 10 persen anggarannya. Sehingga kita akan cek dulu kembali sebatas yang bisa dikerjakan dengan anggaran segitu," ungkapnya.

Untuk pembangunan sekolah hingga selesai keseluruhan, pihaknya masih membutuhkan sekitar Rp 14 miliar lagi. "Kalau tahap lanjutan sepertinya lebih dari Rp 14 miliar lagi yang kami butuhkan. Sekarang kan baru hanya 13 ruangan saja dan pembatas sekolah. Jumlah ruangan sebenarnya rencananya 21 ruangan lebih sedikit dari SMPN 13 Denpasar karena luas tanah juga lebih kecil," ujar Jimmy.

Touring Jeepers dan Resik Sampah Plastik

★ Meriahkan HUT ke-73 BPK Bali

DENPASAR, NusaBali
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi pelaksanaan HUT ke-73 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Bali ditandai dengan Touring Jeep dilanjutkan aksi Bali Resik Sampah Plastik di Tahura, Ngurah Rai, Denpasar.

"Saya menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada jajaran BPK perwakilan Bali, atas komitmennya turut serta dalam program prioritas Provinsi Bali yakni bersih sampah, terutama sampah plastik," kata Sekda Dewa Indra seraya melepas peserta touring pecinta jeep (Jeepers) di halaman Kantor BPK perwakilan Bali, Minggu (12/1) pagi.

Sekda Dewa Indra menilai, keterlibatan BPK perwakilan Bali dalam program aksi bersih-bersih sampah ini menunjukkan baiknya hubungan antar instansi di provinsi Bali, tak peduli instansi lokal ataupun perwakilan pusat. "Aksi bersih sampah merupakan salah satu program prioritas yang sedang digencarkan Pemprov Bali. Bersyukur sekali BPK di HUT-nya yang ke-73 tahun ini turut berkontribusi langsung dalam aksi yang sangat bermanfaat



Sekda Dewa Made Indra melepas Touring Jeepers, Minggu (12/1) pagi.

ini. Semoga kedepan sinergi kita dalam satu 'ekosistem' pemerintahan di Pulau Bali ini semakin baik dan kuat," harap birokrat asal Pemaron, Buleleng ini.

Sementara itu, Kepala BPK perwakilan Bali Sri Haryoso Sulyanto mengatakan, touring jeep yang disusul aksi bersih-bersih sampah di Tahura Ngurah Rai, merupakan kegiatan

yang dilakukan dengan melihat pentingnya menjaga kelestarian mangrove di kawasan tersebut. "Terlebih kita ketahui Pemerintah Provinsi Bali sedang gencar mengadakan Bali Resik Sampah Plastik, sehingga kita ingin ikut ambil bagian," tutur Sri Haryoso.

Dijelaskan, rangkaian HUT ke-73 BPK ini untuk kantor

perwakilan Bali selain tour komunitas Jeep (Jeepers), juga melaksanakan berbagai pertandingan olahraga yang turut mengundang peserta dari berbagai pihak. Puncaknya, pada 20 Januari mendatang dilaksanakan upacara peringatan dan syukuran di Halaman Kantor BPK Perwakilan Bali.

Selanjutnya, Sekda Dewa

Indra dan Kepala Perwakilan BPK Wilayah Bali secara bersama melakukan touring menuju kawasan Tahura Mangrove, guna melakukan aksi Bali Resik Sampah Plastik. Kegiatan ini selain diikuti oleh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali juga diikuti oleh para siswa/i SMA/SMK di lingkungan Denpasar.



Sub Bagian Humas & TU BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

☐ RADAR BALI ☐ TRIBUN BALI ☐ BALI POST ☒ NUSA BALI



Dinas PMD Janjikan Insentif Desa

■ Untuk Tekan Angka Kemiskinan

■ Bagikan Dana Ekonomi Produktif bagi 27 Desa

SINGARAJA, Radar Bali - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng memberikan insentif pada desa-desa yang berhasil mengentaskan kemiskinan. Insentif sengaja disuntikkan, agar Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) tidak menurun

secara signifikan.

Pemerintah sengaja memberikan dana insentif itu, agar pemerintahan desa terpacu mengurangi angka kemiskinan. Namun bila angka kemiskinan berkurang secara signifikan, maka dana desa juga akan mengalami penurunan.

"Memang kami tangkap ada kesan tidak ingin kalau angka kemiskinan itu turun. Karena salah satu indikator penerimaan dana desa itu *kan* angka kemiskinan. Ini sebenarnya persepsi yang keliru," kata Kepala Dinas PMD Buleleng Made Subur, Minggu (12/1).

Memang kami tangkap ada kesan tidak ingin kalau angka kemiskinan itu turun. Karena salah satu indikator penerimaan dana desa itu *kan* angka kemiskinan. Ini sebenarnya persepsi yang keliru."

MADE SUBUR
KADIS PMD Buleleng

Pemerintah pun memutuskan memberikan dana insentif kepada desa-desa yang berhasil



DOK. RADAR BALI

menurunkan angka kemiskinan. Insentif itu pun bermacam-macam. Ada yang berupa dana

sebesar Rp 141 juta, ada pula tambahan alokasi dana desa sebesar Rp 130 juta.

Hingga kini tercatat ada 13 desa di Buleleng yang mendapat dana insentif dari pemerintah daerah sebanyak Rp 141 juta. Selain itu ada 23 desa lainnya yang mendapat tambahan alokasi dana desa senilai Rp 130 juta.

"Indikator penilaiannya bermacam-macam. Yang jelas jumlah penduduk miskin. Kemudian ada indeks desa membangun juga," imbuh Subur.

Selain itu, tahun ini Dinas PMD

Buleleng juga akan memberikan dana ekonomi produktif di 27 desa. Puluhan desa itu merupakan desa-desa yang menjadi *focus locus* pengentasan kemiskinan di Buleleng. Nantinya Dinas PMD Buleleng menggelontorkan dana pinjaman sebesar Rp 300 juta yang bersumber dari Dana Abadi Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Dana itu akan disalurkan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan yang diharapkan muncul ialah kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi produktif. (eps/gup)



Enam Pasar Dirancang Pakai E-Parkir

● PD Pasar Targetkan Pendapatan Rp 47.7 Miliar

DENPASAR, TRIBUN BALI

PD Pasar Kota Denpasar menargetkan pendapatan Rp 47.7 miliar pada tahun 2020 ini. Hal ini karena PD Pasar telah menerapkan parkir elektronik, serta adanya kenaikan biaya operasional pedagang (BOP). Pihak PD Pasar menganggap hal ini akan memberi pengaruh pada pendapatan mereka.

"Ada dua faktor yang mempengaruhi kenaikan rencana pendapatan PD Pasar Kota Denpasar Tahun 2020. Di antaranya pemberlakuan sistem parkir elektronik dan kenaikan BOP yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2020," kata Direktur Utama PD Pasar Kota Denpasar Ida Bagus Kompyang Wiranata, Minggu (12/1) sore.

Ia menambahkan, pemberlakuan parkir elektronik di 4 pasar terbukti telah mampu meningkatkan pendapatan PD Pasar pada 2019. Untuk itu tahun ini direncan-



TRIBUN BALI/I PUTU SUPARTIKA

BELANJA - Sejumlah pembeli berbelanja di Pasar Badung, Denpasar, belum lama ini. Pendapatan pasar ditargetkan naik pada tahun ini.

nakan pemberlakuan parkir elektronik di 6 pasar.

"Namun kami masih merancang, karena ada beberapa pasar seperti Pasar Anyar Sari yang menjadi tempat lalu lalang masyarakat di se-

kitar wilayah di sana. Sehingga masih perlu dibicarakan," imbuhnya.

Pendapatan dari parkir untuk tahun 2020 ditargetkan mencapai Rp 9.55 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi

dibanding pencapaian 2019 sebesar Rp 6.88 miliar.

"Selain efektif dengan pemberlakuan parkir elektronik, kenaikan pendapatan dari parkir juga karena adanya kenaikan kunjungan, terutama ke Pasar Badung yang disebabkan oleh meningkatkannya kunjungan masyarakat ke Tukad Badung untuk berekreasi," katanya.

Sementara itu, dari pendapatan BOP, tahun 2020 dirancang perolehan pendapatan PD Pasar Rp 14.9 miliar. Rancangan pendapatan tersebut setelah adanya pemberlakuan kenaikan BOP dari Rp 6.500 menjadi Rp 7.000 per hari. Sementara realisasi pendapatan pada tahun 2019 yaitu Rp 11.6 miliar.

"Sehingga total realisasi pendapatan pada 2019 mencapai Rp 40,8 miliar. Sementara target pendapatan Rp 39,08 miliar. Dan untuk tahun 2020 ini kami target Rp 47.7 miliar," katanya. (sup)